

**ANALISIS INKLUSIVITAS
PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**DARA AYU NIKEN PRABANDARI
145020101111074**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH IN EAST JAVA AND ITS INFLUENCING FACTORS

MINOR THESIS

By :

DARA AYU NIKEN PRABANDARI

145020101111074

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Attainment of the Degree of Bachelor of Economics**



**DEPARTEMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**"Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur
dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya"**

Yang disusun oleh :

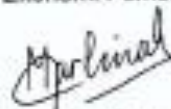
Nama : Dara Ayu Niken Prabandari
NIM : 145020101111074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Agustus 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D.
NIP. 196203151987011001
(Dosen Pembimbing)
2. Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph.D.
NIP. 198107022005011002
(Dosen Penguji I)
3. Anas Budiharjo, S.H.I., M.A.
NIP. 2016078505091001
(Dosen Penguji II)

Malang, 20 Agustus 2018
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya

Yang disusun oleh :

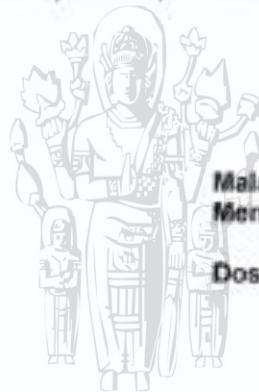
Nama : Dara Ayu Niken Prabandari
NIM : 145020101111074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.



**Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan**

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D
NIP. 196503111989032001



Malang, 25 Juli 2018
Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D
NIP. 196203151987011001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Dara Ayu Niken Prabandari
 Tempat, tanggal lahir : Malang, 29 Agustus 1996
 NIM : 145020101111074
 Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
 Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan
 Alamat : Jalan Dorowati Timur RT 03 RW 09, Desa Mulyoarjo,
 Kecamatan Lawang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur
 dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar keserjantaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing,

Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D
 NIP. 196203151987011001

Malang, 25 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Dara Ayu Niken Prabandari
 NIM. 145020101111074

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
 NIP. 196503111989032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dara Ayu Niken Prabandari
NIM : 145020101111074
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 Agustus 1996
Agama : Islam
Alamat : Jl. Dorowati Timur Rt 03 Rw 09,
Mulyoarjo, Kecamatan Lawang
Nomor Telepon/HP : 089604020485
Email : daraayuniken.p@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

- TK Al-Masyitoh 01 (2000 – 2002)
- SD Negeri Mulyoarjo 03 (2002 – 2008)
- SMP Negeri 1 Lawang (2008 – 2011)
- SMA Negeri 1 Lawang (2011 – 2014)
- S1 Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang (2014 – 2018)



ANALISIS INKLUSIVITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

Dara Ayu Niken Prabandari

Email: daraayuniken.p@gmail.com

ABSTRAK

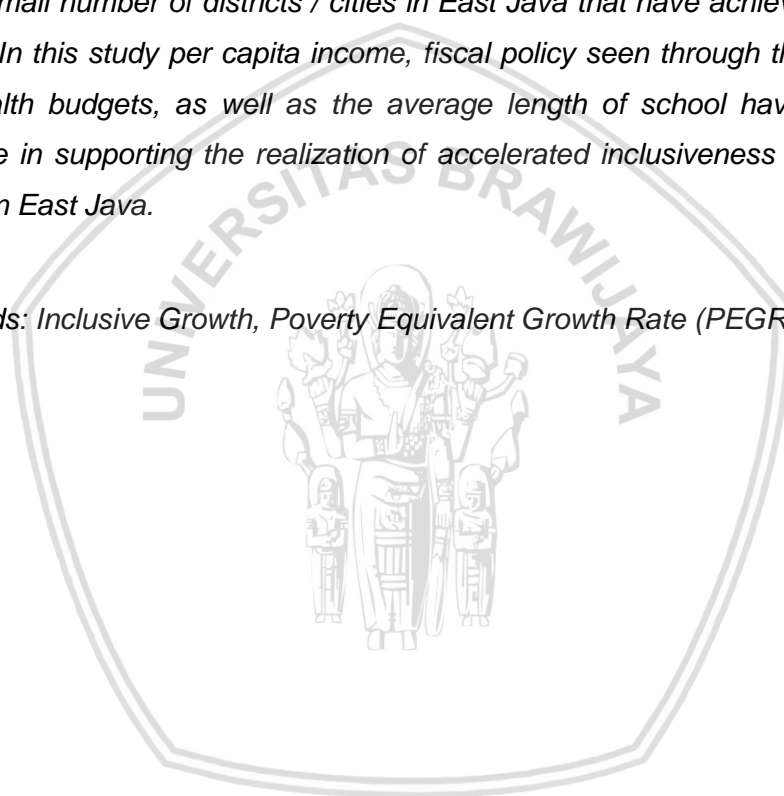
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang dapat mempercepat terjadinya inklusivitas. Dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2011-2015, penelitian ini menggunakan metode Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) oleh Klasen (2010) dan estimasi persamaan simultan 3SLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur belum sepenuhnya terjadi. Terbukti dengan masih sedikitnya jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Pada penelitian ini pendapatan per kapita, *fiscal policy* yang dilihat melalui anggaran pendidikan dan kesehatan, serta rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dalam mendukung terwujudnya percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Kata kunci: Pertumbuhan Inklusif, Metode Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR)

ABSTRAC

This study aims to calculate and analyze the inclusiveness of economic growth in East Java Province and the factors that can accelerate inclusiveness. Using secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Financial Balance (DJPK) in 2011-2015, this study uses the Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) method by Klasen (2010) and the estimation of 3SLS simultaneous equations. The results of this study indicate that the inclusiveness of economic growth in East Java has not fully occurred. Evidenced by the small number of districts / cities in East Java that have achieved inclusive growth. In this study per capita income, fiscal policy seen through the education and health budgets, as well as the average length of school have a positive influence in supporting the realization of accelerated inclusiveness of economic growth in East Java.

Keywords: *Inclusive Growth, Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR)*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya”**. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, diantaranya:

1. Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis selama hidup di dunia ini;
2. Keluarga tercinta, Bapak Gondo Wahyudi Santoso, Ibu Retno Wulan Ngesti Rahayu, Adik Erdiansyah Nico Kurniawan, dan Cantika Nindu Larasati yang telah memberi semangat, motivasi, do'a kepada penulis dalam mengerjakan proposal skripsi ini;
3. Dosen Pembimbing, Bapak Dwi Budi Santoso, SE., M.Sc., Ph.D yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, saran, rekomendasi, dan bimbingan dalam pengerjaan proposal skripsi;
4. Bapak Setyo Tri Wahyudi, SE., Mec., Ph.D dan Bapak Anas Budiharjo, S.H.I., M.A. sebagai dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan untuk skripsi ini;
5. Bapak Drs Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. dan Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang;

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bimbingan kepada penulis, serta Karyawan/Karyawati Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu dalam administrasi akademi penulis;
7. Teman-teman “DAN” Anggi Aulia Rahma dan Nadia Hasanah, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama masa perkuliahan ini, yang selalu memberi dukungan, morivasi, semangat, pendengar setia, dan menjadi partner diskusi yang terhebat.
8. Terakhir, terimakasih untuk sahabat spesial yang sudah menemani penulis dari masa ospek, Ahmad Maulana Hidayatullah. Berkat segala bentuk dukunganmu, semangatmu, motivasimu skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan;
9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga telah terlibat, berperan serta membantu dalam menyusun skripsi sampai selesai.

Semoga segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan prposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan proposal skripsi. Semoga proposal skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Malang, 29 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pembangunan Ekonomi sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan ..	10
2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik	12
2.3 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.....	16
2.3.1 Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan	18
2.3.2 Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan	20
2.3.3 Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran	22
2.4 Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi	24
2.5 Teori <i>Human Capital</i> dalam Pertumbuhan Ekonomi	25
2.6 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	25

2.7	Penelitian Terdahulu	28
2.8	Kerangka Pikir Penelitian	32
2.9	Hipotesis	33
BAB III	METODE PENELITIAN.....	34
3.1	Jenis Penelitian	34
3.2	Populasi	36
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	36
3.3.1	Definisi Operasional.....	36
3.3.2	Pengukuran Variabel Penelitian	38
3.4	Jenis dan Sumber Data	41
3.5	Metode Analisis Data	42
3.5.1	Metode Persamaan Simultan 3SLS.....	42
3.5.2	Uji Pemilihan Model	45
3.5.3	Penentuan Model.....	46
3.5.3	Identifikasi Model	47
3.5.4	Uji t-Statistik.....	48
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1	Gambaran Umum.....	49
4.1.1	Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.....	50
4.1.2	Kondisi Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur.....	50
4.1.3	Perkembangan <i>Human Capital</i> di Jawa Timur	53
4.1.4	Perkembangan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Jawa Timur	54
4.1.5	Kondisi Lahan Produktif di Jawa Timur	55
4.1.6	Perkembangan Tenaga Kerja di Jawa Timur	56
4.1.7	Perkembangan Investasi di Jawa Timur	57
4.2	Hasil Penelitian	58
4.2.1	Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur	59
4.2.2	Hasil Estimasi Persamaan Simultan	61

4.2.2.1	Persamaan Pendapatan Per Kapita	63
4.2.2.2	Persamaan Pertumbuhan Inklusif.....	65
4.3	Pembahasan	66
4.3.1	Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur	66
4.3.2	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur	80
4.3.2.1	Hubungan Langsung antara Anggaran Pendidikan dengan Pertumbuhan Inklusif.....	80
4.3.2.2	Hubungan Langsung antara Anggaran Kesehatan dengan Pertumbuhan Inklusif.....	81
4.3.2.3	Hubungan Langsung antara Lama Sekolah dengan Pertumbuhan Inklusif.....	83
4.3.2.4	Hubungan Langsung antara Pendapatan Per Kapita dengan Pertumbuhan Inklusif	83
4.3.2.5	Hubungan Langsung antara Lahan Produktif dengan Pendapatan Per Kapita	85
4.3.2.6	Hubungan Langsung antara Tenaga Kerja dengan Pendapatan Per Kapita	86
4.3.2.7	Hubungan Langsung antara Investasi dengan Pendapatan Per Kapita	86
4.3.2.8	Hubungan Tidak Langsung antara Lahan Produktif dengan Pertumbuhan Inklusif	87
4.3.2.9	Hubungan Tidak Langsung antara Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Inklusif.....	88
4.3.2.10	Hubungan Tidak Langsung antara Investasi dengan Pertumbuhan Inklusif	89
4.4	Implikasi Hasil Penelitian	89
BAB V	PENUTUP	99
5.1	Kesimpulan	99
5.2	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Hasil Uji Chow	61
Tabel 4.2	Hasil Uji Hausman	62
Tabel 4.3	Hasil Uji Identifikasi Model	63
Tabel 4.4	Hasil Estimasi Pendapatan per kapita.....	64
Tabel 4,5	Hasil Estimasi Persamaan Pertumbuhan Inklusif	65
Tabel 4.6	Rata-rata Anggaran Pendidikan Per Kapita 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2015	91
Tabel 4.7	Rata-rata Anggaran Kesehatan Per Kapita 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2015	93
Tabel 4.8	Rata-rata Lama Sekolah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2015.....	95
Tabel 4.9	Rata-rata Pendapatan Per Kapita 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2015.....	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	2
Gambar 1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	3
Gambar 1.3	Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional	4
Gambar 1.4	Gini Ratio Provinsi Jawa Timur dan Nasional	4
Gambar 2.1	Kurva “U-Terbalik” Kuznets.....	19
Gambar 2.2	Kerangka Pikir Penelitian.....	32
Gambar 4.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	49
Gambar 4.2	Perkembangan Tingkat Ketimpangan di Jawa Timur	51
Gambar 4.3	Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur dalam Juta Jiwa.....	52
Gambar 4.4	Jumlah Pengangguran di Jawa Timur.....	53
Gambar 4.5	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Jawa Timur	54
Gambar 4.6	Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Jawa Timur.....	55
Gambar 4.7	Luas Lahan Produktif di Jawa Timur.....	56
Gambar 4.8	Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Timur.....	57
Gambar 4.9	Perkembangan Investasi di Jawa Timur	58
Gambar 4.10	Rata-rata Indeks Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur	59
Gambar 4.11	Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang Berhasil Mencapai Pertumbuhan Inklusif	60
Gambar 4.12	Perbandingan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011....	68
Gambar 4.13	Perbandingan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012....	71
Gambar 4.14	Perbandingan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2013....	74
Gambar 4.15	Perbandingan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2014....	77
Gambar 4.16	Perbandingan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015....	79

Gambar 4.17 Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Jawa Timur	84
Gambar 4.18 Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Anggaran Pendidikan Tahun 2011-2015 pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur	90
Gambar 4.19 Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Anggaran Kesehatan Tahun 2011-2015 pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur	92
Gambar 4.20 Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015 pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur	94
Gambar 4.21 Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pendapatan Per Kapita Tahun 2011-2015 pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur	96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Hasil Uji Pemilihan Model
Lampiran 2	: Hasil Estimasi Persamaan Simultan 3SLS
Lampiran 3	: Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif Tahun 2011
Lampiran 4	: Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif Tahun 2012
Lampiran 5	: Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif Tahun 2013
Lampiran 6	: Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif Tahun 2014
Lampiran 7	: Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif Tahun 2015



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

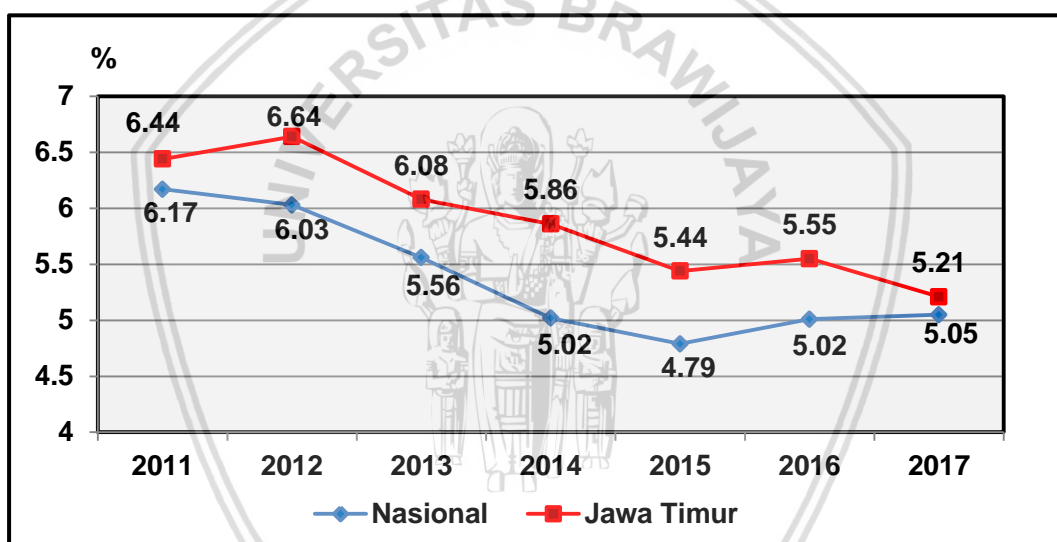
Semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, tidak terlepas dari isu percepatan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi dibutuhkan demi terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Menurut Todaro dan Smith (2011) terdapat dua perbedaan pandangan mengenai konsep pembangunan ekonomi, yaitu: (i) pandangan lama, dan (ii) pandangan baru. Pandangan lama mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah dilakukan untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun kualitas dari pertumbuhan ekonomi tidak terlalu diperhatikan.

Selanjutnya, pandangan baru muncul sebagai bentuk kesadaran mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam pandangan baru, pembangunan ekonomi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi juga memperhatikan kualitasnya. Selama dasawarsa 1960 sampai 1970-an sejumlah negara berkembang telah berhasil mencapai pertumbuhan yang tinggi, akan tetapi tingkat ketimpangan dan penganggurannya tidak kunjung menurun (Todaro dan Smith, 2011). Berdasarkan pengalaman tersebut, maka pertumbuhan ekonomi saat ini diarahkan agar lebih memperhatikan kualitasnya.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif lebih tinggi dibandingkan

dengan rata-rata nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, yang dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dari tahun 2011 hingga 2017, selalu berada di atas nasional. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa perekonomian di Jawa Timur dapat dikatakan lebih baik daripada nasional. Bahkan, melemahnya perekonomian global yang terjadi di tahun 2014, tidak membawa dampak yang begitu besar bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sedangkan, krisis global tersebut menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 1.1: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur dan Nasional

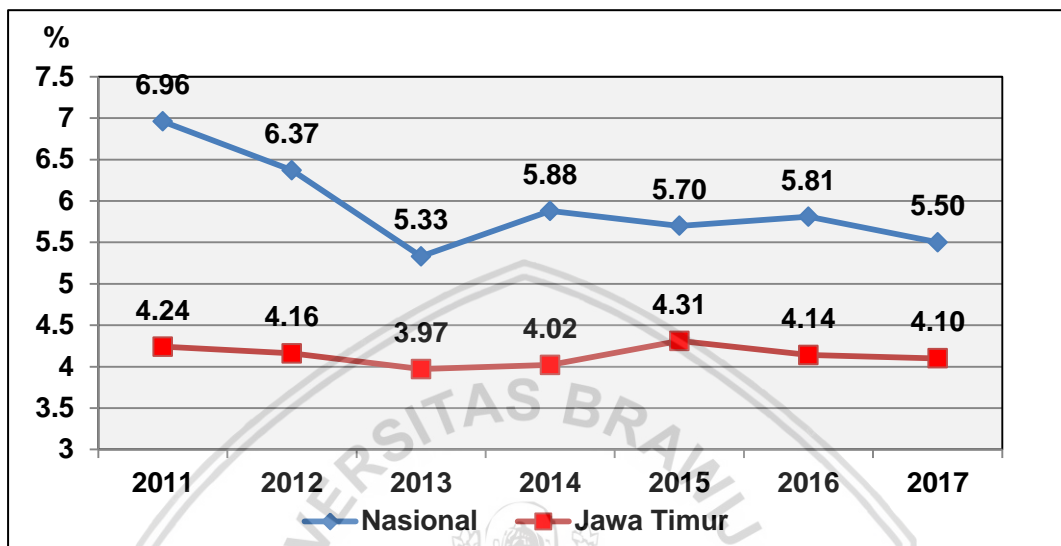


Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017c (data diolah).

Tidak hanya kinerja pertumbuhan ekonominya saja yang lebih baik dibandingkan dengan nasional. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Jawa Timur tergolong rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada level nasional. Rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disinyalir sebagai dampak positif dari baiknya kinerja perekonomian di Jawa Timur. Namun, kesempatan kerja yang ada di Jawa Timur belum sepenuhnya merata. Diduga, kesempatan kerja

mungkin hanya berpusat pada daerah-daerah perkotaan atau daerah-daerah industri, sehingga dibutuhkan pemerataan dalam hal kesempatan kerja.

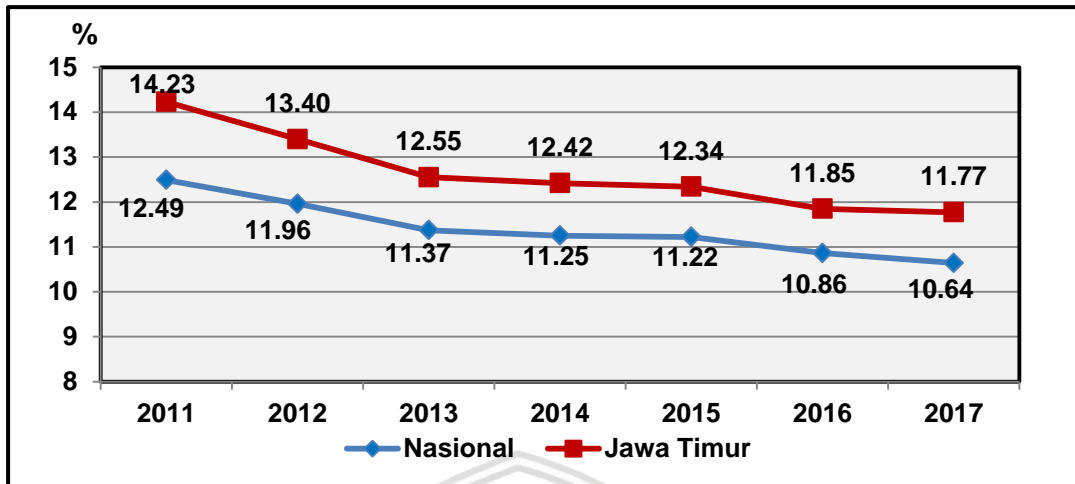
Gambar 1.2: **Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur dan Nasional**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017f (data diolah).

Jika pertumbuhan ekonomi dan pengangguran Jawa Timur memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan nasional, lain halnya dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangannya. Gambar 1.3 menunjukkan bahwa kemiskinan Jawa Timur ternyata lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Tingginya persentase kemiskinan Jawa Timur tersebut diduga disebabkan oleh masih banyaknya jumlah penduduk miskin yang ada di pedesaan. Sebagai tambahan informasi, pada bulan maret 2017 Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan paling tinggi di Pulau Jawa. Jika dikaitkan dengan capaian Jawa Timur mengenai laju pertumbuhan ekonomi dan penganggurannya, kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif baik tersebut belum memberikan manfaat secara luas kepada rakyat miskin. Dengan demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, ternyata belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan.

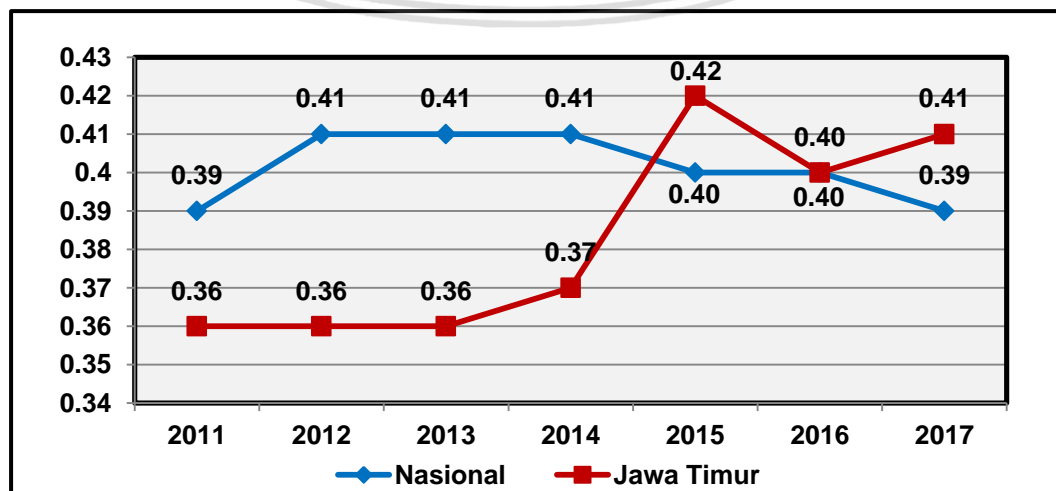
Gambar 1.3: Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017e (data diolah).

Sama halnya dengan kemiskinan, kondisi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur juga belum memberikan hasil yang memuaskan. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa gini ratio Jawa Timur yang semula berada di bawah nasional, mengalami peningkatan yang cukup drastis di tahun 2015. Bahkan peningkatan tersebut, membuat kondisi ketimpangan di Jawa Timur menjadi lebih buruk dibandingkan dengan ketimpangan nasional. Diduga, peningkatan ketimpangan tersebut merupakan dampak dari melemahnya perekonomian secara global yang terjadi pada tahun 2014.

Gambar 1.4: Gini Ratio Provinsi Jawa Timur dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016a (Data diolah).

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi makro ekonomi di Jawa Timur adalah laju pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tingkat pengangguran yang cukup rendah, namun, tingkat kemiskinan dan ketimpangan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur kedepan membutuhkan upaya ekstra dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Selain berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, kualitas dari pertumbuhan ekonomi juga harus lebih diperhatikan. Sampai pada titik ini, dibutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan kualitasnya. Strategi pembangunan tersebut dikenal dengan pertumbuhan inklusif.

Menurut *The United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Azwar (2016) pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga semua pihak memperoleh manfaat yang sama. Dalam hal ini, makna dari memperoleh manfaat yang sama adalah menjamin kesetaraan atau mengurangi ketimpangan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Anand *et al* (2013) dan Azwar (2016), pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor growth*). Sedangkan menurut Felipe (2012) pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang memberikan kesempatan bagi seluruh kalangan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang diikuti oleh tiga indikator yaitu menurunnya ketimpangan masyarakat dan kemiskinan, serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja (Klasen, 2010)

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan inklusif. Faktor pertama yaitu pendapatan per kapita. Dalam hal ini, pendapatan per kapita menjadi komponen

dasar dalam menilai kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Haan dan Thorat (2013), Sholihah *et al* (2013), Doumbia (2014), serta Tella dan Alimi (2016) membuktikan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan bagi pencapaian pertumbuhan inklusif.

Faktor kedua yaitu peran pemerintah (*government role*), hal ini berkaitan erat dengan peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Pemerintah berkewajiban menyusun strategi kebijakan yang dapat mengarahkan perekonomian menuju pertumbuhan yang inklusif. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan mengalokasikan anggaran secara efektif. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan membuktikan bahwa peran pemerintah, yang dilihat melalui belanja daerah (Azwar, 2016) dan anggaran pendidikan (Doumbia, 2014), memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Selain kedua faktor di atas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan inklusif yaitu kualitas sumber daya manusia, atau yang lebih dikenal sebagai modal manusia (*human capital*). Dengan menciptakan *human capital* yang berkualitas, maka kemampuan masyarakat untuk mengakses perekonomian menjadi lebih baik. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa *human capital* yang dilihat melalui angka partisipasi sekolah (Sholihah *et al* 2013; Azwar, 2016; Cahyadi *et al*, 2018) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif.

Meskipun pertumbuhan inklusif bukanlah isu yang baru, namun pembahasan mengenai pertumbuhan inklusif masih menjadi pembahasan yang menarik. Saat ini, berbagai indikator yang mencirikan pertumbuhan inklusif masih terus dikembangkan, termasuk bagaimana metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan inklusif (Azwar, 2016). Beberapa penelitian terdahulu

pernah dilakukan oleh Anand *et al* (2013) yang melakukan penelitian di beberapa negara di dunia, Felipe (2012) yang meneliti pertumbuhan inklusif pada beberapa negara di Asia, dan Ngepah (2017) melakukan penelitian di beberapa negara di Afrika. Secara spesifik, Lee dan Sissons (2016) melakukan penelitian di Inggris, disusul oleh Oluseye dan Gabriel (2017) di Nigeria, dan Singh (2017) di India. Sementara di dalam negeri, penelitian juga pernah dilakukan oleh Sholihah *et al* (2013) yang meneliti pertumbuhan inklusif di Indonesia, Azwar (2016) di Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya Cahyadi *et al* (2018) yang melakukan penelitian di Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Anand *et al* (2013), Felipe (2012), Ngepah (2017), Lee dan Sissons (2016), Oluseye dan Gabriel (2017), Singh (2017) di India masih terbatas pada lingkup nasional yang cakupannya relatif besar dan luas. Sedangkan, yang membahas dalam lingkup regional seperti Azwar (2016) dan Cahyadi *et al* (2018) masih terbatas. Padahal, saat ini banyak wilayah-wilayah baik provinsi maupun kabupaten yang mulai mengarahkan pembangunannya menuju pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan inklusif, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana mempercepat terwujudnya inklusivitas di seluruh wilayah Jawa Timur. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan kebijakan yang berbeda pula.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan menjadi tambahan materi dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya yang terkait dengan inklusivitas pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dan instansi terkait, mengenai kebijakan apa yang tepat untuk dilakukan guna meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan referensi serta dapat dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Pembangunan ekonomi dilakukan demi terciptanya perbaikan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Namun, istilah pembangunan ekonomi lebih identik ditujukan kepada negara-negara berkembang yang kondisi perekonomiannya masih belum stabil, sehingga peranan dari pembangunan ekonomi menjadi lebih besar. Menurut Todaro dan Smith (2011) pembangunan ekonomi adalah usaha untuk mengubah perekonomian suatu negara dari kondisi stagnan menjadi meningkat, dari yang awalnya berpendapatan rendah menjadi berpendapatan tinggi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses atau tahapan yang harus dijalani oleh setiap negara.

Sukirno (2006) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha untuk mengembangkan kegiatan perekonomian yang menghasilkan peningkatan dalam penyediaan infrastruktur, memperbanyak jumlah perusahaan, meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Berdasarkan dua pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi adalah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mengentaskan permasalahan utama di negara-negara berkembang yaitu mengurangi ketimpangan, kemiskinan absolut, dan pengangguran (Todaro dan Smith, 2011).

Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan ekonomi menjadi pembahasan tersendiri dalam ilmu ekonomi dan senantiasa berkembang. Menurut Todaro dan Smith (2011) terdapat dua perbedaan pandangan mengenai konsep pembangunan ekonomi yaitu pandangan tradisional (*Traditional*

Economic Measures) dan pandangan ekonomi baru (*The New Economic View of Development*). Perbedaan pandangan tersebut terletak pada indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam pandangan tradisional, pendapatan per kapita atau GNI (*Gross National Income*) menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan suatu pembangunan. GNI per kapita sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat karena mencerminkan seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro dan Smith, 2011). Pada saat itu, permasalahan mengenai distribusi pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran bukan merupakan sesuatu yang penting. Sehingga kualitas dari pertumbuhan ekonomi tidak terlalu diperhatikan.

Berbeda dengan pandangan ekonomi tradisional, pembangunan dalam pandangan ekonomi baru memiliki arti yang lebih kompleks dan tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita saja, tetapi juga memasukkan unsur pemerataan pendapatan atau disebut juga sebagai pengurangan kesenjangan masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam pandangan ekonomi baru menjadi suatu proses yang multidimensional, yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam perekonomian (Todaro dan Smith, 2011). Pandangan ini muncul dikarenakan pengalaman pembangunan pada tahun 1960 hingga akhir tahun 1970. Pada saat itu, negara-negara berkembang telah mencapai target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tingkat kehidupan masyarakat secara umum tidak mengalami perubahan. Angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran tidak turun melainkan semakin meningkat.

Hingga saat ini, kajian mengenai pembangunan ekonomi tidak pernah berhenti dan terus memberikan solusi yang menghasilkan kebijakan yang dapat membantu negara-negara berkembang agar dapat mengejar ketertinggalannya

dari negara maju. Pemerintah di negara berkembang dituntut untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tanpa mengabaikan permasalahan-permasalahan umum yang terjadi di negara berkembang seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi sudah lama dikembangkan sejak zaman merkantilisme di akhir abad 16 dan awal abad 17.—Meskipun teori mengenai pertumbuhan ekonomi lebih dahulu dikembangkan daripada pembangunan ekonomi, akan tetapi cakupan dalam pembangunan ekonomi lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian dari pembangunan ekonomi. Menurut Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi adalah bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi sebagai akibat dari berkembangnya kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pertumbuhan terjadi karena adanya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dari tahun ke tahun. Dasar teori pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikembangkan oleh para ahli ekonomi klasik diantaranya yaitu Adam Smith, Robert Malthus, David Richardo, dan John Stuart Mill. *Pertama*, dimulai dari pandangan Adam Smith mengenai pertumbuhan ekonomi, menurutnya perkembangan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006). Peningkatan jumlah penduduk akan memperluas pangsa pasar suatu negara, dengan meningkatnya pangsa pasar maka spesialisasi akan meningkat pula. Lebih lanjut, perkembangan spesialisasi dan pembagian tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan

mendorong perbaikan teknologi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Adam Smith memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang optimis dalam jangka panjang.

Kedua, pandangan David Richardo dan Robert Malthus muncul sebagai kritik dari pandangan Adam Smith mengenai pertumbuhan ekonomi. Menurut dua ekonom ini, dalam jangka panjang, perekonomian akan mengalami *stationary state* atau perekonomian tidak mengalami perkembangan sama sekali. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pandangan mereka mengenai pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah pesimis. Tambahan dari teori ini adalah diperkenalkannya *the law of diminishing return* atau tambahan hasil yang semakin berkurang. Hal ini terjadi, ketika pertumbuhan penduduk meningkat secara terus menerus, sedangkan luas tanah tetap, dan mengakibatkan tanah yang mutunya lebih rendah turut digunakan. Hal tersebut, menyebabkan produk marjinal seorang pekerja menjadi lebih rendah. Akibatnya, keuntungan yang diterima oleh para pengusaha menjadi menurun, sehingga dorongan untuk melakukan pembentukan modal menurun. Selanjutnya, permintaan akan tenaga kerja juga menurun.

Ketiga, pandangan Mill yang sependapat dengan Smith mengenai spesialisasi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Mill juga sependapat dengan Richardo, mengenai pertambahan penduduk yang terjadi secara terus menerus, sedangkan luas tanah tetap, yang akan mengakibatkan perekonomian berlangsung sesuai dengan hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Sumbangan Mill yang penting adalah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor sosial seperti adat istiadat, kepercayaan masyarakat juga turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Secara lebih sederhana, menurut para ekonom klasik, terdapat empat faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006). Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Populasi penduduk

Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adanya pertumbuhan penduduk berarti terdapat kenaikan jumlah angkatan kerja. Dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, maka jumlah tenaga kerja yang produktif juga lebih banyak sehingga dapat menghasilkan output yang lebih besar. Populasi penduduk yang banyak juga mencerminkan semakin besarnya pangsa pasar dalam negeri. Jika peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai. Akan tetapi, hal sebaliknya akan terjadi jika pertumbuhan penduduk yang ada, tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM-nya. Pertumbuhan penduduk tersebut malah menciptakan permasalahan baru yaitu pengangguran.

2. Jumlah stok barang modal

Jumlah stok barang modal atau yang sering disebut sebagai akumulasi modal diperoleh melalui pendapatan saat ini yang diinvestasikan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan output di masa depan. Investasi tersebut dapat berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung merupakan investasi yang memiliki dampak langsung, seperti pembangunan infrastruktur yang berupa perbaikan jalan raya, listrik, sanitasi, komunikasi, dan sebagainya. Sedangkan investasi tidak langsung contohnya yaitu pembangunan sistem irigasi pada suatu lahan, yang selanjutnya berdampak pada

peningkatan output sebanyak dua kali lipat dari lahan yang memiliki luas yang sama namun tidak mendapatkan irigasi. Adanya pembangunan irigasi tersebut sama halnya dengan melipatgandakan output lahan yang tidak mendapatkan irigasi. Investasi langsung dan tidak langsung tersebut merupakan bentuk investasi dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya alam. Selain sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia (*human capital*) juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan.

3. Luas tanah

Luas tanah, termasuk di dalamnya kekayaan alam, menjadi sektor utama dalam menggerakkan perekonomian pada masa-masa awal pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara yang baru berkembang, terdapat berbagai macam hambatan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi seperti kekurangan modal, tenaga ahli, dan pengembangan teknologi. Ekspor hasil pertanian dan minyak bumi menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh beberapa negara berkembang di Asia, sebagai langkah awal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negaranya. Dengan melakukan ekspor tersebut, maka akan menarik para pengusaha asing agar mendirikan usaha di negaranya.

4. Tingkat teknologi

Teknologi merupakan faktor yang paling penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat tiga klasifikasi dasar dalam kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi netral, hemat tenaga kerja, dan hemat modal (Todaro dan Smith, 2011). *Pertama*, kemajuan teknologi netral berasal dari adanya inovasi dalam hal pembagian kerja, yang selanjutnya dapat meningkatkan hasil produksi. *Kedua*, kemajuan teknologi hemat tenaga kerja yaitu kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya

penemuan dan inovasi baru seperti mesin, peralatan modern, komputer, internet, dan sebagainya. Adanya penemuan dan inovasi baru tersebut dapat meningkatkan hasil produksi, tanpa harus menambah jumlah tenaga kerja. *Ketiga*, kemajuan teknologi hemat modal yaitu kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya pengembangan teknik produksi yang berbiaya rendah dan efisien, sehingga hasil produksi dapat meningkat tanpa meningkatkan biaya modal.

2.3 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa teori mengenai pertumbuhan ekonomi senantiasa berkembang hingga saat ini, yang ditandai dengan munculnya konsep-konsep baru mengenai pertumbuhan ekonomi. Salah satu konsep pertumbuhan ekonomi yang paling baru adalah konsep mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif. Konsep pertumbuhan inklusif, merupakan pengembangan dari konsep *Pro Poor Growth* yang terlebih dahulu eksis sebagai salah satu kebijakan yang diterapkan di negara berkembang (Ali, 2007). Jika konsep *Pro Poor Growth* lebih menekankan pada pertumbuhan yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok miskin, maka konsep pertumbuhan inklusif memiliki cakupan yang lebih kompleks.

Kajian mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif sendiri, mulai berkembang di Asia sejak munculnya fenomena pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan peningkatan ketimpangan (Klasen, 2010). Adanya ketimpangan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, padahal kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari pembangunan ekonomi. Dengan kondisi yang demikian, maka diperlukan adanya perubahan strategi dari *Pro Poor Growth* ke *Inclusive Growth* (Ali, 2007). Terdapat beberapa perspektif mengenai

pertumbuhan inklusif yang dikemukakan oleh organisasi internasional maupun para peneliti terdahulu.

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) dalam Anand, *et al* (2013) terdapat dua dimensi dalam pertumbuhan inklusif. Dimensi yang *pertama* yaitu, pertumbuhan yang berkelanjutan yang selanjutnya berdampak pada meluasnya peluang ekonomi dalam masyarakat. Sementara dimensi *kedua*, masyarakat diberikan akses agar dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh *The United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Kristyanto dan Santoso (2015) pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga semua pihak memperoleh manfaat yang sama dari adanya pertumbuhan tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan inklusif menuntut adanya kesetaraan yang dapat dilihat melalui penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pendapat ini juga didukung oleh Suryanarayana dalam Singh (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat mengurangi ketidaksetaraan, terutama di antara sektor pertanian dan non-pertanian.

Selain ketimpangan, pertumbuhan inklusif juga berkaitan dengan konsep penurunan kemiskinan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Lee dan Sissons (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat mengentaskan kemiskinan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Singh (2017) juga memberikan pendapat yang sama, menurutnya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang juga memperhatikan distribusi pendapatan masyarakat. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang menerima distribusi pendapatan paling kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pembangunan yang berpihak pada rakyat miskin, sehingga kesejahteraannya meningkat.

Selain itu, pertumbuhan inklusif juga didefinisikan sebagai pertumbuhan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Pendapat tersebut dikemukakan oleh *World Bank* (2008) yang menyatakan dengan mendorong pertumbuhan industri yang padat karya dan melakukan perbaikan produktivitas tenaga kerja adalah komponen penting dalam mencapai pertumbuhan inklusif. Dengan begitu, pendapatan masyarakat miskin akan meningkat dan kemiskinan akan berkurang. Hal tersebut dapat terjadi karena mayoritas masyarakat miskin adalah masyarakat yang kurang terampil. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Felipe (2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat mendorong tercapainya *full employment* atau penggunaan tenaga kerja penuh. Artinya, tujuan dari pertumbuhan inklusif adalah untuk menciptakan kondisi yang tidak ada lagi masyarakat yang menjadi pengangguran ataupun dalam kondisi setengah menganggur. Tentunya hal tersebut harus dilakukan *step by step* dengan menerapkan beberapa kebijakan yang sudah direkomendasikan dalam penelitiannya.

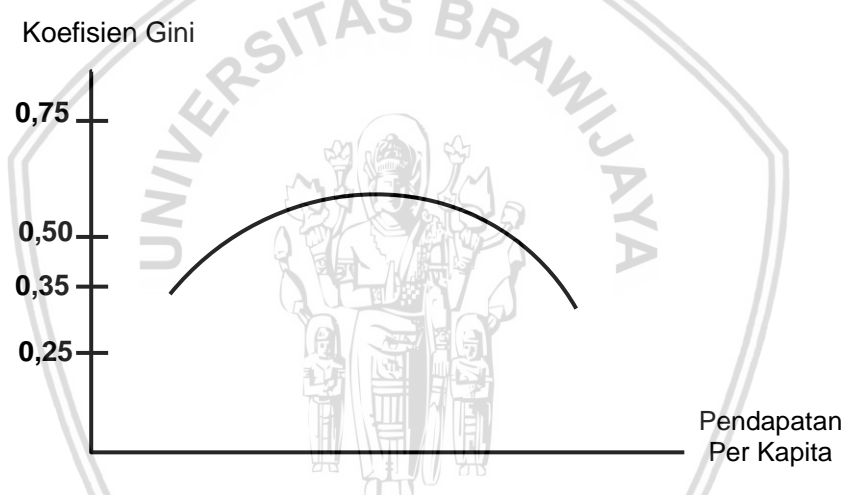
Dengan demikian, makna dari pertumbuhan inklusif dalam penelitian ini adalah gabungan dari definisi-definisi yang telah disebutkan di atas. Sehingga, pertumbuhan inklusif dalam penelitian ini adalah pertumbuhan yang dapat menurunkan ketimpangan pendapatan, menurunkan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran masyarakat.

2.3.1 Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan

Dalam pandangan ekonomi baru mengenai pembangunan, pertumbuhan ekonomi dikatakan memiliki keterkaitan dengan ketimpangan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya fakta yang terjadi di negara-negara berkembang selama dasawarsa 1960-1970. Selama dasawarsa tersebut, negara-negara berkembang telah mencapai pendapatan per kapita yang relatif tinggi, namun

tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan (Todaro dan Smith, 2011). Dengan kondisi yang demikian, secara otomatis mematahkan pandangan ekonomi tradisional yang mengatakan bahwa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada dasarnya, tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, jika ketimpangan masih terjadi maka kesejahteraan masyarakat akan menurun, pada akhirnya tujuan utama dari pembangunan ekonomi tidak dapat tercapai.

Gambar 2.1: Kurva “U-Terbalik” Kuznets



Sumber: Todaro dan Smith, 2011 (data diolah).

Pandangan mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan semakin kuat, setelah Simon Kuznets yang merupakan ekonom Neo Klasik memperkenalkan Hipotesis Kuznets. Hipotesis Kuznets digambarkan dengan kurva U-terbalik yang dapat dilihat pada gambar 2.1. Hipotesis ini juga dikenal sebagai hipotesis U-terbalik, karena kurvanya memiliki bentuk seperti huruf u yang terbalik. Kurva dalam Hipotesis Kuznets menggambarkan hubungan antara pendapatan per kapita dengan pemerataan distribusi pendapatan (Todaro dan Smith, 2011). Menurut Hipotesis Kuznets, pada tahap awal pertumbuhan

ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun sampai pada titik tertentu, distribusi pendapatan akan membaik. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan struktural dalam perekonomian suatu negara, dari perekonomian tradisional menuju ke perekonomian modern.

Penelitian Kuznets yang dilakukan di negara-negara Amerika Latin membuktikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan per kapita membentuk pola huruf U terbalik. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Juan Luis Lonondro di Kolombia, yang juga membentuk pola yang sama (Todaro dan Smith, 2011). Namun, peneliti lain tidak menemukan pola yang sama di beberapa negara Asia.

Berdasarkan data jangka panjang yang dimulai dari pertengahan tahun 1960 hingga pertengahan tahun 1990 di Asia Timur, Amerika Latin, dan Afrika, ditemukan sebuah fakta bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak hanya dilihat dari seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dilihat dari karakter pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah tersebut (Todaro dan Smith, 2011). Karakter pertumbuhan ekonomi tersebut meliputi bagaimana cara mencapainya, siapa saja yang turut berpartisipasi dalam menciptakan pertumbuhan, sektor apa saja yang dikembangkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakter-karakter tersebut yang akan menentukan sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan standar hidup orang miskin sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

2.3.2 Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Setelah munculnya pandangan ekonomi baru mengenai pembangunan, permasalahan fundamental bagi suatu negara bukan lagi mengenai bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih menekankan kepada siapa

saja yang menumbuhkan perekonomian tersebut (Todaro dan Smith, 2011). Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara hanya dihasilkan dari segelintir orang saja, maka manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi juga akan dimanfaatkan oleh kalangan itu saja (Azwar, 2016). Dengan demikian, masyarakat yang miskin akan semakin terpinggirkan, karena mereka tidak turut andil dalam menumbuhkan perekonomian. Ketika masyarakat miskin semakin miskin dan masyarakat kaya semakin kaya, maka hal tersebut akan memunculkan permasalahan baru, yaitu meningkatnya ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan memang memiliki keterkaitan satu sama lain. Pendapat tersebut didukung oleh Ali (2007) yang menyatakan *“the relation between growth and poverty is a complex one, and is also determined by the level changes in inequality”*. Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Ravallion, Son dan Kakwani dan Bourguignon. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan memang memiliki keterkaitan (Azwar, 2016). Dalam penelitian tersebut, ditemukan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi angka kemiskinan, ketika suatu wilayah tersebut memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi. Akan tetapi, hal yang berbeda terjadi ketika suatu wilayah memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menjadi tidak signifikan.

Sementara itu, terkait dengan hubungan antara pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, banyak pendapat yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara cepat, akan menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat miskin (Todaro dan Smith, 2011). Lebih jauh, kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka menurunkan kemiskinanpun dinilai menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Padahal, usaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan

bukanlah hal yang saling bertentangan. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, maka akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan nutrisi, kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anak mereka, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan merangsang permintaan barang-barang produksi sehingga perekonomian dapat tumbuh lebih besar.

Hubungan positif antara pertumbuhan dan kemiskinan ditunjukkan oleh bukti empiris terjadi di Tiongkok. Selama 30 tahun terakhir, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengurangan kemiskinan yang tinggi pula (Todaro dan Smith, 2011). Pada tahun 1981 jumlah penduduk miskin di Cina adalah sebanyak 634 juta jiwa dan menurun menjadi 128 juta jiwa pada tahun 2004. Keberhasilan Pemerintah Cina dalam menurunkan angka kemiskinan ternyata disebabkan oleh penerapan kebijakan yang mendorong perluasan sektor modern. Fenomena yang sama juga ditunjukkan oleh Negara Vietnam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara yang melaksanakan pertumbuhan secara berkelanjutan adalah negara yang paling berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan di negaranya. Walaupun demikian, suatu negara tidak dapat secara pasif hanya bergantung pada pertumbuhan yang berkelanjutan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Studi di beberapa negara berkembang telah membuktikan bahwa peningkatan pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin adalah faktor-faktor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Todaro dan Smith, 2011).

2.3.3 Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dijelaskan dalam Hukum Okun (Mankiw, 2007). Hukum Okun diperkenalkan pada tahun

1962 oleh seorang ekonom yang bernama Arthur Okun, dalam sebuah artikel yang memuat persamaan empiris yang menghubungkan tingkat pengangguran dan output riil atau *Gross National Product* (GNP) riil (Dornbusch dan Fischer, 1989). Hukum ini muncul dikarenakan pada saat itu, untuk menghasilkan lebih banyak barang produksi, dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Dengan menggunakan lebih banyak tenaga kerja, hal tersebut berarti mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Berbeda dengan Dornbusch dan Fischer (1989) yang menggunakan GNP riil, Mankiw (2007) menggunakan *Gross Domestic Product* (GDP) riil dalam literturnya yang membahas mengenai Hukum Okun. Menurut Mankiw (2007) GDP merupakan ukuran paling luas dalam menggambarkan kondisi perekonomian secara keseluruhan dan siklus bisnis yang terjadi di suatu negara.

Arthur Okun dalam artikelnya, mengemukakan temuan yang didapatkan dari hasil observasi terhadap data GDP Amerika Serikat (Mankiw, 2007). Observasi tersebut menghasilkan temuan bahwa ketika jumlah pengangguran meningkat, maka GDP riil cenderung tumbuh lebih lambat. Dalam Hukum Okun, hubungan antara tingkat pengangguran dengan GDP riil Amerika Serikat pada tahun 1951-2000 diformulasikan sebagai berikut:

$$\Delta Y/Y = 3\% - 2 \times \Delta u \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana: $\Delta Y/Y$ = Perubahan GDP riil

Δu = Perubahan tingkat pengangguran

Berdasarkan persamaan di atas, dapat diketahui jika tingkat pengangguran tidak berubah, maka GDP riil akan naik sebesar 3 persen. Jika tingkat pengangguran turun sebesar 1 persen, maka GDP riil akan tumbuh sebesar 5 persen. Akan tetapi, jika pengangguran naik sebesar 1 persen, maka GDP riil hanya akan mengalami peningkatan sebesar 1 persen. Dari penjelasan tersebut, dapat

disimpulkan bahwa Hukum Okun menggambarkan hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dan GDP (Mankiw, 2007).

2.4 Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith dalam Mangkoesoebroto (1997) pemerintah memiliki tiga fungsi penting, yaitu (i) menyelenggarakan peradilan, (ii) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, serta (iii) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Dari pernyataan itulah dapat diketahui jika pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peranan paling penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di suatu negara. Dalam perekonomian modern, terjadi perubahan fungsi dan peranan pemerintah. Menurut Dumairy (1999) pemerintah memiliki tiga peran atau fungsi yaitu:

1. Fungsi alokasi, pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar pemanfaatannya bisa optimal dan efisien. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam menangani kasus eksternalitas dan kegagalan pasar. Hal tersebut berarti, fungsi alokatif juga menuntut pengeluaran anggaran oleh pemerintah.
2. Fungsi distributif, pemerintah berperan dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi secara adil kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan. Dalam mewujudkan hal ini, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dalam rangka mendistribusikan pendapatan masyarakat agar tercipta pemerataan pendapatan.
3. Fungsi stabilitatif, pemerintah berperan dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.

2.5 Teori *Human Capital* dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pentingnya modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan dimulai pada tahun 1960-an. Pemikiran ini diprakarsai oleh Theodore Schultz yang membahas mengenai *investment in human capital*. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, pendidikan berkontribusi langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan, peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, meningkatnya produktivitas tenaga kerja ini yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Adanya kesenjangan pendidikan antara negara berkembang dan negara maju inilah yang menjadi penyebab adanya perbedaan kualitas SDM, tenaga kerja, dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi antara Negara berkembang dan Negara maju. Hal ini disebabkan karena negara maju memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik daripada negara berkembang. Sehingga negara-negara berkembang perlu mengejar ketertinggalan dengan cara melakukan investasi modal manusia dapat dilakukan dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan, perbaikan gizi dan juga kesehatan (Simanjuntak, 1998).

2.6 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Salah satu metode dalam mengukur pertumbuhan ekonomi inklusif dikembangkan oleh Klasen (2010). Metode pengukuran yang dikembangkan Klasen (2010) diadaptasi dari metode penelitian *pro-poor growth* yang pernah dilakukan oleh Kakwani dan Son (2008) yaitu konsep *Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)*. Dalam penelitian tersebut, konsep *PEGR* didefinisikan sebagai metode untuk mengukur pertumbuhan inklusif, yang dilihat dari perspektif masyarakat miskin. Metode penghitungan *PEGR* memiliki dua teknik analisis yaitu *ex-ante* dan *ex-post*. Menurut Kakwani *et al* dalam Azwar (2016) teknik analisis *ex-ante* tidak mungkin dilakukan, karena teknik ini menggunakan asumsi

bahwa perubahan ketimpangan pendapatan hanya terjadi ketika terdapat pergeseran secara proporsional dan konstan pada kurva Lorenz. Padahal, pergeseran titik pada kurva Lorenz dapat disebabkan oleh banyak hal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakanlah teknik analisis *ex-post* yang membandingkan tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan dengan menggunakan kurva Lorenz dan rata-rata pendapatan penduduk pada awal dan akhir periode.

Dalam metode PEGR, ukuran kemiskinan dimisalkan sebagai fungsi dari garis kemiskinan (z), rata-rata pendapatan (μ), dan kurva Lorenz ($L(p)$), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$P = P(z, \mu, L(p)) \dots \dots \dots (2.2)$$

sedangkan ukuran kemiskinan yang digunakan yaitu:

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^\alpha \dots \dots \dots (2.3)$$

Dimana:

$\alpha = 0,1,2$

y_i = pendapatan penduduk ke- i

q = jumlah penduduk miskin.

Sedangkan, perubahan persentase penduduk miskin pada periode 1 dan 2 dirumuskan sebagai berikut:

$$P_{12} = P_2 - P_1 = Ln [P(z, \mu_2, L_2(p))] - Ln [P(z, \mu_1, L_1(p))] \dots \dots (2.4)$$

Berdasarkan rumus di atas, dapat diketahui bahwa nilai P_{12} masih mengandung komponen pertumbuhan dan distribusi. Jika μ_1 dan μ_2 adalah rata-rata pendapatan penduduk pada periode 1 dan 2, maka pertumbuhan pendapatan penduduk (\hat{y}) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{y} = Ln(\mu_2) - Ln(\mu_1) \dots \dots \dots (2.5)$$

Total elastisitas kemiskinan (δ) dapat didekomposisikan menjadi elastisitas kemiskinan yang berkaitan dengan pertumbuhan (η) dan elastisitas kemiskinan yang berkaitan dengan ketimpangan (ζ). Persamaan untuk total elastisitas (δ) adalah sebagai berikut:

$$\delta = \frac{Ln [P(z, \mu_2, L_2(p))] - Ln [P(z, \mu_1, L_1(p))]}{\hat{y}} \dots\dots\dots(2.6)$$

dan

$$\delta = \eta + \zeta \dots\dots\dots(2.7)$$

dimana elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{1}{2y} = \frac{Ln [P(z, \mu_2, L_1(p))] - Ln [P(z, \mu_1, L_1(p))]}{L_1(p)} + \frac{Ln [P(z, \mu_2, L_2(p))] - Ln [P(z, \mu_1, L_2(p))]}{L_2(p)} \dots\dots\dots(2.8)$$

sedangkan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{1}{2y} = \frac{Ln [P(z, \mu_1, L_2(p))] - Ln [P(z, \mu_1, L_1(p))]}{L_1(p)} + \frac{Ln [P(z, \mu_2, L_2(p))] - Ln [P(z, \mu_2, L_1(p))]}{L_2(p)} \dots\dots\dots(2.9)$$

Berdasarkan rumusan di atas, maka indeks PEGR adalah sebagai berikut:

$$PEGR = \gamma^* = (\delta/\eta) \gamma \dots\dots\dots(2.10)$$

Jika $\gamma^* = \gamma$ artinya, pertumbuhan bersifat netral, setiap orang menerima manfaat yang sama dari pertumbuhan

Jika $\gamma^* > \gamma$ artinya, pertumbuhan bersifat *pro poor growth* atau dengan kata lain penduduk miskin menerima manfaat lebih banyak dari pertumbuhan.

Jika $0 < \gamma^* < \gamma$ artinya, pertumbuhan belum bersifat *pro poor growth*, manfaat pertumbuhan lebih banyak diterima penduduk yang tidak miskin, terjadi peningkatan ketimpangan namun kemiskinan masih menurun.

Jika $\gamma^* < 0$ artinya, pertumbuhan bersifat tidak *pro poor growth*, manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh penduduk yang tidak miskin, sehingga angka kemiskinan meningkat.



Dengan mengadopsi konsep perhitungan dalam PEGR, pertumbuhan inklusif dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IG_{ij} = (E_{ij} / E_i) E_j \dots\dots\dots (2.11)$$

Dimana: IG_{ij} = Koefisien pertumbuhan inklusif

E_{ij} = Pertumbuhan kelompok i dan kaitannya dengan indikator j

E_j = Pertumbuhan indikator j

Dalam hal ini i mengacu pada kelompok yang kurang beruntung tertentu dan j mengacu pada indikator yang bersangkutan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai inklusivitas pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhinya telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, meskipun dengan judul yang tidak sama persis. Penelitian yang pernah dilakukan memang memiliki hasil yang berbeda, tetapi mengindikasikan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah berhasil dikumpulkan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anand *et al* (2013) dengan judul "*inclusive growth: measurement and determinants*". Penelitian ini dilakukan di 143 negara terpilih dari berbagai belahan dunia yaitu afrika, asia pasifik, eropa, asia timur, asia tengah, dan negara barat. Penelitian ini dilakukan dengan rentang waktu yang cukup jauh, namun berbeda-beda setiap negara. Salah satunya yaitu di Botswana yang menggunakan tahun 1986 sebagai tahun awal dan tahun akhir 1994 sebagai tahun akhir, selanjutnya ada Bangladesh yang menggunakan tahun 1992 sebagai tahun awal dan 2010 sebagai tahun akhir. Penelitian ini menggunakan *sosial mobility curve* yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Son pada tahun 2007, yang bertujuan untuk

mengukur inklusivitas pertumbuhan ekonomi. sedangkan untuk mengukur faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif menggunakan regresi data panel dari 143 negara dan periode 5 tahun. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dari 143 negara terpilih, sudah banyak negara yang pertumbuhan ekonominya inklusif. Negara dengan pertumbuhan ekonomi inklusif tertinggi diraih oleh Maldives, diikuti dengan Azerbaijan dan Armenia. Sedangkan negara yang pertumbuhan ekonominya belum inklusif adalah Burundi, Madagaskar, Ukraina, Algeria, Turkmenistan, Uzbekistan, Bolivia, dll. Variabel yang memengaruhi inklusivitas pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah pendidikan, keterbukaan perdagangan, konsumsi pemerintah, investasi, dan inflasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Oluseye dan Gabriel (2017) dengan judul *“determinants of inclusive growth in nigeria: an ardl approach”*. Penelitian ini dilakukan di Nigeria pada tahun 1981 hingga 2014 dengan menggunakan model regresi *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi inklusif di Nigeria antara lain pendapatan awal, investasi langsung luar negeri atau *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah dalam hal pendidikan, modal tetap, pertumbuhan penduduk, pengeluaran konsumsi pemerintah dan inflasi memiliki hubungan jangka panjang. Pendapatan awal dan FDI memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dalam jangka panjang. Sedangkan inflasi memiliki pengaruh positif dalam jangka pendek, namun memiliki pengaruh negatif dalam jangka panjang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sholihah *et al* (2013) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dan dampaknya terhadap pertumbuhan kelas menengah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2008-2012 dengan menggunakan regresi data panel untuk faktor yang

memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dan dampaknya terhadap pertumbuhan kelas menengah, sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi inklusif menggunakan metode PEGR yang dikembangkan oleh Klasen (2010).

Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2008-2012 tidak inklusif. Pada tahun 2008 hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Papua Barat adalah provinsi yang mengalami pertumbuhan inklusif. Di tahun 2010, Provinsi NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan adalah provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi inklusif. Di tahun 2011, Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah adalah provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi inklusif. Sedangkan di tahun 2009 dan 2012 tidak ada satupun Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi inklusif.

Masih dalam penelitian yang dilakukan Sholihah *et al* (2013) faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan kemiskinan antara lain pendapatan perkapita, investasi pemerintah dalam bentuk modal fisik, angka partisipasi sekolah, dan ketimpangan. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan ketimpangan antara lain kontribusi sektor pertanian, inflasi dan jumlah penduduk. Sementara faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menyerap kerja antara lain pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Mengenai dampaknya terhadap pertumbuhan kelas menengah, pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan memiliki dampak positif dan signifikan. Sedangkan pertumbuhan yang inklusif dalam menurunkan ketimpangan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja memiliki dampak yang negatif dan signifikan.

Keempat, penelitian yang dilakukan Azwar (2016) yang melakukan penelitian dengan judul “pertumbuhan inklusif di Sulawesi Selatan dan faktor-

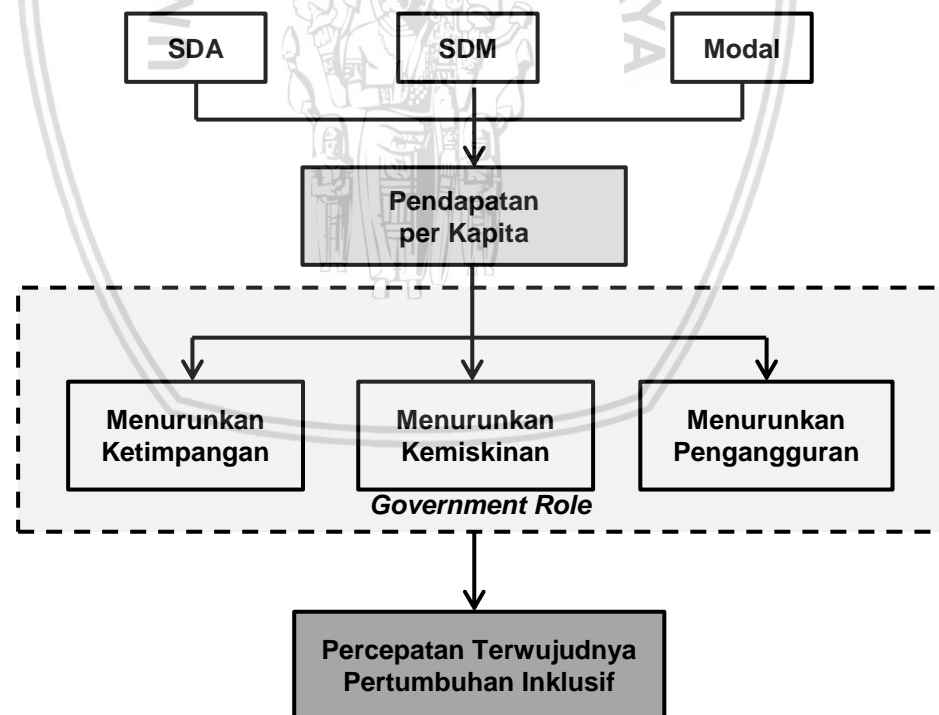
faktor yang memengaruhinya”. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 hingga 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan Model *Social Mobility Curve* oleh Anand *et al* (2013) dan model PEGR oleh Klasen (2010) untuk menghitung inklusivitas pertumbuhan ekonomi, dan menggunakan regresi Data Panel untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil dari penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan belum memiliki pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain faktor kesehatan dan belanja daerah yang memiliki pengaruh yang positif, sedangkan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang negatif.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi *et al* (2018) yang melakukan penelitian di 9 kabupaten di Provinsi Bali, dengan periode penelitian selama 9 tahun, yang dimulai dari tahun 2007-2015. Sama seperti Sholihah *et al* (2013), dan Azwar (2016), penelitian ini juga menggunakan model PEGR dalam menghitung inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Penelitian dengan judul “*inclusive growth and leading sector in Bali Province*” ini menghasilkan temuan bahwa secara umum daerah dengan basis pertanian cenderung memiliki pertumbuhan yang pro-poor dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan tetapi memiliki pertumbuhan yang anti pro-poor dalam menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, daerah-daerah dengan potensi wisata yang tinggi, memiliki pertumbuhan yang anti pro-poor dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, akan tetapi memiliki pertumbuhan yang pro-poor dalam menyerap tenaga kerja.

2.8 Kerangka Pikir Penelitian

Pertumbuhan inklusif dalam penelitian ini merupakan gabungan dari pendapat beberapa organisasi internasional dan para peneliti terdahulu yang memiliki definisi masing-masing. Gambar 2.2 menunjukkan kerangka pikir dalam penelitian ini. Sesuai dengan makna pertumbuhan inklusif dalam penelitian ini yang cukup kompleks, terdapat tiga dimensi pertumbuhan inklusif. Ketiga dimensi tersebut adalah pengurangan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik, terdapat tiga faktor yang memengaruhi PDRB suatu wilayah. Ketiga faktor tersebut antara lain sumber daya alam yang dilihat dari luas lahan, sumber daya manusia yang dilihat dari tenaga kerja, dan modal atau investasi.

Gambar 2.2: Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2018.

Ketika tiga faktor tersebut meningkat, secara teori maka PDRB juga akan meningkat. Meningkatnya PDRB, berkorelasi positif dengan pendapatan per

kapita masyarakat. Ketika PDRB meningkat, maka pendapatan per kapita juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, ketika pendapatan per kapita masyarakat meningkat, maka konsumsi dan investasi masyarakat pun akan meningkat. Hal tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan juga ketimpangan. Pengurangan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan dapat dipercepat jika ada peranan dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Ketika pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan berhasil di tekan maka percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.

2.8 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pikir terhadap rumusan masalah, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur belum inklusif secara keseluruhan.
2. Diduga anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, lama sekolah, dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan inklusif di Jawa Timur.
3. Diduga lahan produktif, tenaga kerja, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pendapatan per kapita di Jawa Timur.
4. Diduga lahan produktif, tenaga kerja, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan inklusif di Jawa Timur melalui pendapatan per kapita.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara yang digunakan dalam melaksanakan suatu penelitian (Hasan, 2002). Metode penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan/atau informasi yang empiris sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan hipotesis penelitian dapat diuji (Neolaka, 2014). Menurut Hasan (2002), metode penelitian mencakup prosedur penelitian dan teknik penelitian. Dalam hal ini, prosedur penelitian membicarakan mengenai urutan kerja penelitian, sedangkan metode penelitian membahas mengenai alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan langkah untuk menentukan urutan kerja penelitian dan alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengumpulkan data yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa metode penelitian haruslah selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah usaha untuk mengklasifikasi penelitian-penelitian yang sudah ada (Prasetyo dan Jannah, 2005). Dalam jenis penelitian, dikenal pula dengan pendekatan penelitian, yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Prasetyo dan Jannah, 2005). Pendekatan kuantitatif disebut juga sebagai pendekatan positivistik karena berangkat dari teori atau menguji kebenaran suatu teori dengan melakukan penelitian berdasarkan data yang empiris. Di sisi lain, pendekatan kualitatif disebut sebagai pendekatan non-positivistik atau interpretif karena berangkat dari pengamatan

karena temuannya tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya yang kemudian disesuaikan dengan teori (Prasetyo dan Jannah, 2005). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inklusivitas pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka jenis penelitian yang diambil adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif lebih tepat untuk mencapai tujuan penelitian karena dua alasan. *Pertama*, penelitian ini membutuhkan data-data empiris yang sudah tersedia di lembaga-lembaga yang bersangkutan seperti data mengenai pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, pendapatan per kapita penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah tenaga kerja, indeks pendidikan, indeks kesehatan, anggaran pendidikan dan kesehatan sehingga tidak memerlukan pengamatan atau observasi langsung.

Kedua, penelitian ini mencoba untuk menghitung tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang menggunakan data dinamis yang dikeluarkan dari instansi terkait. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk menganalisa fakta berdasarkan data yang ada di lapangan (pertumbuhan ekonomi, indeks pendidikan, indeks kesehatan, anggaran pendidikan dan kesehatan) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang positivistik. Jika penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka penelitian menjadi tidak efisien karena cakupannya yang luas yaitu 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Apalagi data yang dibutuhkan adalah data-data statistik, bukan data-data yang tidak dapat dihitung seperti tingkat kepuasan, kebahagiaan, dll. Berdasarkan alasan tersebut, maka pendekatan kuantitatif lebih sesuai digunakan daripada pendekatan kualitatif.

3.2 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut cukup beralasan mengingat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, tetapi tidak diimbangi dengan perbaikan kondisi makro lainnya. Tingkat ketimpangan cenderung meningkat, demikian pula dengan jumlah pengangguran. Sedangkan dalam hal penurunan angka kemiskinan, Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami stagnan, bahkan melambat. Selain itu, pada tahun 2014 berdasarkan salah satu misi yang tertuang dalam perubahan RPJMD 2014-2019, tepatnya dalam misi kedua yaitu “meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi”. Misi tersebut mengamanahkan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang didapatkan melalui agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

Waktu yang dipilih adalah mulai dari tahun 2011 hingga 2015. Dipilihnya tahun 2011 sebagai tahun awal dalam penelitian ini didasarkan pada hasil analisa dari *World Bank* (2011) yang menyatakan bahwa “Provinsi Jawa Timur berpeluang untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif”. Peluang tersebut dikarenakan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur yang relatif stabil dan selalu berada di atas rata-rata nasional. Hal ini didukung oleh sumber daya baik sumber daya alam maupun manusia.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat atau sesuatu hal yang dapat diamati atas variabel-variabel penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam waktu tertentu, yang dibagi dengan jumlah penduduk. Dalam penelitian ini, pendapatan per kapita menggunakan log natural (LN).
2. Lahan Produktif adalah luas lahan sawah berupa sawah irigasi dan non irigasi dalam satuan km^2 . Dalam penelitian ini, lahan produktif menggunakan log natural (LN).
3. Tenga Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang sudah bekerja. Dalam penelitian ini, tenaga kerja menggunakan log natural (LN).
4. Investasi adalah jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan pengeluaran untuk barang modal yang berusia pemakaian yang tidak lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi dalam satuan miliar rupiah. Dalam penelitian ini, PMTB menggunakan log natural (LN).
5. Indeks pertumbuhan inklusif adalah tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan menggunakan metode *Poverty-Equivalent Growth Rate* (PEGR) yang dikembangkan oleh Klasen (2010), dimana metode penelitian mengenai *pro-poor growth* yang dilakukan oleh Kakwani *et al.*
6. Anggaran pendidikan per kapita adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di sektor pendidikan dalam satuan miliar rupiah yang dibagi dengan jumlah penduduk.
7. Anggaran kesehatan per kapita adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di sektor kesehatan dalam satuan miliar rupiah yang dibagi dengan jumlah penduduk.

8. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lama waktu yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan pendidikan formal.

3.3.2 Pengukuran Variabel Penelitian

Salah satu variabel dalam penelitian ini yaitu indeks pertumbuhan ekonomi inklusif (IG), memerlukan penghitungan terlebih dahulu. Penghitungan IG dilakukan dengan menggunakan metode PEGR yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Klasen (2010), Sholihah *et al* (2013), dan Azwar (2016). Sama seperti Klasen (2010) dan Sholihah *et al* (2013), penelitian ini juga mendefinisikan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan yang menurunkan ketimpangan, kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Dengan demikian, persamaan untuk menghitung IG adalah sebagai berikut:

1. Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan ketimpangan (IG_{in}) dengan rumus sebagai berikut:

$$IG_{in} = (E_{in.g} / E_{in}) \hat{G}_g \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana:

IG_{in} = Koefisien pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan ketimpangan

$E_{in.g}$ = Elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi

E_{in} = Elastisitas ketimpangan terhadap pendapatan rata-rata

\hat{G}_g = Pertumbuhan ekonomi

$E_{in.g}$ dapat dihitung dengan rumus:

$$E_{in.g} = \ln_{12} / \hat{G}_g \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana \ln (ketimpangan) merupakan fungsi dari indeks gini (GINI) dan pendapatan rata-rata penduduk (μ), sehingga dapat ditulis:

$$\ln = \ln (\text{GINI}, \chi) \dots \dots \dots (3.3)$$

Dengan begitu, perubahan ketimpangan pada periode 1 dan 2 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\ln_{12} = \ln_2 - \ln_1 = \ln [\ln (\text{GINI}_2, \chi_2) - \ln [\ln (\text{GINI}_1, \chi_1)] \dots \dots \dots (3.4)$$

Selanjutnya, \hat{G}_g dihitung sebagai perubahan pada PDRB, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\hat{G}_g = \ln (\text{PDRB}_2) - \ln (\text{PDRB}_1) \dots \dots \dots (3.5)$$

Sedangkan rumus untuk menghitung E_{in} yaitu:

$$E_{in} = \ln_{12} / y \dots \dots \dots (3.6)$$

Dimana y merupakan perubahan dari χ , yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$y = \ln (\chi_2) - \ln (\chi_1) \dots \dots \dots (3.7)$$

2. Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan kemiskinan (IG_p) dengan rumus sebagai berikut:

$$IG_p = (E_{pg} / E_p) \hat{G}_g \dots \dots \dots (3.8)$$

Dimana:

IG_p = Koefisien pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan kemiskinan

E_{pg} = Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi

E_p = Elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

\hat{G}_g = Pertumbuhan ekonomi

E_{pg} dapat dihitung dengan rumus:

$$E_{pg} = P_{12} / \hat{G}_g \dots \dots \dots (3.9)$$

dimana P (kemiskinan) merupakan fungsi dari jumlah penduduk miskin (z) dan pendapatan rata-rata penduduk (χ), sehingga dapat ditulis:

$$P = P (z, \chi) \dots \dots \dots (3.10)$$

Dengan begitu, perubahan kemiskinan pada periode 1 dan 2 dapat dihitung sebagai berikut:

$$P_{12} = P_2 - P_1 = \text{Ln} [P(z_2, \kappa_2)] - \text{Ln} [P(z_1, \kappa_1)] \dots (3.11)$$

Selanjutnya, \hat{G}_g dihitung sebagai perubahan pada PDRB, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\hat{G}_g = \text{Ln} (\text{PDRB}_2) - \text{Ln} (\text{PDRB}_1) \dots (3.12)$$

Sedangkan rumus untuk menghitung E_p yaitu:

$$E_p = P_{12} / y \dots (3.13)$$

Dimana y merupakan perubahan dari κ , yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$y = \text{Ln} (\kappa_2) - \text{Ln} (\kappa_1) \dots (3.14)$$

3. Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menyerap tenaga kerja (IG_{em}) dengan rumus sebagai berikut:

$$IG_{em} = (E_{em.g} / E_{em}) \hat{G}_g \dots (3.15)$$

Dimana:

IG_{em} = Koefisien pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menyerap tenaga kerja

$E_{em.g}$ = Elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

E_{em} = Elastisitas penyerapan tenaga kerja

\hat{G}_g = Pertumbuhan ekonomi

$E_{em.g}$ dapat dihitung dengan rumus:

$$E_{em.g} = E_{m12} / \hat{G}_g \dots (3.16)$$

dimana E_m (penyerapan tenaga kerja) merupakan fungsi dari jumlah orang yang bekerja (W) dan jumlah angkatan kerja (AK), sehingga dapat ditulis:

$$E_m = E_m (W, AK) \dots (3.17)$$

Dengan begitu, perubahan penyerapan tenaga kerja pada periode 1 dan 2 dapat dihitung sebagai berikut:

$$E_{m12} = E_{m2} - E_{m1} = \ln [E_m (W_2, AK_2)] - \ln [E_m (W_1, AK_1)] \dots \dots \dots (3.18)$$

Selanjutnya, \hat{G}_g dihitung sebagai perubahan pada PDRB, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\hat{G}_g = \ln (PDRB_2) - \ln (PDRB_1) \dots \dots \dots (3.19)$$

Sedangkan rumus untuk menghitung E_{em} yaitu:

$$E_{em} = E_{m12} / AK^* \dots \dots \dots (3.20)$$

Dimana AK^* merupakan persentase perubahan dari AK , yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$AK = \ln (AK_2) - \ln (AK_1) \dots \dots \dots (3.21)$$

IG dalam penelitian ini adalah gabungan dari IG_{in} , IG_p dan IG_{em} , sehingga:

$$IG = \frac{IG_{in} + IG_p + IG_{em}}{3} \dots \dots \dots (3.22)$$

IG dapat dikatakan inklusif, apabila nilai dari $IG \geq \hat{G}_g$.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung maupun diolah langsung oleh peneliti, tetapi diusahakan oleh pihak lain. Sehingga, metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, internet, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data yang diambil dari BPS Jawa Timur adalah data mengenai pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, pendapatan per kapita penduduk, ketimpangan, jumlah

tenaga kerja, indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Sedangkan data mengenai anggaran pendidikan dan kesehatan diperoleh melalui informasi APBD tahunan menurut fungsi yang dipublikasikan oleh DJPK.

3.5 Metode Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas dan informatif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel, grafik, maupun diagram. Akan tetapi, analisis deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini hanya menggunakan bantuan tabel dan grafik. Analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel yaitu mengenai indeks inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk grafik yaitu pembahasan mengenai gambaran umum dari kondisi perekonomian berupa pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja.

3.5.1 Metode Persamaan Simultan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Menurut Gujarati dan Porter (2009) data panel adalah data kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross-section*). Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Sedangkan data *cross-section* adalah data dalam satu tahun dengan banyak variabel. Menurut Baltagi dalam Gujarati dan Porter (2009), terdapat dua keunggulan data panel dibandingkan dengan data *time series* maupun *cross-section*. *Pertama*, data

panel memberikan lebih banyak informasi karena mempelajari observasi *cross-section* yang berulang-ulang, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari dinamika perubahan. *Kedua*, data panel dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kolinieritas antar variabel bebas. Dengan demikian, hasil estimasi dengan data panel akan lebih baik dibandingkan dengan penggunaan data *cross section* maupun *time series* (Sholihah *et al*, 2013).

Dalam bidang ekonomi, seringkali terjadi interdependensi dimana terdapat hubungan yang saling memengaruhi (hubungan dua arah) antara variabel bebas (X) dan terikat (Y). Bukan hanya X yang memengaruhi Y, akan tetapi Y juga bisa memengaruhi X, dengan kata lain X pada suatu persamaan dapat menjadi Y pada persamaan lain (Gujarati dan Porter, 2012). Menurut Ekananda (2015) suatu persamaan yang variabel-variabel di dalamnya memiliki peranan ganda, menjadi X dalam suatu persamaan dan menjadi Y dalam persamaan lain disebut dengan model persamaan simultan (*Simultaneous Equation Model*). Tentu saja kondisi tersebut berbeda dengan regresi linear klasik, yang hanya menggambarkan korelasi antara X atau beberapa X terhadap Y. Jika variabel bebas dan terikat dalam suatu persamaan terindikasi memiliki hubungan yang simultan secara teori, maka analisis regresi dengan menggunakan regresi data panel biasa menjadi kurang tepat.

Menurut Chow dalam Ekananda (2015) terdapat dua alasan mengapa model persamaan simultan baik untuk digunakan, yaitu: (i) model persamaan simultan adalah model yang cocok untuk diterapkan dalam berbagai aplikasi ekonomi; dan (ii) model persamaan simultan menggunakan model stokastik yang cocok digunakan dalam menguji teori ekonomi serta menguji hubungan ekonomi berdasarkan uji statistik.

Selain itu, model persamaan simultan juga dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang dunia nyata jika dibandingkan dengan model persamaan

tunggal (Ekananda, 2015). Hal tersebut sebanding dengan kondisi yang terjadi di dunia nyata, dimana terdapat hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi.

Dalam model persamaan simultan, istilah variabel dependen (variabel bebas) dan variabel independen (variabel terikat) sudah tidak digunakan lagi. Dalam model persamaan simultan dikenal dengan istilah variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen (*endogenous variable*) adalah variabel terikat yang nilainya telah ditentukan dalam suatu model (Ekananda, 2014; Gujarati dan Porter, 2009). Sedangkan variabel eksogen (*exogenous variable*) adalah variabel yang tidak ditentukan dalam model, tetapi memiliki pengaruh terhadap variabel endogen (Ekananda, 2014; Gujarati dan Porter, 2009).

Menurut Greene dalam Ekananda (2015) terdapat beberapa metode yang digunakan dalam mengestimasi model persamaan simultan. Metode tersebut antara lain *Indirect Least Square* (ILS), *Two Stage Least Square* (2SLS), *Three Stage Least Square* (3SLS), *Limited Information Maximum Likelihood* (LIML), dan *Full Information Maximum Likelihood* (FIML). Metode ILS digunakan pada persamaan yang teridentifikasi secara tepat (*exactly identified*), sedangkan metode 2SLS dan 3SLS digunakan pada persamaan yang teridentifikasi secara berlebihan (*overidentified*). Sebagai pengembangan dari model 2SLS, model 3SLS menjadi model yang lebih baik bila dibandingkan dengan 2SLS dan ILS. Hal tersebut disebabkan karena estimasi dengan 3SLS menghasilkan estimasi yang lebih efisien (memiliki standar error yang lebih kecil).

Menurut Ekananda (2015) metode 3SLS digunakan apabila peneliti menginginkan adanya:

1. Interaksi residu antar persamaan dalam bentuk *variance covariance of residual* Σ
2. Keterkaitan antara persamaan dalam satu sistem informasi

3. Adanya evaluasi hasil 2SLS dalam bentuk penggunaan residu hasil estimasi 2SLS
4. Menginginkan estimasi yang lebih efisien, sehingga estimasi 3SLS bersifat *full information* sehingga setara dengan FIML.

Terdapat empat langkah dalam melakukan estimasi persamaan simultan menurut Ekananda (2015), antara lain: (i) menduga semua persamaan *reduced form* dalam model simultan dengan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS), (ii) mensubstitusikan nilai *endogenous* ke dalam persamaan struktural yang berada di sebelah kanan persamaan, (iii) selanjutnya persamaan tersebut diduga dengan OLS dan akan diperoleh nilai *error term*, (iv) menghitung covarian serta menstransformasikan variabel asal dan selanjutnya menggunakan GLS.

3.5.2 Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model perlu dilakukan, mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Persamaan simultan dengan metode ILS, 2SLS, dan 3SLS hanya dapat dilakukan jika model yang terpilih dari uji pemilihan model adalah *common effect* dan *fixed effect*. Namun demikian, jika dalam uji pemilihan model yang terbaik adalah *random effect*, maka persamaan simultan yang lebih tepat adalah menggunakan *Vector Autoregressive Models* (VAR). Terdapat tiga macam pengujian dalam uji pemilihan model. Uji pemilihan model tersebut antara lain:

1. Uji F (*Uji Chow*). Uji ini dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara *common effect* dan *fixed effect*. Jika nilai probabilitas (Prob) $F > \alpha$ (0,05) maka model yang terpilih adalah *common effect*, tetapi jika $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *fixed effect*.

2. Uji Hausman. Uji ini dilakukan untuk memilih model yang terbaik di antara *fixed effect* dan *random effect*. Jika nilai $\text{Probchi}^2 > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *random effect*, tetapi jika $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *fixed effect*.
3. Uji LM (Lagrange Multiplier). Uji ini dilakukan untuk membandingkan/ memilih model mana yang terbaik antara *random effect* dan *common effect*. Jika nilai $\text{Prob. chibar}^2 > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *common effect*, sedangkan jika $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *random effect*.

3.5.3 Penentuan Model

Dalam penelitian ini, model persamaan simultan dipilih karena dapat menjelaskan permasalahan ekonomi yang kompleks, dimana Model ini mampu menggambarkan fenomena pertumbuhan ekonomi inklusif dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Model persamaan simultan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua persamaan yaitu persamaan pendapatan per kapita dan persamaan pertumbuhan inklusif. Berikut adalah model persamaan simultan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Persamaan Pendapatan per kapita

$$\text{GDP_KAP}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LP}_{it} + \alpha_2 \text{TK}_{it} + \alpha_3 \text{INVEST}_{it} + e_{1it} \dots \dots \dots (3.23)$$

2. Persamaan Pertumbuhan Inklusif

$$\begin{aligned} \text{IG}_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{GDP_KAP}_{it} + \beta_2 \text{SPE_EDU}_{it} + \beta_3 \text{SPE_HLT}_{it} + \beta_4 \text{RLS}_{it} + \beta_5 \\ & + e_{2it} \dots \dots \dots (3.24) \end{aligned}$$

Keterangan:

- GDP_KAP = Pendapatan per kapita (dalam LN)
 IG = Indeks pertumbuhan inklusif
 LP = Lahan produktif (dalam LN)

TK	= Tenaga Kerja (dalam LN)
INVEST	= Investasi (dalam LN)
SPE_EDU	= Anggaran pendidikan per kapita
SPE_HLT	= Anggaran kesehatan per kapita
RLS	= Rata-rata lama sekolah
$\alpha_0, \dots, \alpha_3$	= Koefisien persamaan pendapatan per kapita
β_0, \dots, β_5	= Koefisien persamaan pertumbuhan inklusif
i	= <i>Cross section</i> (kabupaten/kota ke-i)
t	= <i>Time series</i> (tahun ke-t)
e	= eror

Berdasarkan persamaan (3.23) dan (3.24) dapat diketahui bahwa variabel endogen dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan per kapita (GDP_KAP) dan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif (IG). Sedangkan variabel eksogennya adalah variabel anggaran pendidikan (SPE_EDU), anggaran kesehatan (SPE_HLT), rata-rata lama sekolah (RLS), luas lahan pertanian (LP), tenaga kerja (TK), dan investasi (INVEST).

3.5.4 Identifikasi Model

Sebelum memilih metode untuk menduga parameter dalam persamaan simultan, identifikasi model perlu dilakukan terlebih dahulu. Dengan kata lain, persamaaan harus teridentifikasi terlebih dahulu agar pendugaan parameter dapat dilakukan. Suatu persamaan dapat dikatakan:

1. *Exactly identified* : $K - k = m - 1$
2. *Underidentified* : $K - k < m - 1$
3. *Overidentified* : $K - k > m - 1$

Dimana:

K = jumlah variabel yang sudah ditetapkan (*predetermined*) dalam model, termasuk intersep

k = jumlah variabel yang sudah ditetapkan (*predetermined*) dalam persamaan yang diestimasi

m = jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi.

3.5.5 Uji t-Statistik

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Dalam persamaan simultan, uji t-statistik dilakukan dengan melihat nilai Prob. Z dari masing-masing variabel bebas. Apabila Prob. Z lebih besar daripada tingkat kesalahan estimasi ($\alpha=0,05$), maka variabel bebas tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila Prob. Z lebih kecil daripada tingkat kesalahan estimasi ($\alpha=0,05$), maka variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat.

BAB IV

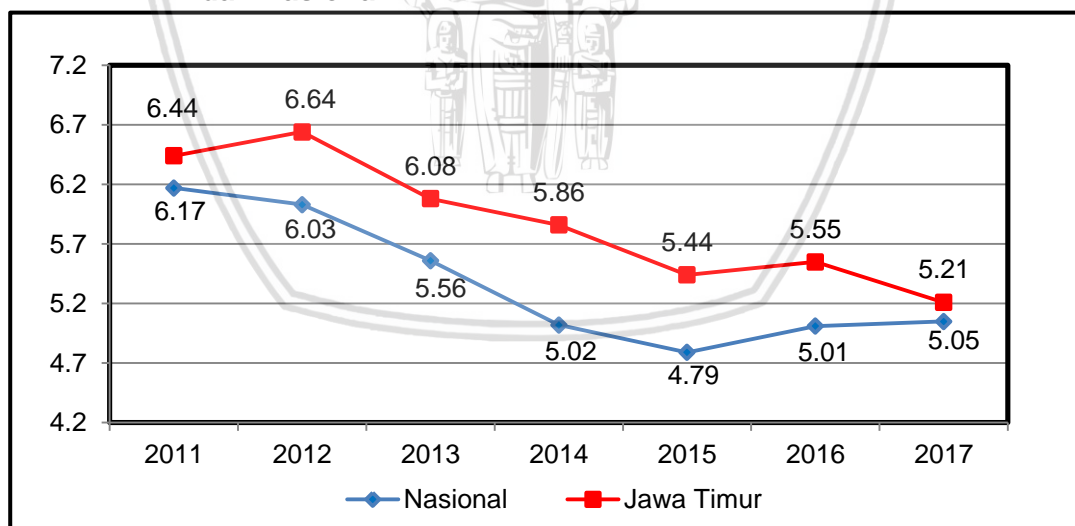
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki perekonomian terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2015, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian nasional sebesar 14,50% perekonomian nasional. Selain memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, Jawa Timur juga memiliki kinerja perekonomian yang lebih baik daripada nasional. Hal tersebut dibuktikan oleh tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang selalu berada di atas rata-rata nasional yang dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1: **Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional**



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017c (data diolah).

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang dilihat melalui laju PDRB atas dasar harga konstan memang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, meskipun keduanya memiliki tren yang menurun.

Krisis perekonomian secara global pada tahun 2014, nyatanya tidak membawa dampak yang besar bagi perekonomian Jawa Timur. Namun, krisis tersebut menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa kinerja perekonomian Jawa Timur lebih baik dibandingkan nasional.

4.1.2 Kondisi Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur

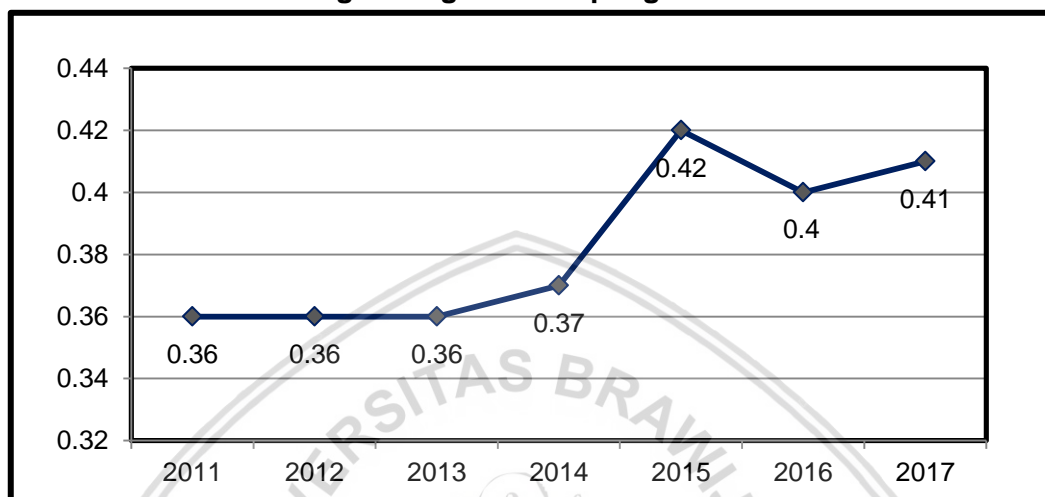
Kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian nasional dan kinerja perekonomiannya membuktikan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan perekonomian yang sudah maju. Namun pada saat ini, pembangunan ekonomi cenderung menitikberatkan pada kualitas seiring dengan tetap memperhatikan kuantitas. Pertumbuhan ekonomi inklusif atau lebih sering disebut sebagai pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang memperhatikan kualitas

Komponen pertama dari pertumbuhan inklusif adalah ketimpangan yang rendah. Pada umumnya, tingginya pertumbuhan di negara berkembang, akan diikuti dengan tingginya ketimpangan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada, hanya dihasilkan oleh sebagian masyarakat saja. Nampaknya, kondisi tersebut juga terjadi di Jawa Timur. Gambar 4.2 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur yang memiliki tren yang meningkat.

Pada awalnya tingkat ketimpangan di Jawa Timur cenderung konstan hingga tahun 2013, kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun 2014. Selanjutnya terjadi peningkatan secara drastis pada tahun 2015, sebagai dampak dari melemahnya perekonomian global. Pada tahun 2016, tingkat ketimpangan berhasil ditekan. Namun, pada tahun 2017 tingkat ketimpangan meningkat lagi. Menekan angka ketimpangan memang menjadi permasalahan

yang tidak mudah untuk di atasi. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan usaha yang ekstra dalam menekan tingkat ketimpangan demi terwujudnya pertumbuhan inklusif.

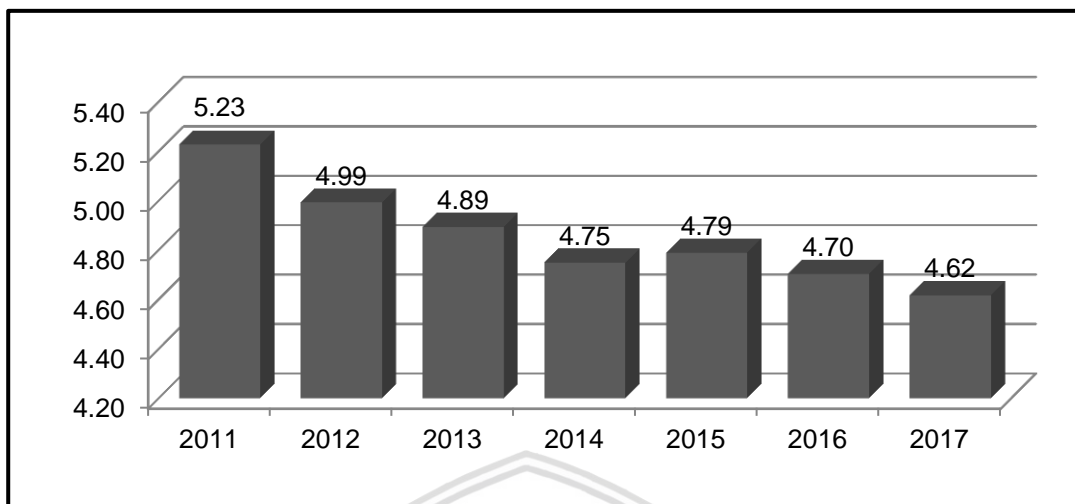
Gambar 4.2: **Perkembangan Tingkat Ketimpangan di Jawa Timur**



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016 (data diolah).

Komponen kedua dari pertumbuhan inklusif yaitu rendahnya tingkat kemiskinan. Gambar 4.3 menunjukkan jumlah penduduk miskin (dalam ribuan jiwa) di Jawa Timur yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi, tingkat kemiskinan di Jawa Timur belum dapat dikatakan rendah. Jika dilihat dari persentase penduduk miskin, sebanyak 11,77% penduduk di Jawa Timur masih termasuk dalam kategori miskin. Penurunan angka kemiskinan senantiasa diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meskipun sudah diupayakan secara optimal, akan tetapi penurunan jumlah penduduk miskin cenderung melambat, bahkan sempat mengalami kenaikan di tahun 2015. Diduga, kenaikan jumlah penduduk miskin di tahun 2015 berkaitan erat dengan naiknya tingkat ketimpangan secara drastis pada tahun tersebut.

Gambar 4.3: Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur dalam Juta Jiwa



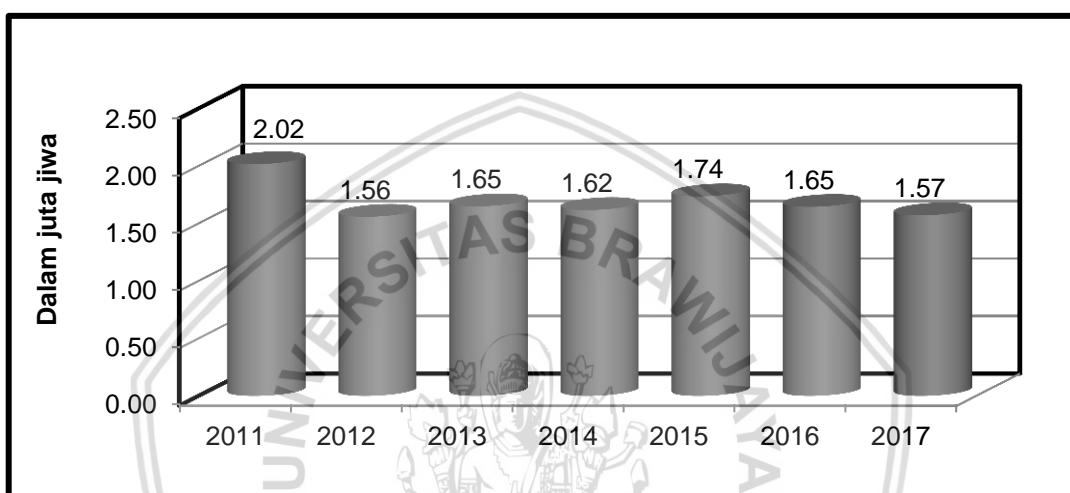
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018a (data diolah).

Komponen pertumbuhan inklusif yang terakhir yaitu rendahnya tingkat pengangguran. Berbeda dengan jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran di Jawa Timur yang dapat dilihat pada gambar 4.4 cenderung fluktuatif. Setelah berhasil menunjukkan angka penurunan di tahun 2012 dan 2013, ternyata pada tahun 2014 mengalami peningkatan, bahkan meningkat secara drastis terjadi pada tahun 2015. Kondisi tersebut sejalan dengan ketimpangan dan kemiskinan yang pada tahun 2015 memang meningkat cukup signifikan. Memang, antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran memiliki keterkaitan dalam perekonomian. Jika salah satunya terguncang, maka akan memberikan dampak bagi yang lainnya.

Jika dilihat dari jumlahnya, pengangguran di Jawa Timur terbilang cukup rendah, yakni hanya sebesar 4% dari seluruh penduduk yang ada. Akan tetapi data pengangguran yang disajikan disini adalah data pengangguran terbuka, yaitu masyarakat yang benar-benar menganggur dan tidak memiliki penghasilan apapun. Permasalahan disini adalah pengangguran terdiri dari beberapa kategori. Seseorang yang bekerja kurang dari 8 jam sehari, juga termasuk dalam kondisi menganggur atau sering disebut dengan setengah menganggur.

Seseorang yang berada dalam kondisi tersebut, tidak mampu mendapatkan penghasilan sebanyak orang yang bekerja secara penuh. Kondisi inilah yang menyebabkan, banyak masyarakat yang terjerembab dalam kemiskinan. Jumlah pengangguran di Jawa Timur akan menjadi semakin banyak apabila kondisi setengah menganggur ini turut diperhitungkan.

Gambar 4.4: Jumlah Pengangguran di Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017f (data diolah).

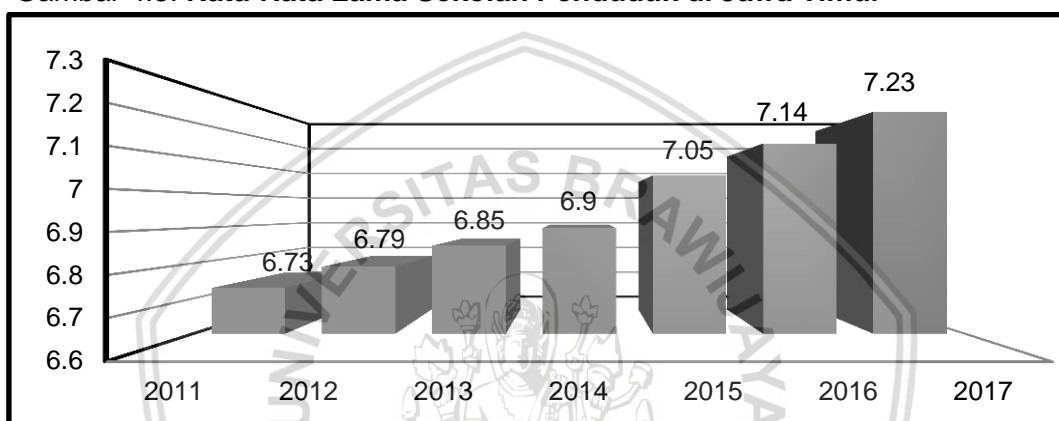
4.1.3 Perkembangan *Human Capital* di Jawa Timur

Human capital atau modal manusia merupakan komponen penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Todaro dan Smith, 2011). *Human capital* menunjukkan kualitas dari sumber daya manusia yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan juga kesehatan. Ada berbagai macam indikator yang dapat menggambarkan kualitas pendidikan masyarakat, salah satunya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama waktu yang digunakan seseorang dalam menempuh pendidikan. Tentunya semakin tinggi RLS maka semakin tinggi pula kualitas pendidikannya.

Rata-rata lama sekolah penduduk di Jawa Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tentu saja hal tersebut didukung oleh upaya

pemerintah melalui regulasi dan juga penyediaan anggaran. Serta didukung oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Pendidikan memang merupakan investasi masa depan, yang sangat berguna bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Anggapan mengenai semakin tinggi pendidikan, maka semakin sejahtera kehidupannya di masa mendatang sudah menjadi pemikiran yang mengakar di masyarakat.

Gambar 4.5: Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk di Jawa Timur



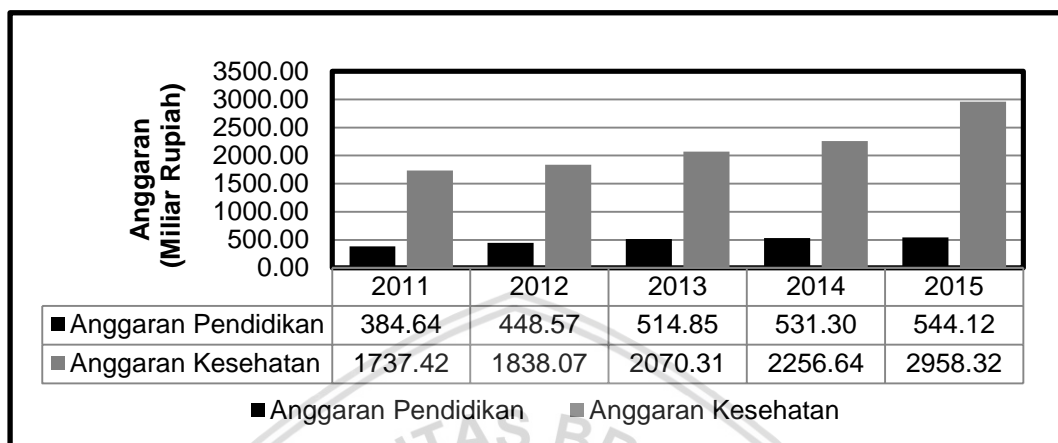
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2018b (data diolah).

4.1.4 Perkembangan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Jawa Timur

Salah satu peranan penting pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah dengan mengalokasikan anggaran, yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), secara efektif dan efisien. Menurut fungsinya, APBD memiliki sembilan tujuan, dua diantaranya yaitu anggaran pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu kunci untuk menentukan tinggi rendahnya kualitas *human capital* masyarakat. Oleh karena itu, agar kualitas *human capital* masyarakat meningkat maka dibutuhkan anggaran yang efektif dan efisien. Gambar 4.6 menunjukkan bahwa anggaran pendidikan maupun kesehatan sama-sama memiliki tren yang meningkat, meskipun anggaran pendidikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran kesehatan. Begitu pula dengan peningkatannya, peningkatan

anggaran pendidikan lebih sedikit jika dibandingkan dengan anggaran kesehatan.

Gambar 4.6: Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Jawa Timur



Sumber: Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK), 2016 (data diolah).

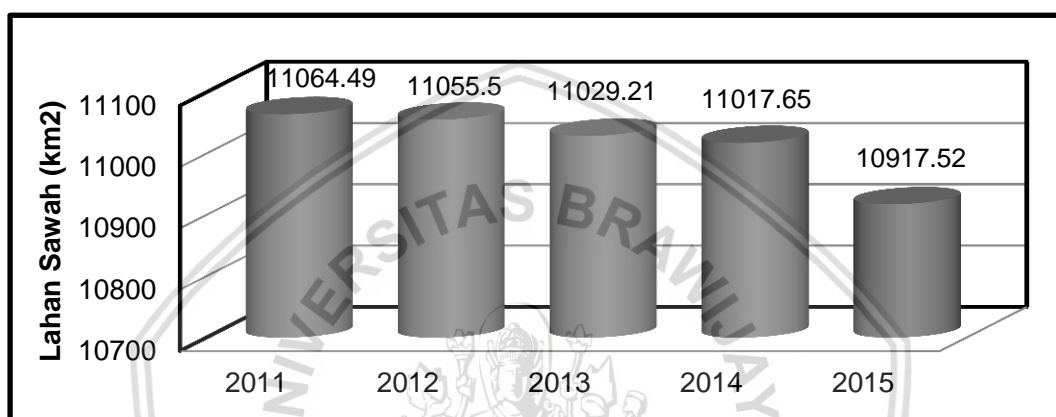
Anggaran pendidikan di Jawa Timur tergolong sangat rendah, pada tahun 2015 saja hanya sebesar 2,3%. Angka tersebut masih sangat jauh dibandingkan dengan amanat UUD 1945 yang mewajibkan alokasi pendidikan sebesar 20%. Sementara itu, alokasi untuk kesehatan jauh lebih besar daripada kesehatan yaitu sebesar 12,5%. Besarnya alokasi kesehatan dibandingkan dengan pendidikan dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 9 program prioritas yang harus segera terlaksana, seperti menurunkan angka kematian ibu dan bayi, penurunan pasien HIV/AIDS, *tuberculosis* (TB), kusta, hipertensi, diabetes, dan kanker, program penurunan balita *stunting* (pendek), dan optimalisasi jaminan kesehatan nasional.

4.1.5 Kondisi Lahan Produktif di Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah. Salah satu contoh sumber daya alam yang dimiliki Jawa Timur adalah tanah. Tidak semua tanah dapat dijadikan lahan produktif, lahan

produktif sendiri memiliki arti yaitu lahan yang subur sehingga dapat ditanami tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai jual. Salah satu contoh lahan produktif adalah sawah. Gambar 4.7 menunjukkan luas lahan sawah yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa luas lahan sawah di Jawa Timur semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan secara drastis terjadi pada tahun 2015.

Gambar 4.7: **Luas Lahan Produktif di Jawa Timur**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 (data diolah).

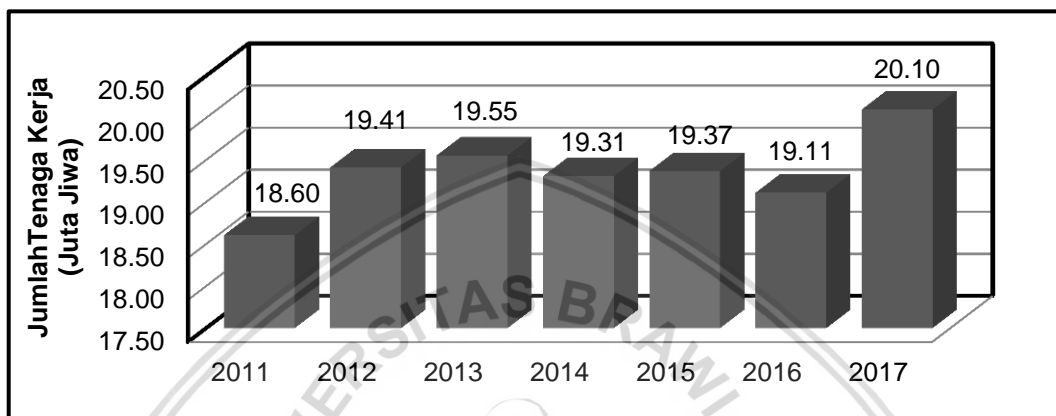
Menurunnya luas lahan sawah tersebut dikarenakan adanya relokasi lahan dari sawah menjadi perumahan, lokasi industri, pembangunan jalan tol, dll. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya tidak bisa bertambah, jumlah lahan khususnya yang awalnya digunakan untuk pertanian akan semakin menyempit. Hal tersebut terjadi dikarenakan permintaan masyarakat untuk lahan perumahan semakin meningkat, disamping adanya pergeseran sektor ekonomi masyarakat dari sektor tradisional (pertanian) ke sektor yang lebih modern (industri).

4.1.6 Perkembangan Tenaga Kerja di Jawa Timur

Sebagai salah satu faktor produksi, peran tenaga kerja sangatlah penting. Dalam fungsi produksi sederhana, semakin banyak tenaga kerja maka semakin tinggi output yang dihasilkan. Namun demikian, kuantitas tenaga kerja tidak akan

memberikan dampak yang berarti bagi perekonomian tanpa diimbangi dengan kualitas SDM yang baik. Dalam hal ini, definisi tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang sudah bekerja. Sehingga, anak-anak di bawah umur yang sudah bekerja tidak termasuk dalam perhitungan.

Gambar 4.8: **Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Timur**



Sumber: Jawa Timur, 2017b (data diolah).

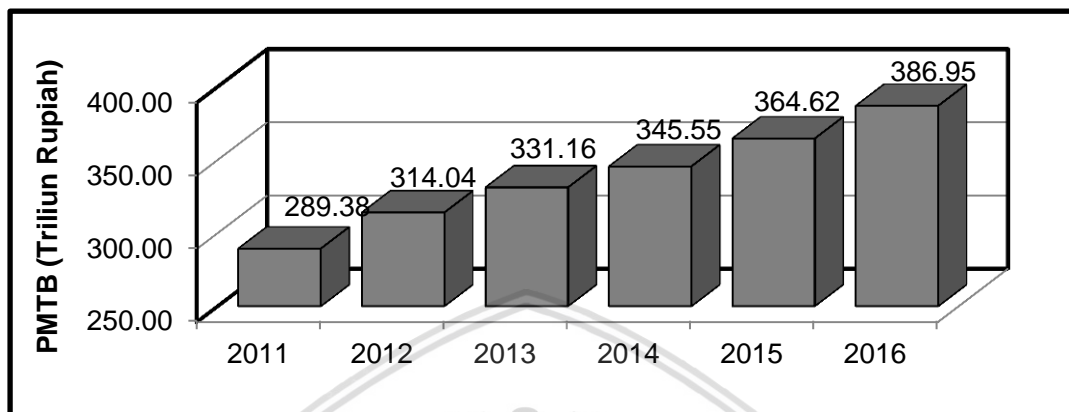
Gambar 4.8 menunjukkan perkembangan tenaga kerja Jawa Timur yang cenderung fluktuatif. Akan tetapi pada tahun 2017, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Adanya peningkatan jumlah tenaga kerja, berarti terdapat penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah melalui program-programnya. Salah satu program pemerintah Jawa Timur dalam menekan angka pengangguran adalah memberikan pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

4.1.7 Perkembangan Investasi di Jawa Timur

Selain tenaga kerja, faktor produksi yang tidak kalah pentingnya adalah investasi. Data investasi yang digunakan disini adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan pengeluaran untuk barang modal yang memiliki usia pemakaian yang tidak lebih dari satu tahun dan bukan merupakan

barang konsumsi. PMTB berkaitan erat dengan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi.

Gambar 4.9: **Perkembangan Investasi di Jawa Timur**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2017c (data diolah).

Gambar 4.9 menunjukkan perkembangan PMTB Jawa Timur yang memiliki tren positif. Tren investasi yang positif ini sebagai dampak positif dari adanya perbaikan infrastruktur, iklim investasi, dan regulasi melalui program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. PMTB juga menjadi kontributor terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (BPS Jatim, 2016). Besarnya kontribusi tersebut, menunjukkan bahwa peranan dari investasi sangatlah penting, sehingga perlu ditingkatkan.

4.2 Hasil Penelitian

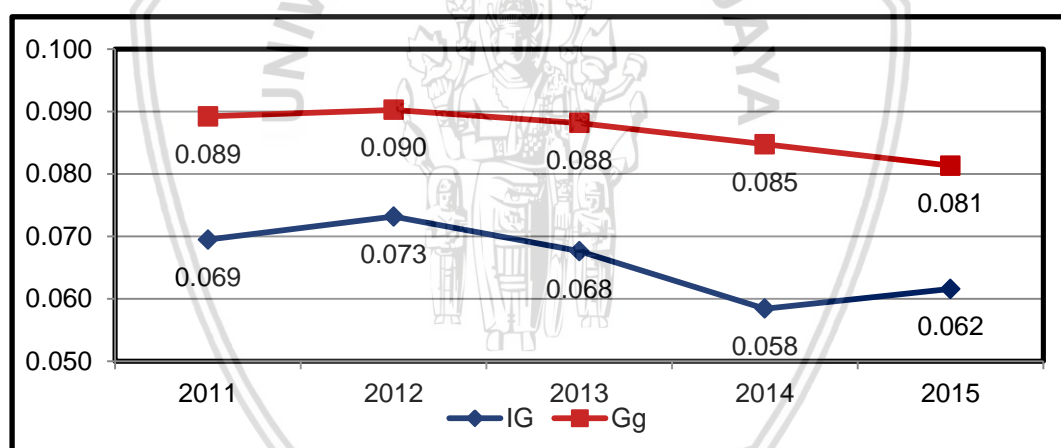
Pada bab sebelumnya telah dibahas definisi mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif, yang diartikan sebagai pertumbuhan yang diikuti dengan pengurangan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Analisis inklusivitas pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, yaitu penghitungan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif yang dilakukan dengan menggunakan metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR). *Kedua*, yaitu

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif, yang dilakukan dengan menggunakan model regresi 3sls.

4.2.1 Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinyatakan inklusif, apabila indeks pertumbuhan inklusifnya lebih besar atau sama dengan pertumbuhan ekonominya. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 hingga 2015, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih belum inklusif. Gambar 4.10 menunjukkan rata-rata indeks pertumbuhan inklusif di Jawa Timur, yang ternyata masih berada di bawah rata-rata pertumbuhannya.

Gambar 4.10: Rata-rata Indeks Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur



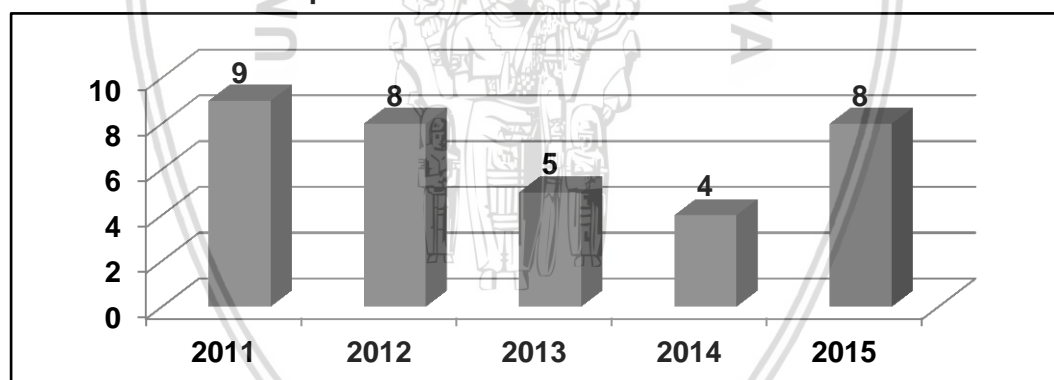
Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2018.

Berdasarkan gambar 4.10, diperoleh informasi bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memiliki tren yang menurun. Sempat meningkat di tahun 2012, kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2014. Pada tahun 2015, indeks pertumbuhan inklusif mengalami peningkatan, meskipun pada saat yang sama pertumbuhan ekonominya sedang mengalami penurunan. Belum inklusifnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur secara rata-rata disebabkan oleh masih sedikitnya kabupaten/kota di Jawa Timur yang

berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Jika dilihat secara keseluruhan, dari 190 observasi yang dilakukan (38 kabupaten/kota dalam 5 tahun), hanya sekitar 21,8% atau 34 observasi saja yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Sedangkan sisanya, sebanyak 78,2% atau 156 observasi masih belum inklusif.

Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif dari tahun ke tahun, jumlah tersebut cenderung menurun. Gambar 4.11 menginformasikan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2014, jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif selalu mengalami penurunan. Akan tetapi di tahun 2015, jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif mengalami peningkatan. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak pada periode awal penelitian.

Gambar 4.11: Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang Berhasil Mencapai Pertumbuhan Inklusif



Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2018.

Pada tahun 2011, daerah yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif antara lain Kabupaten Sampang, Sumenep, dan Trenggalek, kemudian ada Kota Batu, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Pada tahun 2012 yaitu Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Lumajang, Stibondo, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo. Selanjutnya, tahun 2013 yaitu Kabupaten Bangkalan, Bojonegoro, Nganjuk, Ngawi, dan Kota Madiun. Pada tahun 2014 yaitu Kabupaten Bondowoso,

Pacitan, Sampang, dan Kota Kediri. Terakhir, di tahun 2015 yaitu Kabupaten Bangkalan, Jombang, Magetan, Pacitan, Situbondo, Kota Blitar, Kota Madiun dan Kota Mojokerto. Secara lebih detail hasil indeks pertumbuhan inklusif dapat dilihat pada lampiran.

4.2.2 Hasil Statistik

Sebelum melakukan estimasi persamaan simultan, terdapat dua uji yang harus dilakukan, yaitu: (i) uji pemilihan model, dan (ii) uji identifikasi model. Uji pemilihan model dilakukan untuk mengetahui model terbaik apa yang terpilih dalam penelitian ini. Uji pemilihan model dalam data panel terdiri dari 3 macam, uji chow, uji hausman, dan uji LM.

Uji pemilihan model yang pertama adalah uji chow, yang digunakan untuk memilih antara *common effect* atau *fixed effect*. Uji chow dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi stata14, yang dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari hasil uji chow yang sudah dilakukan, baik persamaan pendapatan per kapita maupun persamaan pertumbuhan inklusif keduanya memiliki nilai probabilitas $f < \alpha$ (0,05). Artinya, model terbaik dari persamaan pendapatan per kapita dan persamaan pertumbuhan inklusif adalah *fixed effect*.

Tabel 4.1: Hasil Uji Chow

Persamaan	Prob F	Model yang Terbaik
Pendapatan Per Kapita	0,0000	<i>Fixed effect</i>
Pertumbuhan Inklusif	0,0230	<i>Fixed effect</i>

Sumber: Data diolah oleh Penulis menggunakan Stata14 (2018).

Uji pemilihan model yang kedua adalah uji hausman. Uji hausman dilakukan untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect*. Hasil uji chow dapat dilihat pada tabel 4.2. Dari hasil uji hausman yang telah dilakukan, baik persamaan pendapatan per kapita, maupun persamaan pertumbuhan inklusif keduanya

memiliki nilai probabilitas $\chi^2 < \alpha$ (0,05). Artinya, model terbaik dari persamaan satu dan dua adalah *fixed effect*. Karena dari kedua uji yang terpilih adalah *fixed effect*, maka uji LM tidak perlu dilakukan.

Tabel 4.2: Hasil Uji Hausman

Persamaan	Prob χ^2	Model yang Terbaik
Pendapatan Per Kapita	0,003	<i>Fixed effect</i>
Pertumbuhan Inklusif	0,0536	<i>Fixed effect</i>

Sumber: Data diolah oleh Penulis menggunakan Stata14 (2018).

Dalam model *fixed effect*, diasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep antar individu (*cross-section*), yang dilakukan dengan menggunakan teknik variabel *dummy*. Oleh sebab itu, model *fixed effect* juga dikenal sebagai *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Pemilihan model ini dilakukan dengan mempertimbangkan statistik F dengan cara membandingkan antara nilai jumlah kuadrat dari *error* dari proses pendugaan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan efek tetap yang telah memasukkan variabel boneka (Gujarati dan Porter, 2009). Namun dalam penelitian ini, penggunaan teknik variabel *dummy* tidak dilakukan karena terdapat pertimbangan statistik. Mengingat jumlah *cross section* dalam penelitian ini cukup banyak, penambahan variabel *dummy* yang terlalu banyak dapat mengurangi *degree of freedom*. *Degree of freedom* yang berkurang dapat mengurangi keefisienan dari parameter yang di estimasi (Gujarati dan Porter, 2009).

Mengingat yang terpilih adalah model *fixed effect*, maka penelitian ini dapat menggunakan persamaan simultan *Least Square* (LS) dengan menggunakan metode ILS, 2SLS, atau 3SLS. Namun demikian, sebelumnya perlu dilakukan pengujian identifikasi model, baik pada pendapatan per kapita (GDP_KAP) maupun pertumbuhan inklusif (IG).

Dalam indentifikasi model dikenal dengan istilah variabel *predetermined* yaitu variabel yang nilainya sudah ditentukan. Variabel *predetermined* terdiri dari variabel eksogen dan variabel lag endogen (variabel endogen beda kala). Akan tetapi dalam model penelitian ini, yang termasuk variabel *predetermined* hanya variabel eksogen saja tanpa variabel lag endogen. Variabel *predetermined* dalam penelitian ini sebanyak 6 variabel yaitu LP (lahan produktif), TK (tenaga kerja), dan INVEST (investasi), SPE_EDU (anggaran pendidikan), SPE_HLT (anggaran kesehatan), dan RLS (rata-rata lama sekolah).

Tabel 4.3: Hasil Uji Identifikasi Model

Nama Persamaan	K	K	M	K-k	Tanda	m-1	Kondisi Identifikasi
Pendapatan Per Kapita	8	3	1	5	>	0	<i>Overidentified</i>
Pertumbuhan Inklusif	8	3	2	5	>	1	<i>Overidentified</i>

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2018).

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, semua persamaan teridentifikasi secara berlebihan (*overidentified*). Mengingat persamaan pertama maupun persamaan kedua memiliki kondisi yang *overidentified*, maka metode 2SLS atau 3SLS dapat dilakukan. Namun, dalam penelitian ini metode 3SLS lebih dipilih karena mampu menghasilkan estimasi yang lebih efisien, yang ditandai dengan standar eror yang lebih kecil.

4.2.2.1 Persamaan Pendapatan per Kapita

Pada persamaan pendapatan per kapita, variabel yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan per kapita (GDP_KAP) yaitu lahan produktif (LP), tenaga kerja (TK), investasi (PMTB). Berikut adalah hasil estimasi dari pendapatan per kapita:

Tabel 4.4: Hasil Estimasi Persamaan Pendapatan per kapita

Variabel	Koefisien	Standard Error	Z	Prob > Z
Constanta	-7,661	0,126	-60,63	0.000*
LP	0,031	0,015	2,00	0.045
TK	1,103	0,191	5,76	0.000*
INVEST	0,844	0,025	33,31	0.000*
$R^2 = 0,9166$				

Catatan: *) Sign. 5%.

Sumber: Data diolah oleh Penulis menggunakan STATA, 2018.

Dari hasil estimasi persamaan pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variabel lahan produktif, tenaga kerja dan investasi.
- Nilai konstanta sebesar -7,661, artinya, tanpa pengaruh variabel independen, pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -7,661%.
- Koefisien lahan produktif sebesar 0,031, artinya, setiap peningkatan 1% rasio tenaga kerja terhadap jumlah penduduk, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,031%.
- Koefisien tenaga kerja sebesar 1,103, artinya, setiap peningkatan 1% rasio tenaga kerja terhadap jumlah penduduk, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,103%.
- Koefisien Investasi sebesar 0,844, artinya, setiap peningkatan 1% rasio investasi terhadap jumlah penduduk, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,844%.
- Nilai R^2 sebesar 0,9166, artinya, seluruh variabel bebas dalam penelitian yaitu lahan produktif, tenaga kerja, dan investasi mampu memengaruhi pendapatan per kapita sebesar 91,66%. Sedangkan sisanya sebesar 8,34% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

4.2.2.2 Persamaan Pertumbuhan Inklusif

Pada persamaan pertumbuhan inklusif, variabel yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan inklusif (IG) antara lain pendapatan per kapita (GDP_KAP), anggaran pendidikan (SPE_EDU), anggaran kesehatan (SPE_HLT), dan rata-rata lama sekolah (RLS). Berikut adalah hasil estimasi dari persamaan pertumbuhan ekonomi inklusif:

Tabel 4.5: Hasil Estimasi Persamaan Pertumbuhan Inklusif

Variabel	Koefisien	Standard Error	Z	Prob > Z
Constanta	0,087	0,027	3,22	0,001*
GDP_KAP	0,008	0,003	2,77	0,006*
SPE_EDU	0,005	0,001	3,91	0,000*
SPE_HLT	0,022	0,009	2,33	0,020*
RLS	0,005	0,001	4,36	0,000*
R ² = 0,1654				

Catatan: *) Sign. 5%.

Sumber: Data diolah oleh Penulis menggunakan STATA, 2018.

Dari hasil estimasi persamaan pertumbuhan ekonomi inklusif, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variabel pendapatan per kapita, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan rata-rata lama sekolah.
- Nilai konstanta sebesar 0,087, artinya, tanpa pengaruh variabel independen, indeks pertumbuhan ekonomi inklusif adalah sebesar 0,087.
- Koefisien pendapatan per kapita sebesar 0,008, artinya, setiap peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi perkapita, maka akan meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 0,008.

- d. Koefisien anggaran pendidikan sebesar 0,005, artinya, setiap peningkatan 1% rasio anggaran pendidikan terhadap jumlah penduduk, maka akan meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 0,005.
- e. Koefisien anggaran kesehatan sebesar 0,022, artinya, setiap peningkatan 1% rasio anggaran kesehatan terhadap jumlah penduduk, maka akan meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 0,022.
- f. Koefisien rata-rata lama sekolah sebesar 0,005, artinya, setiap peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat selama 1 tahun, maka akan meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 0,005.
- g. Nilai R^2 sebesar 0,1654, artinya, seluruh variabel bebas dalam penelitian yaitu pendapatan per kapita, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan rata-rata lama sekolah mampu memengaruhi indeks pertumbuhan inklusif sebesar 16,54%. Sedangkan sisanya sebesar 83,46% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Konsep pertumbuhan inklusif dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang ditawarkan oleh Klasen (2010), yang diikuti Domonkos *et al* (2013), Sholihah *et al* (2013), Azwar (2016), dan Cahyadi *et al* (2018). Pertumbuhan inklusif dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga dimensi, yaitu ketimpangan dan kemiskinan yang rendah, serta mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Dalam mengukur

pertumbuhan inklusif, digunakan indeks pertumbuhan inklusif yang menggunakan metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR).

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa secara rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur belum inklusif. Rata-rata indeks pertumbuhan inklusif di Jawa Timur masih berada jauh di bawah pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur belum memperhatikan kualitas secara penuh. Jika melihat nilai indeks rata-rata pertumbuhan inklusif, dari tahun 2011 hingga tahun 2015 semuanya menunjukkan nilai yang positif dan berada di atas nol.

Berdasarkan konsep PEGR, apabila indeks pertumbuhan inklusif bernilai positif, di atas nol, akan tetapi masih berada di bawah pertumbuhan ekonominya ($0 < IG < Gg$). Maka, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dapat dikategorikan menjadi pertumbuhan yang bersifat *not pro poor yet* (Kakwani dan Son, 2008). Dalam hal ini, pertumbuhan yang bersifat *not pro poor yet* bermakna bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang tidak miskin. Akan tetapi, pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran masih terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Cahyadi *et al*, 2018).

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori Gunnar Myrdal mengenai ketimpangan spasial (*spatial inequalities*) yang melekat pada pembangunan ekonomi yang berbasis pasar bebas. Berdasarkan teori Myrdal, pembangunan ekonomi menyebabkan adanya hubungan sebab-menyebab yang sirkuler antara masyarakat kaya dan miskin. Dampak yang dihasilkan dari pembangunan ekonomi ada dua yaitu (*trickle-down effect* dan *backwash effect*).

Pertama, Trickle-down effect terjadi ketika pembangunan ekonomi membuat masyarakat yang kaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kemajuan yang diperoleh masyarakat kaya dengan sendirinya akan turun menetes ke

kelompok masyarakat menengah ke bawah, melalui penciptaan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi lainnya. Dimana selanjutnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang mendukung terciptanya output sehingga hasil-hasil pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata (Todaro dan Smith, 2011).

Kedua, backwash effect yang terjadi ketika perekonomian suatu wilayah mulai tumbuh, maka akan ada penarikan SDA, SDM, dan modal ke wilayah tersebut. Secara otomatis terjadi pengurangan sumber daya pada wilayah lainnya. Pengurangan sumber daya di wilayah lain yang perekonomiannya belum tumbuh inilah yang disebut dengan *backwash effect*. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang ada akan membuat masyarakat yang kaya semakin kaya, dan yang tertinggal semakin sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan munculnya *backwash effect*, yaitu: (i) pola migrasi, (ii) pola aliran modal, dan (iii) transportasi yang lebih baik di wilayah-wilayah yang perekonomiannya sudah maju dibandingkan dengan yang tertinggal.

Dalam kenyataannya, dampak balik (*backwash effects*) cenderung semakin besar, sedangkan dampak tetesan ke bawah (*trickle-down effects*) cenderung mengecil. Aliran kekayaan yang diharapkan dari masyarakat kaya tersebut tidak terjadi secara optimal dan hanya berkonsentrasi atau berputar pada golongan masyarakat kaya saja. Akibatnya, tingkat ketimpangan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini banyak terjadi di daerah-daerah yang merupakan pusat pertumbuhan.

Sementara itu inklusivitas pertumbuhan ekonomi pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan nilai yang berbeda antar daerah. Gambar 4.12 menggambarkan diagram perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur pada tahun 2011. Sesuai dengan metode PEGR, diasumsikan diagram tersebut terbagi

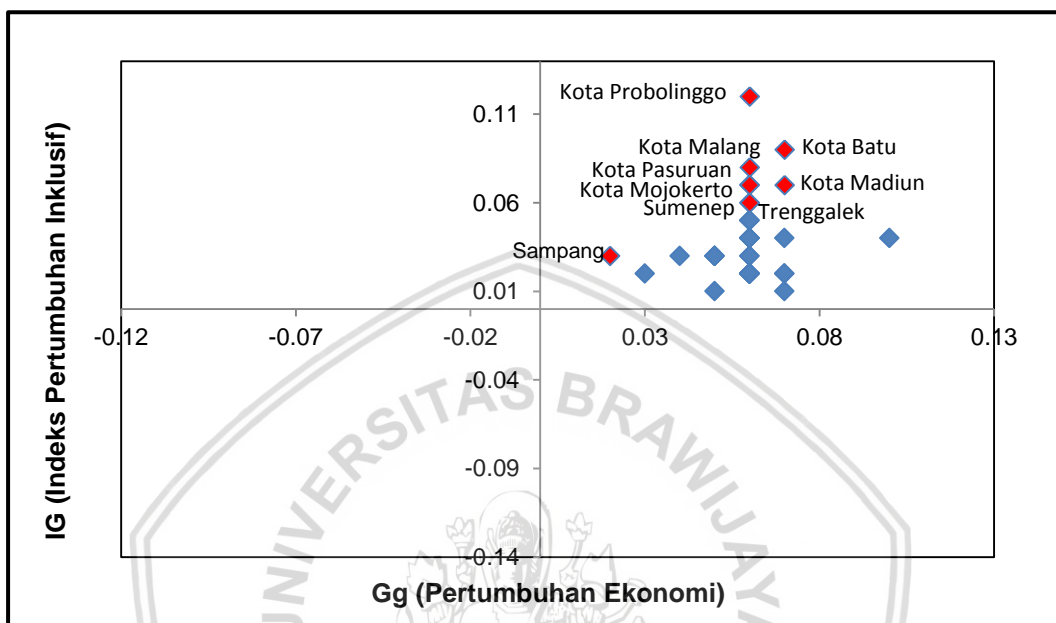
menjadi 4 kuadran. Dimana sisi kanan atas merupakan kuadran I, sisi kiri atas merupakan kuadran II. Selanjutnya, sisi kiri bawah merupakan kuadran III dan sisi kanan bawah merupakan kuadran IV. Dalam gambar tersebut, daerah yang inklusif diberi warna merah, sedangkan daerah yang belum inklusif diberi warna biru.

Pada tahun 2011, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur berada di kuadran I yang menggambarkan penurunan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terdapat tiga kemungkinan yang terjadi pada kuadran I, jika nilai indeks pertumbuhan inklusifnya lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonominya ($IG > Gg$), berarti manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut lebih banyak dinikmati oleh masyarakat miskin (*pro poor growth*). Kemungkinan kedua yaitu apabila nilai indeksnya sama dengan pertumbuhan ekonominya ($IG = Gg$), maka manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dinikmati seluruh masyarakat secara merata (netral). Kemungkinan ketiga, apabila nilai indeksnya lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi ($IG < Gg$). Artinya, manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih banyak diterima oleh masyarakat yang tidak miskin (*not pro poor yet*). Namun, pengurangan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama dan kedua digolongkan sebagai pertumbuhan yang inklusif, sedangkan kemungkinan ketiga masih belum dikatakan inklusif.

Pada gambar 4.12 dapat di lihat bahwa pada tahun 2011 terdapat 9 kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Tiga diantaranya memiliki pertumbuhan yang bersifat netral, sedangkan sisanya memiliki pertumbuhan yang bersifat *pro poor growth*. Kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan bersifat netral antara lain Kabupaten Sumenep, Trenggalek dan Kota Madiun. Kabupaten/kota yang bersifat *pro poor growth* yaitu Kabupaten

Sampang, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo.

Gambar 4.12: **Perbandingan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011**



Catatan: ◆ Inklusif ◆ Belum Inklusif
 Sumber: Data diolah oleh Penulis (2018).

Pada pertumbuhan yang bersifat netral, jumlah penduduk miskin pada masing-masing kabupaten/kota tersebut memang turun. Akan tetapi, tingkat ketimpangan di Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun mengalami peningkatan. Sedangkan di Kabupaten Sumenep tingkat ketimpangannya cenderung tetap di kisaran 0,27. Meningkatnya ketimpangan di Kabupaten Trenggalek dari yang awalnya sebesar 0,29 di Tahun 2010 menjadi 0,34 di tahun 2011. Sedangkan untuk Kota Madiun, tingkat ketimpangan meningkat tipis dari 0,32 menjadi 0,33 di tahun 2011. Peningkatan ketimpangan mengindikasikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang ada, lebih banyak dinikmati masyarakat yang tidak miskin. Sehingga, ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka tingkat ketimpangan akan meningkat. Mengenai jumlah

pengangguran yang dilihat melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), ketiga kabupaten/kota tersebut sama-sama mengalami peningkatan.

Sementara itu, pada pertumbuhan yang bersifat *pro poor growth*, jumlah penduduk miskin pada masing-masing kabupaten/kota tersebut memang mengalami penurunan. Sedangkan indikator kedua yaitu ketimpangan keenam kabupaten/kota tersebut ternyata mengalami peningkatan. Meskipun pertumbuhan yang netral dan *pro poor* sama-sama memiliki ketimpangan yang meningkat, akan tetapi manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang diterima masyarakat miskin lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang tidak miskin. Sedangkan untuk indikator ketiga yaitu pengangguran yang dilihat melalui TPT, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo memiliki TPT yang menurun, sedangkan Kabupaten Sampang, Kota Malang, dan Kota Mojokerto memiliki TPT yang meningkat. Dalam pertumbuhan yang *pro poor*, TPT yang menurun menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada mampu menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat miskin.

Untuk daerah yang belum inklusif, secara umum telah terjadi pengurangan kemiskinan. Pada indikator kedua yaitu ketimpangan secara umum memiliki ketimpangan yang meningkat kecuali Kabupaten Bojonegoro yang ketimpangannya mengalami penurunan dan Kabupaten Situbondo yang ketimpangannya tetap. Sedangkan untuk indikator ketiga yaitu pengangguran, cukup banyak daerah yang TPT-nya menurun, meskipun masih lebih banyak daerah yang TPT-nya meningkat. Terlepas dari itu, yang menyebabkan daerah tersebut belum inklusif disebabkan karena peningkatan ketimpangan dan pengangguran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengurangan kemiskinannya. Sehingga, daerah tersebut belum dapat dikatakan inklusif.

Selanjutnya, gambar 4.13 menunjukkan diagram perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota yang

ada di Jawa Timur pada tahun 2012. Secara umum pada tahun 2012, kabupaten/kota di Jawa Timur berada pada kuadran I, kecuali Kabupaten Bangkalan yang berada pada kuadran II. Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, kuadran I menggambarkan adanya penurunan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, kuadran II menggambarkan adanya resesi karena pertumbuhan ekonominya negatif.

Pada tahun 2012, terdapat 8 kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Dari 8 kabupaten/kota tersebut 6 diantaranya memiliki pertumbuhan yang bersifat netral yaitu Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Lumajang, Situbondo dan Kota Probolinggo. Sedangkan sisanya memiliki pertumbuhan yang bersifat *pro poor growth* yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kota Mojokerto. Pada pertumbuhan yang bersifat netral, jumlah penduduk miskin pada masing-masing kabupaten/kota tersebut mengalami penurunan. Untuk tingkat ketimpangan, Kabupaten Blitar, Bojonegoro, dan Situbondo mengalami peningkatan. Sedangkan di Kabupaten Lumajang tingkat ketimpangannya cenderung tetap. Untuk Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo, tingkat ketimpangannya cenderung menurun. Peningkatan ketimpangan mengindikasikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang ada lebih banyak dinikmati masyarakat yang tidak miskin. Sehingga, ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka tingkat ketimpangan akan meningkat. Mengenai TPT, dari 6 kabupaten/kota tersebut hanya Kabupaten Lumajang saja yang TPT nya mengalami peningkatan, sedangkan TPT yang lainnya mengalami penurunan.

Pada pertumbuhan yang bersifat *pro poor*, jumlah penduduk miskin pada masing-masing kabupaten/kota tersebut mengalami penurunan. Sementara indikator kedua yaitu ketimpangan, baik Kabupaten Bangkalan maupun Kota

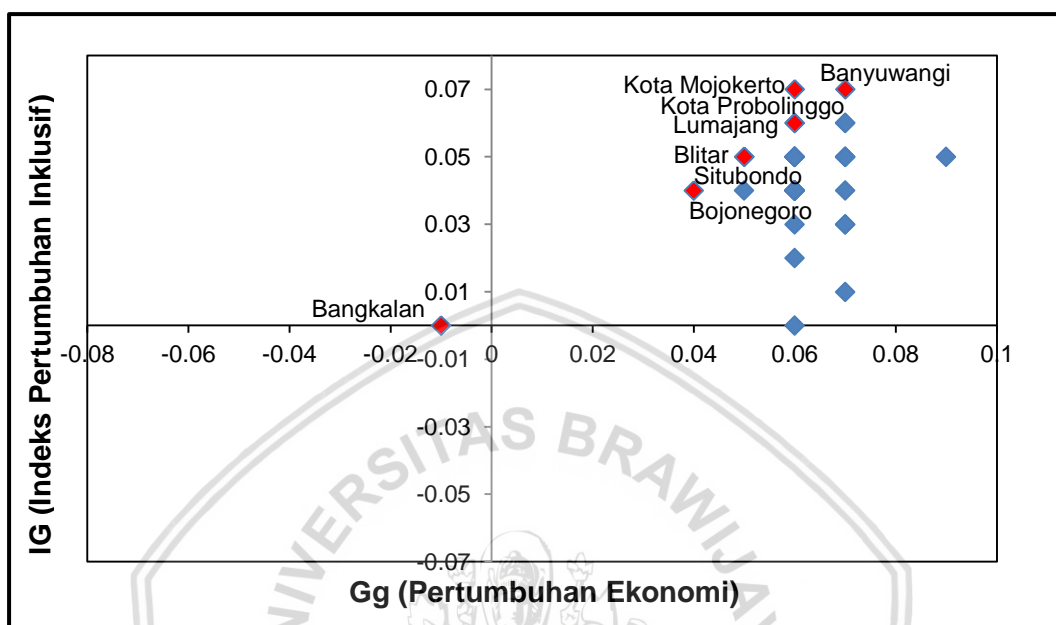
Mojokerto ternyata mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih banyak diterima oleh masyarakat yang miskin. Sehingga, ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan direspon oleh penurunan ketimpangan. Sedangkan pada indikator ketiga yaitu pengangguran yang dilihat melalui TPT, Kabupaten Bangkalan dan Kota Mojokerto memiliki TPT yang menurun.

Temuan menarik pada tahun 2012 adalah Kabupaten Bangkalan yang memiliki pertumbuhan ekonomi negatif namun nilai indeks pertumbuhan ekonominya lebih besar. Artinya, dampak kerugian akibat resesi yang ditimbulkan lebih banyak diterima oleh masyarakat non-miskin daripada masyarakat miskin. Hal tersebut ditunjukkan oleh penurunan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan di tahun 2012 dari yang awalnya 239,5 ribu jiwa di tahun 2011, menurun menjadi 229,8 ribu jiwa di tahun 2012. Selain kemiskinan, tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh indeks gini juga menurun dari yang awalnya 0,3 menjadi 0,28 di tahun 2012. Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangkalan juga mengalami penurunan dari 6,37% menjadi 5,13% di tahun 2012.

Pada daerah yang belum inklusif, secara umum telah terjadi pengurangan kemiskinan. Namun, untuk indikator kedua yaitu ketimpangan secara umum kabupaten/kota yang belum inklusif tingkat ketimpangannya meningkat kecuali Kabupaten Jember, Jombang, Malang, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Trenggalek, dan Tuban yang ketimpangannya mengalami penurunan. Selanjutnya Kabupaten Ngawi, Kota Batu, Kota Kediri, dan Kota Pasuruan yang ketimpangannya tetap. Sedangkan pada indikator ketiga yaitu pengangguran, cukup banyak daerah yang TPT-nya menurun, meskipun masih lebih banyak daerah yang TPT-nya meningkat. Terlepas dari itu, penyebab daerah tersebut belum inklusif adalah peningkatan ketimpangan dan pengangguran yang jauh

lebih besar dibandingkan dengan pengurangan kemiskinannya. Sehingga, daerah tersebut belum dapat dikatakan inklusif.

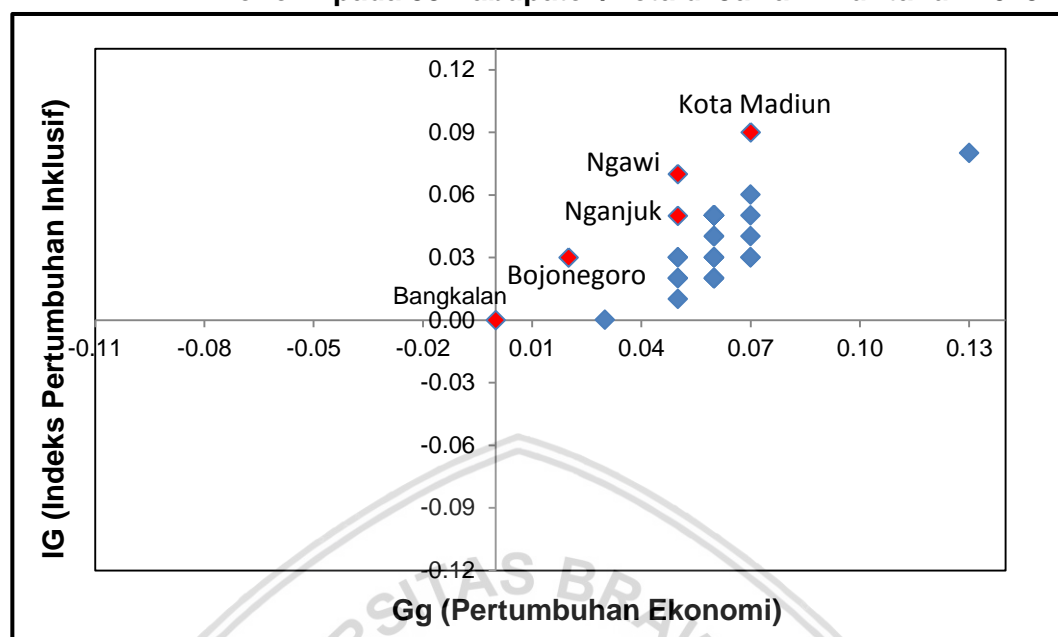
Gambar 4.13: **Perbandingan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012**



Catatan: ◆ Inklusif ◆ Belum Inklusif
Sumber: Data diolah oleh Penulis (2018).

Selanjutnya, gambar 4.14 menunjukkan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur pada tahun 2013. Pada tahun 2013, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur berada di kuadran I yang menggambarkan penurunan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun ini terjadi penurunan jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif, yaitu menjadi hanya 5 kabupaten/kota saja. Dua diantaranya memiliki pertumbuhan yang bersifat netral, sedangkan sisanya yaitu 3 kabupaten/kota memiliki pertumbuhan yang bersifat *pro poor growth*. Kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan bersifat netral yaitu Kabupaten Bangkalan dan Nganjuk. Sedangkan, Kabupaten/kota yang bersifat *pro poor growth* yaitu Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, dan Kota Madiun.

Gambar 4.14: **Perbandingan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2013**



Catatan: ◆ Inklusif ◆ Belum Inklusif

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2018).

Pada pertumbuhan yang bersifat netral, jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan, sedangkan Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan. Sementara itu, tingkat ketimpangan di Kabupaten Bangkalan adalah tetap, sedangkan di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan. Ketika ketimpangan menurun sedangkan kemiskinan meningkat, hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat masyarakat yang semula tergolong masyarakat menengah berubah menjadi masyarakat miskin. Peningkatan kemiskinan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Nganjuk pada tahun tersebut.

Kedua, mengenai pertumbuhan yang bersifat *pro poor growth*. Pada pertumbuhan yang bersifat *pro poor growth*, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, dan Kota Madiun mengalami penurunan. Pada indikator kedua yaitu ketimpangan ketiga kabupaten/kota tersebut ternyata semuanya mengalami peningkatan. Meskipun ketimpangannya meningkat, manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang diterima masyarakat miskin lebih

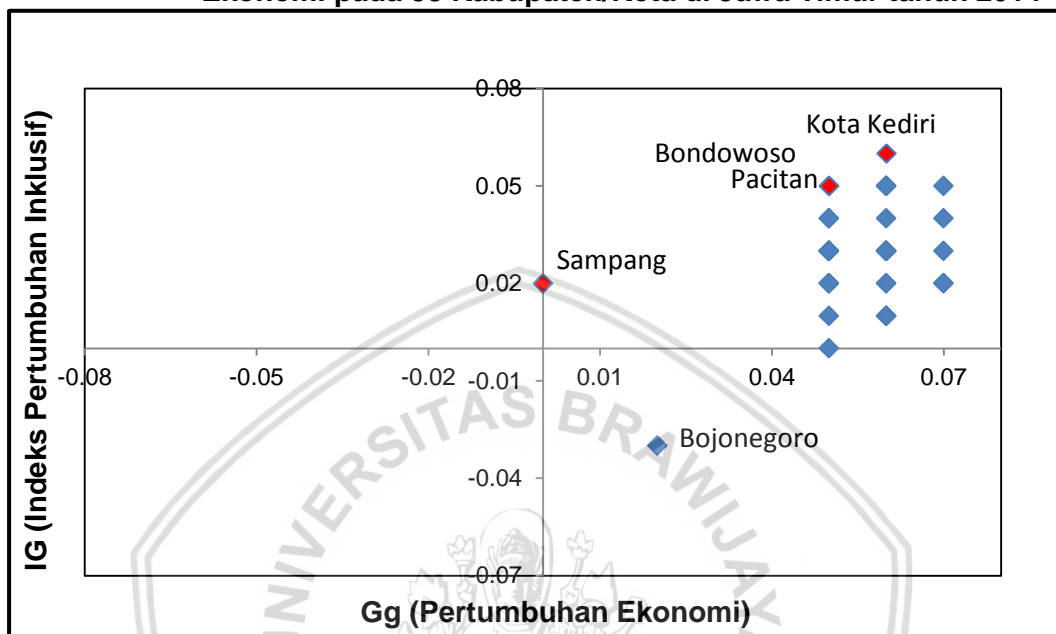
banyak dibandingkan dengan masyarakat yang tidak miskin. Sementara indikator ketiga yaitu pengangguran, terlihat bahwa Kabupaten Bojonegoro dan Ngawi memiliki TPT yang meningkat. Sedangkan Kota Madiun memiliki TPT yang menurun.

Pada daerah yang belum inklusif, secara umum telah terjadi pengurangan kemiskinan. Namun, adapula daerah yang mengalami peningkatan kemiskinan yaitu Kabupaten Magetan, Malang, Mojokerto, Ponorogo, Sidoarjo, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Mojokerto. Pada indikator kedua yaitu ketimpangan secara umum memiliki ketimpangan yang menurun. Akan tetapi terdapat pula daerah yang tingkat ketimpangannya meningkat, dan adapula yang tingkat ketimpangannya tetap meskipun hanya sedikit. Sedangkan indikator pengangguran, daerah yang TPT-nya menurun lebih banyak daripada daerah yang TPT-nya meningkat. Terlepas dari itu, daerah tersebut belum dapat dikatakan inklusif sebab terjadi peningkatan ketimpangan dan pengangguran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengurangan kemiskinannya.

Selanjutnya, gambar 4.15 menunjukkan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur pada tahun 2014. Secara umum pada tahun ini, kabupaten/kota di Jawa Timur berada pada kuadran I, kecuali Kabupaten Bojonegoro yang berada pada kuadran IV. Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, kuadran I menggambarkan adanya penurunan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Kuadran IV menggambarkan kondisi pertumbuhan yang *anti poor* karena nilai indeks pertumbuhan inklusifnya negatif dan lebih kecil dari pertumbuhan ekonominya ($IG < 0 < Gg$). Pertumbuhan yang *anti poor* artinya manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih banyak diterima oleh masyarakat yang tidak miskin.

Pertumbuhan yang ada justru malah memperparah kondisi ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran.

Gambar 4.15: Perbandingan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2014



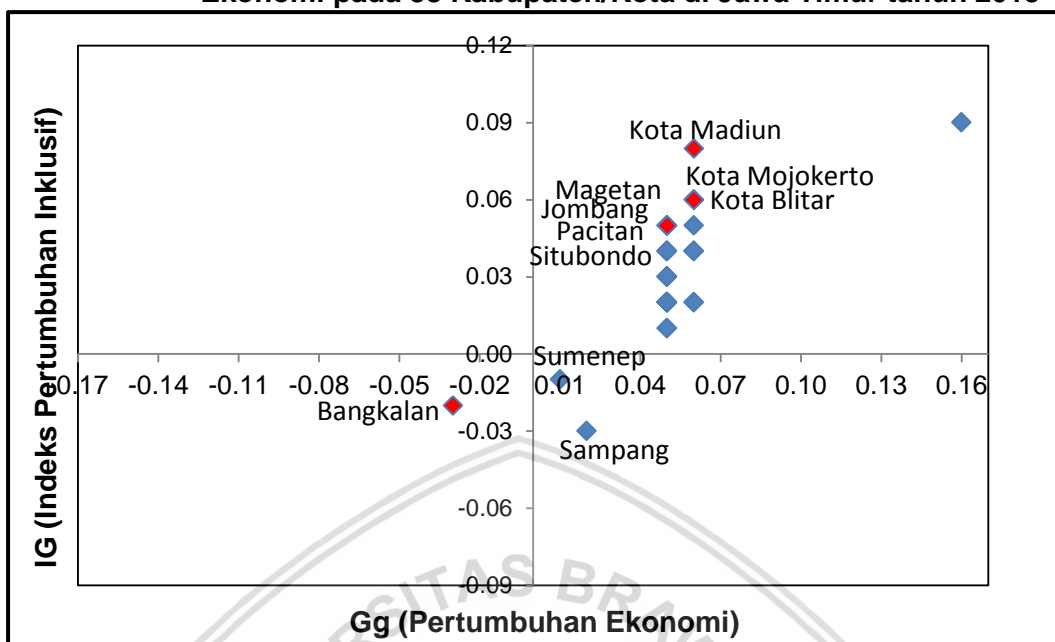
Catatan: ◆ Inklusif ◆ Belum Inklusif
Sumber: Data diolah oleh Penulis (2018).

Pada tahun 2014, jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif kembali menurun menjadi hanya 4 kabupaten/kota saja. Tiga diantaranya yaitu Kabupaten Bondowoso, Pacitan, dan Kota Kediri memiliki pertumbuhan yang bersifat netral. Pada daerah yang pertumbuhannya bersifat netral, terjadi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Sedangkan untuk penganggurannya, Kabupaten Bondowoso dan Pacitan memiliki TPT yang meningkat. Sedangkan Kota Kediri memiliki TPT yang menurun. Pada daerah yang pertumbuhannya bersifat *pro poor*, yaitu Kabupaten Sampang terjadi penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan juga pengangguran. Dengan penurunan ketiga indikator tersebut sudah sepantasnya apabila Kabupaten Sampang telah berhasil mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Pada daerah yang belum inklusif, secara umum telah terjadi pengurangan kemiskinan. Pada indikator kedua yaitu ketimpangan secara umum memiliki ketimpangan yang menurun. Akan tetapi terdapat pula daerah yang tingkat ketimpangannya meningkat, dan adapula yang tingkat ketimpangannya tetap meskipun hanya sedikit. Untuk indikator pengangguran, daerah yang TPT-nya menurun lebih banyak daripada daerah yang TPT-nya meningkat. Terlepas dari itu, peningkatan ketimpangan dan pengangguran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengurangan kemiskinannya, menyebabkan daerah tersebut belum dapat dikatakan inklusif.

Selanjutnya, gambar 4.16 menunjukkan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur pada tahun 2015. Secara umum pada tahun ini, kabupaten/kota di Jawa Timur berada pada kuadran I, kecuali Kabupaten Bangkalan yang berada pada kuadran III dan Kabupaten Sampang dan Sumenep yang berada pada kuadran IV. Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, kuadran I menggambarkan adanya penurunan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kuadran III menggambarkan adanya resesi karena pertumbuhan ekonominya negatif. Selain itu, kuadran III menunjukkan nilai indeks inklusif yang negatif ($IG < 0$), artinya dampak dari adanya resesi tersebut diterima lebih banyak oleh masyarakat miskin. Sedangkan, kuadran IV menggambarkan kondisi pertumbuhan yang *anti poor* karena nilai indeks pertumbuhan inklusifnya negatif dan lebih kecil dari pertumbuhan ekonominya ($IG < 0 < Gg$). Pertumbuhan yang *anti poor* artinya manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih banyak diterima oleh masyarakat yang tidak miskin. Pertumbuhan yang ada justru semakin memperburuk kondisi ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran.

Gambar 4.16: **Perbandingan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015**



Catatan: ◆ Inklusif ◆ Belum Inklusif

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2018).

Pada tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Pada tahun ini, terdapat 8 kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Hal tersebut menunjukkan terjadinya perbaikan pencapaian kabupaten/kota di Jawa Timur yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Dari 8 kabupaten/kota tersebut, 5 diantaranya yaitu Kabupaten Jombang, Magetan, Pacitan, Situbondo dan Kota Blitar memiliki pertumbuhan yang bersifat netral. Sedangkan Kabupaten Bangkalan dan Kota Madiun memiliki pertumbuhan yang bersifat *pro poor growth*.

Terdapat temuan menarik dalam penelitian ini yaitu, masuknya Kabupaten Bangkalan dalam kuadran III. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kuadran III menggambarkan adanya resesi dan indeks pertumbuhan inklusif yang negatif. Indeks yang negatif menggambarkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi malah meningkatkan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Namun pada kasus ini, Kabupaten Bangkalan memiliki nilai indeks pertumbuhan inklusif yang lebih besar daripada pertumbuhannya. Artinya, resesi yang

ada memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang tidak miskin daripada masyarakat yang miskin. Resesi menyebabkan masyarakat yang semula tidak miskin menjadi miskin. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan. Ketika masyarakat yang semula tidak miskin menjadi miskin, hal tersebut tentunya akan menurunkan ketimpangan yang ada. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Bangkalan.

4.3.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif terbagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung dan faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung.

4.3.2.1 Hubungan Langsung antara Anggaran Pendidikan dengan Pertumbuhan Inklusif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap indeks pertumbuhan inklusif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar anggaran pendidikan yang dikeluarkan, maka semakin tinggi indeks pertumbuhan inklusifnya. Semakin tinggi indeks inklusif, maka semakin berkualitas pula pertumbuhan ekonominya yang ditunjukkan oleh tingkat ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran yang semakin menurun.

Hal ini cukup beralasan sebab semakin besar anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka akses pendidikan masyarakat terutama masyarakat miskin akan semakin meningkat. Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin akan membuat keterampilan dan pengetahuan dari masyarakat miskin semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Lebih lanjut, meningkatnya produktivitas tenaga kerja selanjutnya dapat meningkatkan penghasilannya. Ketika penghasilan masyarakat

miskin meningkat, maka dapat membantu masyarakat tersebut untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Sehingga, ketika kemiskinan berkurang maka ketimpangan juga akan berkurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan fungsi pemerintah dalam perekonomian modern. Fungsi pemerintah dalam perekonomian modern dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketika peran pemerintah terbukti dapat mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan juga pengangguran, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjalankan perannya sesuai dengan fungsi distribusi, yang menyatakan bahwa pemerintah berperan dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi secara adil kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan Doumbia (2014). Penelitian yang dilakukan di Republik Slovakia ini membuktikan bahwa terdapat korelasi positif antara peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui *education spending* dengan pertumbuhan inklusif. Jadi, ketika seluruh masyarakat (terutama masyarakat miskin) semakin mudah memperoleh akses pendidikan, maka hal tersebut dapat menjadi investasi modal manusia di masa depan. Semakin tinggi pendidikan dan keterampilan masyarakat, maka ketika sudah bekerja produktivitasnya akan meningkat. Sehingga, permasalahan mengenai pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan dapat teratasi.

4.3.2.2 Hubungan Langsung antara Anggaran Kesehatan dengan Pertumbuhan Inklusif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran kesehatan memiliki pengaruh yang positif terhadap indeks pertumbuhan inklusif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar anggaran kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, maka semakin tinggi indeks pertumbuhan inklusifnya. Semakin tinggi

indeks inklusif, maka semakin berkualitas pula pertumbuhan ekonominya yang ditunjukkan oleh tingkat ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran yang semakin menurun.

Semakin besar anggaran kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, maka akses kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin akan semakin meningkat. Meningkatnya akses kesehatan bagi masyarakat miskin akan membuat masyarakat miskin menjadi lebih sehat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Lebih jauh, meningkatnya produktivitas tenaga kerja selanjutnya dapat meningkatkan penghasilannya. Dengan demikian, ketika penghasilan masyarakat miskin meningkat, maka dapat membantu masyarakat tersebut untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Implikasinya, ketika kemiskinan berkurang maka ketimpangan juga akan berkurang.

Hampir sama dengan pengaruh anggaran pendidikan terhadap pertumbuhan inklusif, pengaruh anggaran kesehatan juga membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjalankan perannya sesuai dengan fungsi distribusi. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Doumbia (2014) dan Tella dan Alimi (2016). *Health spending* yang digunakan untuk memerangi angka kematian ibu dan bayi, penanggulangan HIV/AIDS, *tuberculosis* (TB), gizi buruk dll, nyatanya merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang pro masyarakat miskin. Tak hanya akses pendidikan saja, masyarakat miskin juga membutuhkan akses kesehatan yang lebih mudah. Dengan semakin meratanya akses pendidikan maupun kesehatan dalam masyarakat, maka percepatan pertumbuhan inklusif dapat terwujud.

4.3.2.3 Hubungan Langsung antara Lama Sekolah dengan Pertumbuhan Inklusif

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah direspon oleh peningkatan indeks pertumbuhan inklusif. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya waktu yang mereka gunakan untuk mengakses pendidikan maka, semakin meningkat pula kualitas *human capital*-nya. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori *human capital* yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi kualitas sumber daya manusianya. Lebih lanjut, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka akan semakin besar kesempatannya untuk memperoleh akses terhadap ekonomi.

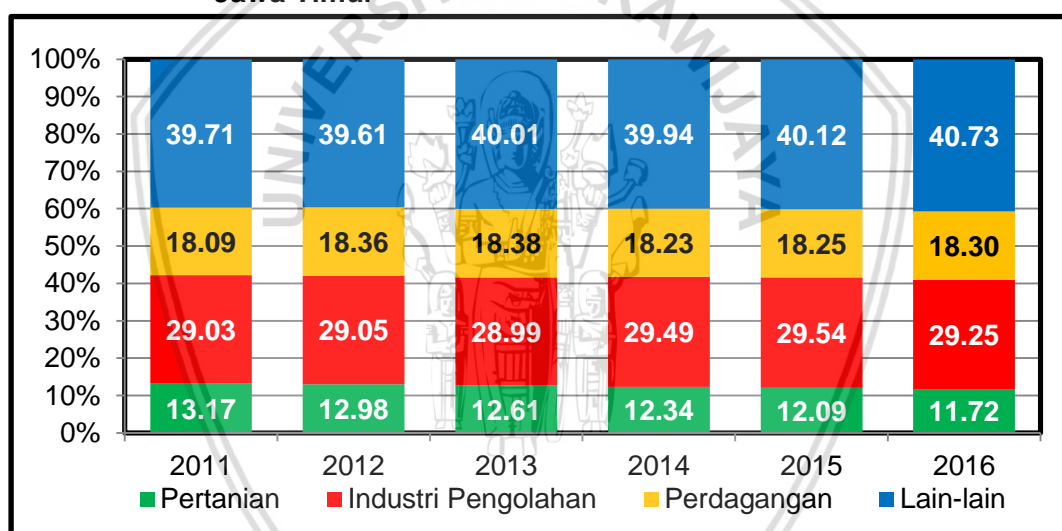
Besarnya kesempatan untuk memperoleh akses terhadap ekonomi dikarenakan tingginya produktivitas tenaga kerja yang dimiliki, sebagai cerminan dari tingginya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Temuan ini diperkuat oleh argumen dari penelitian-penelitian sebelumnya oleh Sholihah *et al* (2013), Azwar (2016), dan Cahyadi *et al* (2018). Ketiga peneliti tersebut juga menghasilkan temuan bahwa aspek pendidikan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif.

4.3.2.4 Hubungan Langsung antara Pendapatan Per Kapita dengan Pertumbuhan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita cenderung direspon dengan peningkatan indeks pertumbuhan inklusif. Semakin tinggi indeks pertumbuhan inklusif, maka semakin tinggi pula kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Hal tersebut sejalan dengan hipotesis Kuznets, yang menggambarkan hubungan antara pendapatan per kapita dengan pemerataan distribusi pendapatan (Todaro dan Smith, 2011).

Menurut Hipotesis Kuznets, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk. Akan tetapi, pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktural dalam perekonomian suatu negara, dari perekonomian tradisional menuju ke perekonomian modern. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprianik (2012), Nurhuda *et al* (2013), dan Khusnah (2015). Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan suatu temuan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan per kapita dengan distribusi pendapatan di Jawa Timur dan menunjukkan adanya kurva U terbalik.

Gambar 4.17: **Kontribusi Sektor PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Jawa Timur**



Sumber: BPS Jawa Timur, 2017d (data diolah).

Gambar 4.17 menunjukkan bahwa pada saat ini, Provinsi Jawa Timur sedang mengalami pergeseran sektor, dari yang awalnya sektor tradisional (sektor pertanian) menjadi sektor modern yaitu sektor industri dan perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat melalui kontribusi sektor pertanian yang tidak lagi mendominasi PDRB Jawa Timur. Kontribusi sektor pertanian berada di urutan ketiga, setelah industri pengolahan dan perdagangan. Bahkan kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Adanya pergeseran sektor inilah yang menyebabkan meningkatnya pendapatan per

kapita masyarakat. Hal itu terjadi karena, tingkat upah yang dihasilkan oleh sektor modern (industri dan perdagangan) lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian yang cenderung memiliki upah yang rendah.

4.3.2.5 Hubungan Langsung antara Lahan Produktif dengan Pendapatan Per Kapita

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan lahan produktif direspon oleh peningkatan pendapatan per kapita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lahan produktif merupakan cerminan dari sumber daya alam yang merupakan salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi, yang dapat dituliskan dalam fungsi faktor produksi sebagai berikut:

$$Y = f(K, L, M) \dots\dots\dots(4.1)$$

Dimana Y merupakan output yang dihasilkan, K merupakan modal, L merupakan tenaga kerja, dan M mencerminkan bahan mentah atau SDA yang digunakan (Nicholson, 2002). Berdasarkan persamaan 4.1, dengan menggunakan logika sederhana, apabila lahan produktif atau M mengalami peningkatan, maka Y juga akan mengalami peningkatan. Ketika jumlah output atau PDRB meningkat, maka pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dachi (2016). Penelitian yang dilakukan di Sumatera Utara ini menghasilkan temuan bahwa, peningkatan jumlah lahan produktif sebagai akibat dari penggunaan teknologi pertanian, mampu meningkatkan PDRB di sektor pertanian. Peningkatan PDRB sektor pertanian selanjutnya akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.

Akan tetapi, kemungkinan peningkatan jumlah lahan produktif masih sulit tercipta. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya teknologi yang dimiliki

oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejauh ini upaya peningkatan jumlah lahan produktif masih dilakukan dengan membangun infrastruktur penunjang pertanian, seperti pembangunan bendungan, irigasi, dan lain sebagainya. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi yang berhasil dikembangkan, bukan merupakan suatu hal yang mustahil jika jumlah lahan produktif mengalami peningkatan.

4.3.2.6 Hubungan Langsung antara Tenaga Kerja dengan Pendapatan Per Kapita

Temuan yang dihasilkan penelitian ini adalah meningkatnya tenaga kerja direspon oleh peningkatan pendapatan per kapita. Logika yang digunakan masih sama yaitu fungsi produksi pada persamaan 4.1. Ketika jumlah tenaga kerja (L) bertambah, maka output (Y) yang dihasilkan juga akan bertambah. Peningkatan output produksi selanjutnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Temuan ini didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Menajang (2014) yang melakukan penelitian di Kota Manado. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB melalui peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Meningkatnya jumlah tenaga kerja disebabkan oleh peningkatan investasi yang selanjutnya menciptakan lapangan kerja baru.

4.3.2.7 Hubungan Langsung antara Investasi dengan Pendapatan Per Kapita

Temuan yang dihasilkan penelitian ini adalah peningkatan investasi cenderung direspon oleh peningkatan pendapatan per kapita. Masih sama dengan lahan produktif dan tenaga kerja. Hubungan investasi dan pendapatan per kapita juga menggunakan logika fungsi produksi pada persamaan 4.1. Asumsi yang digunakan adalah seluruh investasi digunakan untuk kegiatan

produksi dalam suatu industri. Ketika terjadi peningkatan jumlah investasi, maka terdapat dua pilihan. Investasi yang ada digunakan untuk industri yang padat modal atau padat karya.

Investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PMTB yang merupakan pengeluaran untuk barang modal yang berusia pemakaian yang tidak lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. Sehingga investasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah investasi yang padat modal. Peningkatan jumlah PMTB akan meningkatkan output produksi. Peningkatan output produksi selanjutnya berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Temuan dalam penelitian ini didukung oleh Febtiyanto (2016). Berdasarkan hasil penelitiannya, PMTB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.

4.3.2.8 Hubungan Tidak Langsung antara Lahan Produktif dengan Pertumbuhan Inklusif

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan lahan produktif direspon oleh peningkatan indeks pertumbuhan inklusif melalui pendapatan per kapita. Artinya, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dapat berkurang ketika pendapatan per kapita mengalami peningkatan, sebagai akibat dari meningkatnya lahan produktif. Konsep mengenai pertumbuhan inklusif diturunkan dari konsep pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor* atau pro kelompok miskin. Kondisi yang umum terjadi di negara berkembang, kelompok miskin berasal dari sektor pertanian yang memiliki tingkat upah yang rendah. Ketika lahan produktif bertambah sebagai akibat dari perbaikan infrastruktur dan penggunaan teknologi pertanian, maka akan berdampak pada peningkatan upah pekerja sektor pertanian. Seiring dengan peningkatan upah masyarakat miskin, maka pertumbuhan inklusif akan tercipta.

Temuan dalam penelitian ini didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Felipe (2012). Dalam penelitiannya, menghasilkan temuan bahwa pertumbuhan inklusif dapat terjadi apabila sektor pertanian suatu wilayah dapat berkembang. Sektor pertanian dapat meningkat apabila produktivitas lahan pertanian mengalami peningkatan. Dengan demikian, Felipe (2012) menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki kondisi sektor pertanian, apabila ingin segera mewujudkan pertumbuhan yang inklusif.

4.3.2.9 Hubungan Tidak Langsung antara Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Inklusif

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan tenaga kerja direspon oleh peningkatan indeks pertumbuhan inklusif melalui pendapatan per kapita. Artinya, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dapat berkurang ketika pendapatan per kapita mengalami peningkatan, sebagai akibat dari meningkatnya jumlah tenaga kerja. Ketika penyerapan tenaga kerja meningkat, maka salah satu dimensi dari pertumbuhan inklusif yaitu penurunan pengangguran telah terpenuhi. Namun, pengaruh yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak dapat terjadi secara langsung. Hal tersebut terjadi karena tidak semua penyerapan tenaga kerja mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif. Mungkin salah satu dimensi pertumbuhan ekonomi telah dipenuhi, namun belum tentu dimensi yang lainnya juga terpenuhi.

Penyerapan tenaga kerja yang dapat memengaruhi pertumbuhan inklusif adalah penyerapan tenaga kerja yang juga mengikutsertakan masyarakat miskin (Klasen, 2010). Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat miskin, agar masyarakat miskin dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik. Jika masyarakat miskin dapat bekerja dan memperoleh

penghasilan yang lebih baik, maka penurunan kemiskinan dan ketimpangan juga akan terjadi.

4.3.2.10 Hubungan Tidak Langsung antara Investasi dengan Pertumbuhan Inklusif

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan investasi direspon oleh peningkatan indeks pertumbuhan inklusif melalui pendapatan per kapita. Artinya, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dapat berkurang ketika pendapatan per kapita mengalami peningkatan, sebagai akibat dari meningkatnya investasi. Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan inklusif melalui pendapatan per kapita, karena tidak semua investasi mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif. Investasi yang mampu mendorong pertumbuhan inklusif adalah investasi yang bersifat *pro-poor*. Investasi dalam bidang pertanian seperti pembangunan waduk dan irigasi merupakan salah satu contoh investasi yang mampu mendorong sektor pertanian. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor pertanian yang mayoritas adalah masyarakat miskin.

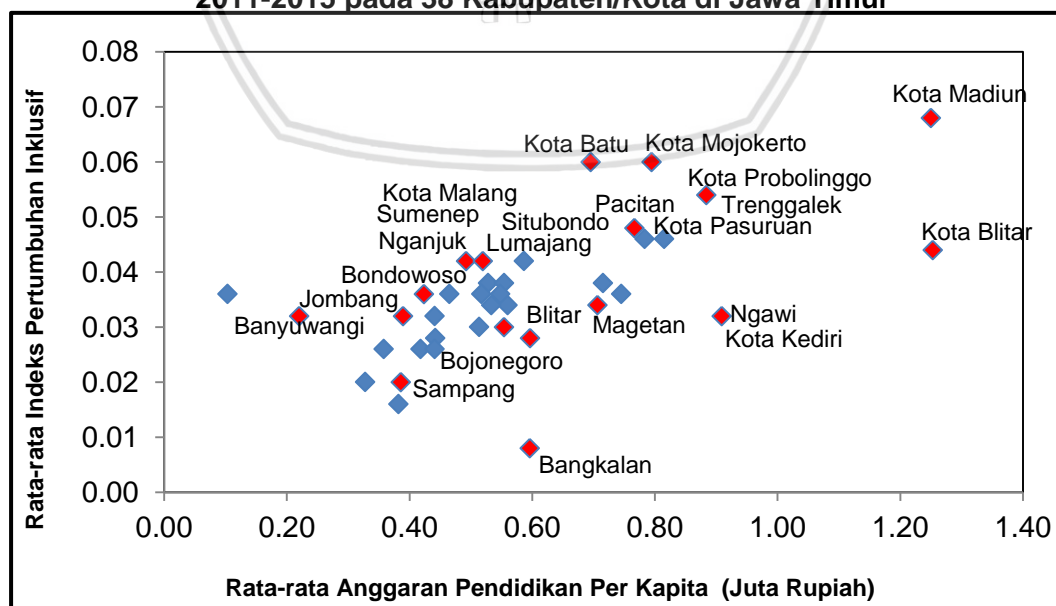
Temuan dalam penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Oluseye dan Gabriel (2017). Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa investasi yang diproksikan melalui *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif melalui *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita tenaga kerja.

4.4 Implikasi Hasil Penelitian

Setelah mengetahui hasil dan pembahasan di atas, selanjutnya akan dibahas mengenai implikasi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Implikasi hasil penelitian diperlukan untuk melihat bagaimanakah upaya mempercepat

inklusi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur. Mengingat, kabupaten/kota yang ada memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka perlu untuk mengetahui karakteristik daerah yang seperti apakah yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Karakteristik-karakteristik tersebut dilihat melalui faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif secara langsung yaitu anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, rata-rata lama sekolah dan pendapatan per kapita. Sebagai upaya menyederhanakan pembahasan, maka diambil nilai rata-rata dari masing-masing karakteristik yang ada selama periode penelitian yaitu tahun 2011-2015. Sedangkan untuk pertumbuhan inklusifnya, diambil kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif selama periode penelitian yaitu sebanyak 23 kabupaten/kota. Karakteristik yang pertama yaitu anggaran pendidikan, yang dilihat melalui anggaran pendidikan per kapita dalam satuan juta rupiah (Gambar 4.18). Dari karakteristik pertama, dapat diketahui bahwa daerah dengan anggaran pendidikan per kapita yang tinggi selalu inklusif.

Gambar 4.18: Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Anggaran Pendidikan Tahun 2011-2015 pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur



Catatan: ◆ Inklusif ◆ Belum Inklusif
Sumber: Data diolah oleh Penulis (2018).

Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata anggaran pendidikan per kapita kabupaten/kota. Anggaran pendidikan per kapita yang berada di bawah rata-rata digolongkan sebagai anggaran pendidikan per kapita yang rendah. Sedangkan anggaran pendidikan per kapita yang berada di atas rata-rata digolongkan sebagai anggaran pendidikan per kapita yang tinggi.

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hampir semua daerah dengan anggaran pendidikan per kapita yang tinggi adalah inklusif, kecuali Kabupaten Madiun dan Ponorogo. Selain itu, anggaran pendidikan per kapita yang tinggi didominasi oleh daerah perkotaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan dari anggaran pendidikan di daerah perkotaan sangat penting. Hal ini berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di perkotaan yang didominasi oleh sektor industri dan jasa. Sektor tersebut menuntut tenaga kerja yang lebih berkualitas dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Sementara itu, pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi hanya bisa di dapatkan dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang baik dan berkualitas, dimana tidak bisa terlepas dari peranan pemerintah.

Tabel 4.6: Rata-rata Anggaran Pendidikan Per Kapita 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2015

Anggaran Rendah		Anggaran Rendah		Anggaran Tinggi	
Kab/Kota	Anggaran	Kab/Kota	Anggaran	Kab/Kota	Anggaran
Malang	0.38	Sumenep*	0.58	Situbondo*	0.77
Kota Malang*	0.46	Tuban	0.60	Trenggalek*	0.83
Gresik	0.47	Kt Surabaya	0.60	Madiun	0.83
Sidoarjo	0.47	Bangkalan*	0.61	Ponorogo	0.84
Jember	0.47	Lumajang*	0.64	Kota Batu*	0.85
Lamongan	0.51	Tulungagung	0.66	Kota Pasuruan*	0.92
Sampang*	0.51	Bondowoso*	0.67	Pacitan*	0.93
Banyuwangi*	0.51	Nganjuk*	0.68	Magetan*	0.97
Probolinggo	0.52	Ngawi*	0.69	Kt Probolinggo*	1.04
Kediri	0.53	Bojonegoro*	0.70	Kota Kediri*	1.19
Pasuruan	0.53	Pamekasan	0.72	Kt Mojokerto*	1.22
Jombang*	0.56	Blitar*	0.73	Kota Blitar*	1.62
Mojokerto	0.56			Kota Madiun*	1.79

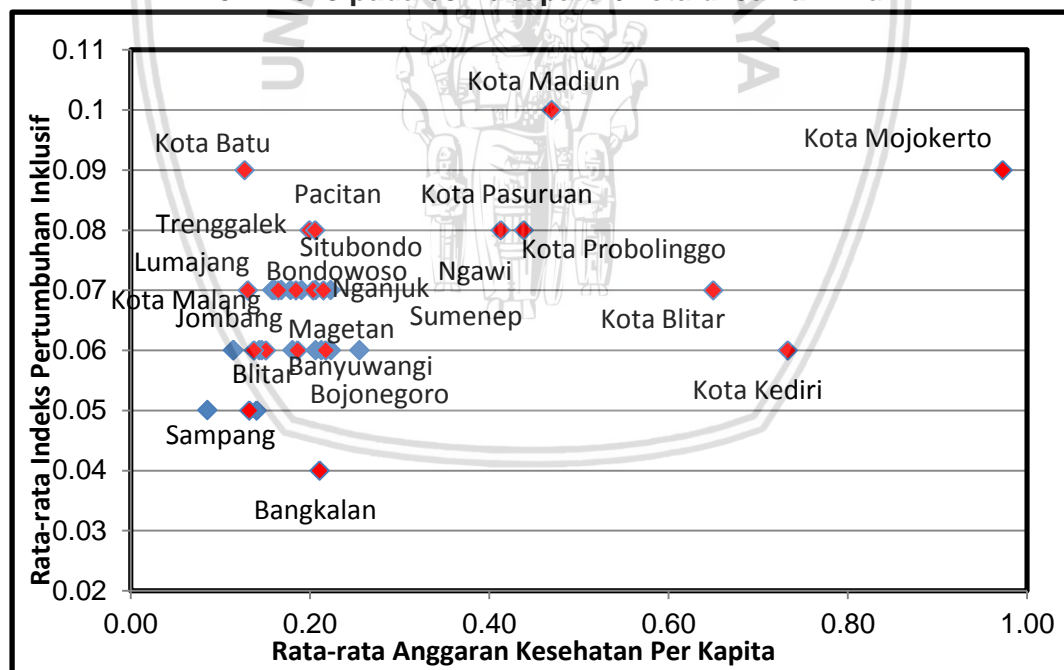
Catatan: *) Inklusif

Sumber : Data diolah oleh Penulis (2018).

Pada daerah kabupaten, cukup banyak kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif meskipun anggaran pendidikan per kapitanya tergolong rendah. Namun, hal tersebut bukan berarti anggaran pendidikan di kabupaten tidak terlalu berpengaruh terhadap percepatan inklusivitas. Daerah dengan rata-rata anggaran pendidikan per kapita yang rendah seperti Kabupaten Malang, Gresik, Sidoarjo, Jember, Lamongan, Kediri, Pasuruan, dan Mojokerto merupakan daerah yang belum inklusif. Sehingga pada daerah-daerah ini diperlukan adanya peningkatan anggaran pendidikan agar percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat segera diwujudkan.

Karakteristik yang kedua yaitu anggaran kesehatan, yang dapat dilihat melalui anggaran kesehatan per kapita dalam satuan juta rupiah (Gambar 4.19).

Gambar 4.19: Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Anggaran Kesehatan Tahun 2011-2015 pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur



Catatan: ◆ Inklusif ◆ Belum Inklusif
Sumber: Data diolah oleh Penulis (2018).

Tabel 4.7 menunjukkan rata-rata anggaran kesehatan per kapita kabupaten/kota. Anggaran kesehatan per kapita yang berada di bawah rata-rata digolongkan sebagai anggaran kesehatan per kapita yang rendah. Sedangkan anggaran

kesehatan per kapita yang berada di atas rata-rata digolongkan sebagai anggaran kesehatan per kapita yang tinggi.

Semua daerah dengan anggaran kesehatan per kapita yang tinggi adalah inklusif. Sama seperti pembahasan sebelumnya, anggaran kesehatan per kapita yang tinggi paling didominasi oleh daerah perkotaan. Sedangkan di daerah kabupaten, cukup banyak kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif meskipun anggaran kesehatan per kapitanya tergolong rendah. Dengan hasil yang demikian, terbukti bahwa anggaran kesehatan per kapita yang tinggi mampu mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. Sehingga, pada kabupaten/kota yang anggaran kesehatan per kapitanya rendah diperlukan adanya peningkatan anggaran kesehatan agar percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat segera diwujudkan.

Tabel 4.7: Rata-rata Anggaran Kesehatan Per Kapita 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2015

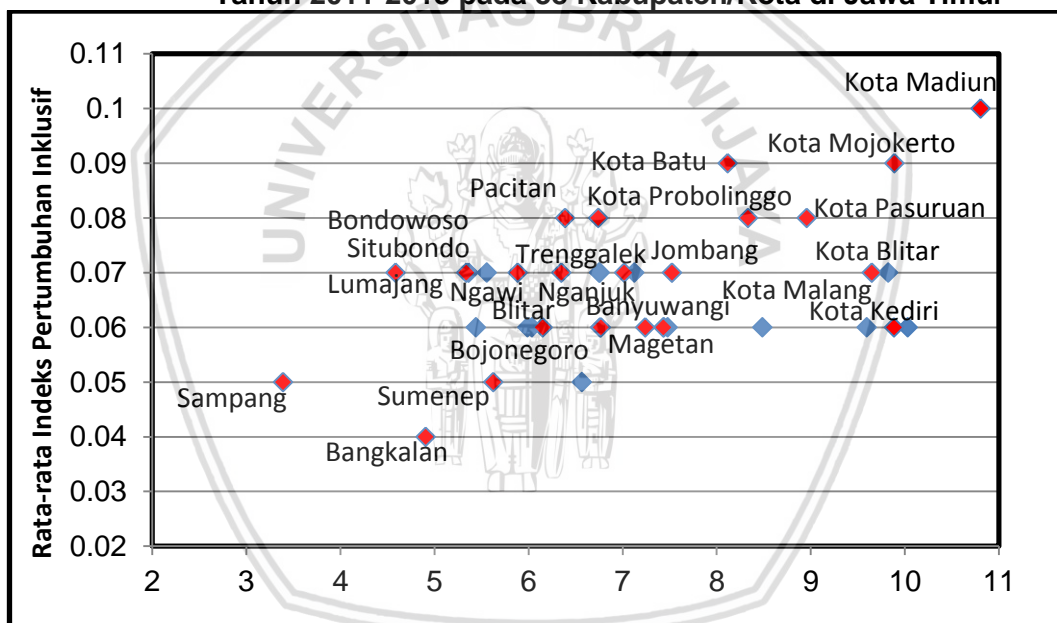
Anggaran Rendah		Anggaran Rendah		Anggaran Tinggi	
Kab/Kota	Anggaran	Kab/Kota	Anggaran	Kab/Kota	Anggaran
Sumenep*	0.09	Ponorogo	0.18	Kota Madiun*	0.26
Gresik	0.11	Jember	0.18	Kota Mojokerto*	0.41
Kota Malang*	0.11	Banyuwangi*	0.19	Kota Blitar*	0.44
Kota Batu*	0.13	Situbondo*	0.19	Magetan*	0.47
Kt Probolinggo*	0.13	Lumajang*	0.20	Kota Pasuruan*	0.65
Bojonegoro*	0.13	Jombang*	0.20	Pacitan*	0.73
Bondowoso*	0.14	Trenggalek*	0.21	Kota Kediri*	0.97
Sampang*	0.14	Nganjuk*	0.21		
Ngawi*	0.14	Sidoarjo	0.21		
Madiun	0.15	Malang	0.21		
Probolinggo	0.15	Pamekasan	0.21		
Pasuruan	0.16	Kt Surabaya	0.21		
Tuban	0.16	Lamongan	0.22		
Kediri	0.16	Blitar*	0.22		
Bangkalan*	0.17	Mojokerto	0.22		
Tulungagung	0.18				

Catatan: *) Inklusif

Sumber : Data diolah oleh Penulis (2018).

Karakteristik yang ketiga dapat dilihat pada gambar 4.20 yang menunjukkan rata-rata lama sekolah dengan rata-rata nilai indeks pertumbuhan inklusif. Rata-rata lama sekolah yang digunakan adalah rata-rata lama waktu yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan pendidikan formal. Sebagai tambahan informasi, disajikan pula tabel 4.8 yang menunjukkan nilai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) kabupaten/kota. RLS yang berada di bawah rata-rata, digolongkan sebagai RLS yang rendah. Sedangkan RLS yang berada di atas rata-rata digolongkan sebagai RLS yang tinggi.

Gambar 4.20: **Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015 pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur**



Catatan: ◆ Inklusif ◆ Belum Inklusif
Sumber: Data diolah oleh Penulis (2018).

Sepuluh dari enam belas daerah dengan RLS yang tinggi, adalah inklusif. Sama seperti pembahasan sebelumnya, RLS yang tinggi didominasi oleh daerah perkotaan. Tingginya RLS di daerah perkotaan disebabkan oleh adanya fasilitas pendidikan yang lebih baik di daerah perkotaan. Baiknya fasilitas pendidikan tersebut, di dukung oleh tingginya anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah di daerah perkotaan. Kondisi sosial masyarakat di daerah perkotaan

memang lebih baik dibandingkan dengan yang ada di kabupaten. Kesadaran masyarakat akan pendidikan juga lebih tinggi di daerah perkotaan. Hal ini yang membuat mengapa RLS daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten.

Lebih lanjut, tingginya RLS berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan *human capital*. Meningkatnya *human capital* dapat mempermudah masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja. Dengan begitu, tingkat pengangguran akan berkurang. Ketika pengangguran berkurang, maka akan disusul dengan pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan.

Tabel 4.8: **Rata-rata Lama Sekolah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2015**

Lama Sekolah Rendah		Lama Sekolah Rendah		Lama Sekolah Tinggi		Lama Sekolah Tinggi	
Kab/Kota	RLS	Kab/Kota	RLS	Kab/Kota	RLS	Kab/Kota	RLS
Sampang*	3.39	Pasuruan	6.15	Kediri	7.24	Kt Pasuruan*	8.96
Sumenep*	4.59	Ngawi*	6.35	Jombang*	7.43	Kota Kediri*	9.60
Bangkalan*	4.91	Pacitan*	6.39	Magetan*	7.44	Kota Blitar*	9.65
Situbondo*	5.34	Malang	6.57	Tulungagung	7.48	Kota Malang*	9.82
Bondowoso*	5.36	Trenggalek*	6.74	Mojokerto	7.52	Sidoarjo	9.88
Probolinggo	5.44	Ponorogo	6.75	Kota Batu*	8.12	Kt Mojokerto*	9.89
Pamekasan	5.56	Madiun	6.76	K Probolinggo*	8.33	Kt Surabaya	10.03
Jember	5.62	Banyuwangi*	6.76	Gresik	8.49	Kota Madiun*	10.80
Lumajang*	5.88	Blitar*	6.77				
Tuban	5.99	Lamongan	7.02				
Bojonegoro*	6.04	Nganjuk*	7.12				

Catatan: *) Inklusif

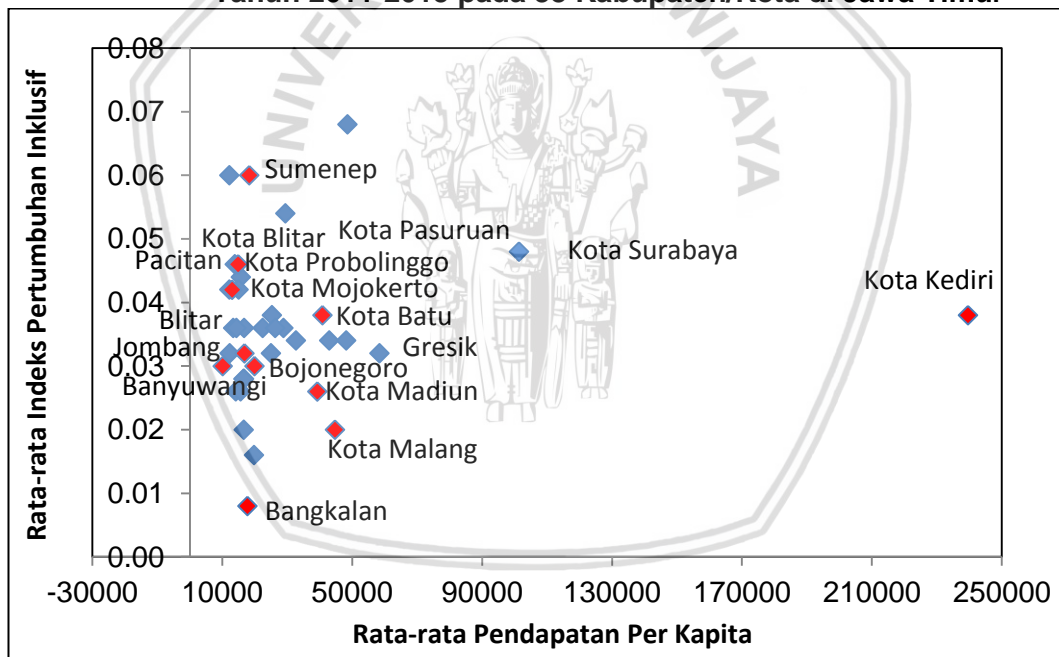
Sumber : Data diolah oleh Penulis (2018).

Sementara itu, jika pada RLS tinggi di dominasi oleh daerah perkotaan, sebaliknya pada RLS rendah secara keseluruhan merupakan daerah kabupaten. Pada RLS yang rendah, cukup banyak kabupaten yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Dari 22 kabupaten/kota yang memiliki RLS rendah, sebanyak 13 kabupaten berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Sedangkan sisanya sebanyak 9 kabupaten masih belum inklusif. Pada kabupaten/kota yang

RLS nya rendah dan masih belum inklusif diperlukan adanya peningkatan RLS agar percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat segera diwujudkan.

Karakteristik yang keempat dapat dilihat pada gambar 4.21 yang menunjukkan rata-rata pendapatan per kapita dengan rata-rata nilai indeks pertumbuhan inklusif. Pendapatan per kapita yang digunakan adalah pendapatan per kapita dengan satuan ribu rupiah. Selain itu, gambar 4.21 mengisyaratkan bahwa daerah yang mencapai pertumbuhan inklusif menyebar secara merata. Sehingga diperlukan informasi pendukung sebagai langkah untuk mempermudah interpretasi.

Gambar 4.21: Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pendapatan Per Kapita Tahun 2011-2015 pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur



Catatan: ◆ Inklusif ◆ Belum Inklusif
Sumber: Data diolah oleh Penulis (2018).

Tabel 4.9 yang menunjukkan pendapatan per kapita kabupaten/kota. Pendapatan per kapita yang berada di bawah rata-rata, digolongkan sebagai pendapatan per kapita yang rendah. Sedangkan pendapatan per kapita yang berada di atas rata-rata digolongkan sebagai pendapatan per kapita yang tinggi. Dari tabel 4.9 diperoleh informasi bahwa rata-rata pendapatan per kapita yang

tinggi didominasi oleh kabupaten/kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor industri. Nilai tambah yang lebih besar dari sektor industri, menyebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi yang ada, yang selanjutnya berdampak pada tingginya pendapatan per kapita masyarakatnya. Dari 10 kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, 5 di antaranya telah berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Sedangkan Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Kota Surabaya yang merupakan daerah industri terbesar masih belum mampu mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Tabel 4.9: Rata-rata Pendapatan Per Kapita 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2015

GDP Kapita Rendah		GDP Kapita Rendah		GDP Kapita Rendah		GDP Kapita Tinggi	
Kab/Kota	Y	Kab/Kota	Y	Kab/Kota	Y	Kab/Kota	Y
Pamekasan	10114	Situbondo*	15104	Sumenep*	18295	Bojonegoro*	32697
Ponorogo	12237	Magetan*	15637	Malang	19806	Mojokerto	39248
Ngawi*	12250	Probolinggo	15808	Tulungagung	19910	Kota Batu*	40834
Sampang*	12320	Lumajang*	16559	Kota Pasuruan*	22454	Kota Madiun*	42955
Nganjuk*	13023	Jember	16637	Banyuwangi*	25057	Kota Malang*	44684
Bondowoso*	13438	Blitar*	16717	Kota Blitar*	25363	Pasuruan	48143
Trenggalek*	13850	Lamongan	16728	K Probolinggo*	26326	Sidoarjo	48626
Kediri	14177	Jombang*	16820	K Mojokerto*	28854	Gresik	58485
Madiun	14373	Bangkalan*	17730	Tuban	29473	K Surabaya	101346
Pacitan*	14863					Kota Kediri*	239574

Catatan: *) Inklusif

Sumber : Data diolah oleh Penulis (2018).

Pada sisi berbeda, dari 28 kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita rendah, sebanyak 18 kabupaten/kota diantaranya telah berhasil mencapai pertumbuhan inklusif. Sedangkan sisanya sebanyak 10 kabupaten masih belum inklusif. Pendapatan per kapita yang tinggi, mencerminkan tingginya kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan teori, peningkatan pendapatan per kapita akan menurunkan ketimpangan, kemiskinan, dan juga pengangguran. Meskipun hal tersebut membutuhkan proses yang cukup lama, namun, pada akhirnya peningkatan pendapatan per kapita dapat mempercepat terwujudnya

inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pada kabupaten/kota yang pendapatan per kapita nya rendah dan masih belum inklusif, kedepan diperlukan adanya peningkatan pendapatan per kapita agar percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat segera diwujudkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan serta memberikan solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pertumbuhan inklusif di Jawa Timur tahun 2011-2015 dan faktor-faktor yang memengaruhinya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama periode 2011-2015 indeks pertumbuhan inklusif di Jawa Timur memiliki tren yg menurun. Aspek Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur lebih dominan, dibandingkan dengan aspek lainnya yaitu ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran;
2. Pengelolaan sumber daya yg dapat meningkatkan pendapatan per kapita, berpengaruh dalam mempercepat terwujudnya pertumbuhan inklusif di Jawa Timur; dan,
3. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui *fiscal policy* sudah efektif dalam usaha mempercepat terwujudnya pertumbuhan inklusif.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka saran yang tepat untuk direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mendorong penggunaan sumber daya yg efektif dan efisien khususnya di daerah dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang rendah;
2. Kebijakan pemerintah sebaiknya lebih diarahkan untuk melaksanakan fungsi distrbusi, mengingat peran pemerintah dalam hal ini masih belum berjalan dengan efektif; dan,
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil penelitian mengenai bidang yang sama, diharapkan mampu mengembangkan populasi yang lebih luas yaitu seluruh Indonesia yang meliputi pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ifzal. 2007. Pro-Poor to Inclusive Growth : Asian Prescriptions. Economic and Research Departement Asian Development Bank Series No. 48. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28103/pb048.pdf>, diakses pada 18 Mei 2018.
- Anand, Rahul *et al.* 2013. Incusive Growth : Measurement and Detreminants. *International Monetary Fund Working Paper Series*. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Inclusive-Growth-Measurement-and-Determinants-40613>, diakses pada 21 Oktober 2017.
- Azwar, Iskandar. 2016. Pertumbuhan inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia* Vol. 09 (No.02). <http://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/download/118/51>, diakses pada 20 Oktober 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Luas Lahan Sawah Menurut Provinsi (ha) 2003-2015*. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/895>, diakses pada 19 Juli 2018.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016a. *Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2015*. <https://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/10>, diakses pada 20 Oktober 2017.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017a. *Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2015* <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/06/09/463/jumlah-angkatan-kerja-menurut-kabupaten-kota-2011-2015.html>, diakses pada 20 Oktober 2017.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017b. *Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, 2001-2017*. <https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/11/16/146/jumlah-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-kabupaten-kota-2001---2017.html>, diakses pada 11 Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017c. *PDRB Provinsi Jawa Timur atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2010-2016*. <https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/07/31/42/pdrb-provinsi-jawa-timur-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-pengeluaran--miliar-rupiah-2010-2016.html>, diakses pada 20 Oktober 2017.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017d. *PDRB Provinsi Jawa Timur atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2010-2016*. <https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/35/pdrb-provinsi-jawa-timur-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2016-milyar-rupiah-.html>, diakses pada 20 Oktober 2017.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017e. *Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2017*. <https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/181>, diakses pada 20 Oktober 2017.

- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017f. *Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2017*. <https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/11/16/144/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-2001---2017.html>, diakses pada 20 Oktober 2017.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2018a. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2017*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/754/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012---2017.html> diakses pada 11 Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2018b. *Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota (IPM Metode Baru) 2010-2016*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/09/22/103/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-ipm-metode-baru-2010-2016.html>, diakses pada 11 Februari 2018.
- Cahyadi, Ni Made Ayu Krisna *et al.* 2018. Inclusive Growth and Leading Sector in Bali Province. *Economic Journal of Emerging Markets* Vol. 10. <http://journal.uui.ac.id/JEP/article/view/8220/8137>, diakses pada 5 Juni 2018.
- Dachi, Beatrice Ingrid. 2016. Analisis Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Agribisnis Universitas Sumatera Utara*. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/viewFile/17490/7427>, diakses pada 24 Juli 2018.
- Domonkos, Tomas *et al.* 2013. Analysing Inclusive Growth : Empirical Evidence from the Slovak Republic. *Institute of Economic Research Ekonomicky Caspois* No. 61. <https://www.sav.sk/journals/uploads/0621145609%2013%20Domonkos%20a%20kol.pdf>, diakses pada 18 Mei 2018.
- Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer. 1989. *Makroekonomi (Edisi Keempat)*. Terjemahan oleh Julius A. Mulyadi. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Doumbia, Djeneba. 2014. The Quest for Pro-poor and Inclusive Growth: The Role of Governance. *Journal of Paris School of Economics*. <http://remi.bazillier.free.fr/doumbia.pdf>, diakses pada 18 Mei 2018.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Ekananda, Mahyus. 2014. *Ekonometrika Data Panel*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Ekananda, Mahyus. 2015. *Ekonometrika Dasar untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Bisnis*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Febtiyanto, Yugo. 2016. Analisis Faktor-faktor Penentu Pendapatan per Kapita sebagai Upaya Menghindari Middle Income Trap (Studi Kasus di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro*. http://eprints.undip.ac.id/51605/1/09_FEBTIYANTO.pdf, diakses oada 24 Juli 2018.
- Felipe, Jesus. 2012. Inclusive Growth : Why is it Important for Developing Asia?. *CADMUS A papers series of the South-East European Division of the World Academy of Art and Science (SEED-WAAS)* Vol. 1. <http://www.cadmusjournal.org/node/148>, diakses pada 21 Oktober 2017.

- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 2 (Edisi Kelima)*. Terjemahan oleh Raden Carlos Mangunsong. 2012. Jakarta : Salemba Empat.
- Haan, Arjan de dan Sukhadeo Thorat. 2013. Inclusive Growth : More than safety Nets. *Interntaional Development Research Centre (IDRC)*. https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/SIG_WP13-1_InclGrowth.pdf, diakses pada 31 Januari 2018.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kakwani, Nanak dan Hyun H. Son. 2008. Pro-poor Growth : Concepts and Measurement with Country Case Studies. *The Pakistan Development Review* Vol. 42 No. 4. <http://www.pide.org.pk/pdf/PDR/203/Volume4/417-444.pdf>, diakses pada 18 Mei 2018.
- Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK). 2016. *LGF Anggaran Menurut Fungsi*. www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=316, diakses pada 20 Oktober 2017.
- Khusnah, Lailatul. 2015. Analisis Disparitas Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vo. 13 No. 01. <https://media.neliti.com/media/publications/135607-ID-analisis-disparitas-pendapatan-antar-kab.pdf>, diakses pada 22 Juli 2018.
- Kristyanto, Visi Saujaningati, dan Dwi Budi Santoso. Analisis Sektor Produksi Pendorong Terwujudnya Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Klasen, Stephan. 2010. Measuring and Monitoring Inclusive Growth : Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. *Asian Development Bank Sustainable Development Working Paper Series* No.12. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28492/adb-wp12-measuring-inclusive-growth.pdf>, diakses pada 20 Oktober 2017.
- Lee, Neil dan Paul Sissons. 2016. Inclusive growth? The Relationship Between Economic Growth and Poverty in British City. *Journal of Environment and Planning A* Vol. 48 (No11). <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X16656000>, diakses pada 26 Januari 2018.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mankiw, R. Gregory. 2007. *Makroekonomi (Edisi Keenam)*. Terjemahan oleh Fitria Liza dan Imam Nurmawan. 2007. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Menajang, Heidy. 2014. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 13 No. 01. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/10408>, diakses pada 24 Juli 2018.
- Neolaka, Armos. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Ngepah, Nicholas. 2017. A Review of Theories and Evidence of Inclusive Growth : an Economic Perspective for Africa. *Science Direct Current Opinion in Environmental Sustainability* Vol. 24. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343517300180>, diakses pada 26 Januari 2018.
- Nicholson, Walter. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya Edisi ke delapan*. Terjemahan oleh IGN Bayu Mahendra dan Abdul Aziz. 2002. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nurhuda, Rama *et al.* 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 01 No. 04. <https://media.neliti.com/media/publications/74424-ID-analisis-ketimpangan-pembangunan-studi-d.pdf>, diakses pada 22 Juli 2018.
- Oluseye, Ibukun Cleopatra dan Aremo Adeleke Gabriel. 2017. Determinants of Inclusive Growth in Nigeria : an ARDL Approach. *American Journal of Economics*. <http://article.sapub.org/10.5923.j.economics.20170703.01.html>, diakses pada 20 Oktober 2017.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Payaman. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit FE UI.
- Singh, Kanwal D.P. 2017. Inclusive growth and poverty reduction : a Case Study of India. *Indian Journal of Public Administration* Vol. 63 (No. 4). <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0019556117726822>, diakses pada 26 Januari 2018.
- Sholihah, *et al* 2013. Pertumbuhan Inklusif : Faktor-Faktor yang Memengaruhi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Kelas Menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* Vol. 02 No. 02. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/viewFile/19947/13739>, diakses pada 27 Juni 2018.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Kencana.
- Suprianik. 2012. *Analisis Hipotesis Kuznets pada Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Regional Wilayah Eks Karesidenan Besuki Jawa Timur Sebelum dan Sesudah Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Tesis Publikasi. http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/10441/SUPRIANIK%20C%20S.E%20-%20100820201004_1.pdf?sequence=1, Jember : Universitas Jember.
- Tella, Sheriffdeen A dan Olorunfemi Yasiru Alimi. 2016. Detreminants of Inclusive Growth in Africa : Role of Health and Demographic Changes. *African Journal of Economic Review*, Vol.04. <https://www.ajol.info/index.php/ajer/article/view/136050>, diakses pada 28 Mei 2018.
- Todaro, Michael .P. dan Stephen C. Smith. 2009. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas)*. Terjemahan oleh Agus Dharma. 2011. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

World Bank. 2008. *What is Inclusive Growth ?*. <http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/WhatIsIG.pdf?resourceurlname=WhatIsIG.pdf>, diakses pada 20 Oktober 2017.

World Bank. 2011. *Jawa Timur Berpeluang Capai Pertumbuhan Inklusif*. <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2011/11/09/jawa-timur-berpeluang-capai-pertumbuhan-inklusif-siaran-pers>, diakses pada 15 November 2017.



Lampiran 1

Hasil Uji Pemilihan Model

1. Persamaan Pendapatan Per Kapita

Hasil Uji Chow

xtreg GDP_KAP LP TK INVEST, fe

Fixed-effects (within) regression
Group variable: kabupatenk~a

Number of obs = 190
Number of groups = 38

R-sq:

within = 0.8969
between = 0.9073
overall = 0.9072

obs per group:
min = 5
avg = 5.0
max = 5

corr(u_i, xb) = -0.0663
F(3,149) = 432.11
Prob > F = 0.0000

GDP_KAP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
LP	.0102971	.0158102	0.65	0.516	-.020944	.0415381
TK	.1110558	.0632706	1.76	0.081	-.0139678	.2360795
INVEST	.9247687	.0282777	32.70	0.000	.8688915	.9806458
_cons	-8.282035	.0770813	-107.45	0.000	-8.434348	-8.129721
sigma_u	.19998551					
sigma_e	.026304					
rho	.98299419					

F test that all u_i=0: F(37, 149) = 257.19

Prob > F = 0.0000

Hasil Uji Hausman

. hausman fixed random

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fixed	(B) random		
LP	.0102971	.01425	-.003953	.0059735
TK	.1110558	.1229607	-.0119048	.0081676
INVEST	.9247687	.917384	.0073847	.0126366

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 18.90

Prob>chi2 = 0.0003

2. Persamaan Pertumbuhan Inklusif

Hasil Uji Chow

Fixed-effects (within) regression
Group variable: kabupatenk~a

Number of obs = 190
Number of groups = 38

R-sq:

within = 0.0465
between = 0.3094
overall = 0.0870

Obs per group:

min = 5
avg = 5.0
max = 5

corr(u_i, Xb) = -0.9573

F(3,149) = 2.42
Prob > F = 0.0619

IG	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
GDP_KAP	-.0127149	.0468447	-0.27	0.786	-.1052859	.079856
SPE_EDU	.0034138	.0024932	1.37	0.173	-.0015131	.0083408
SPE_HLT	-.0051595	.0258315	-0.20	0.842	-.0562058	.0458867
RLS	-.0129669	.0150552	-0.86	0.390	-.0427177	.016784
_cons	.0196161	.3936718	0.05	0.960	-.7583277	.7975599
sigma_u	.03770782					
sigma_e	.01859628					
rho	.80436647	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(37, 149) = 1.62

Prob > F = 0.0230

Hasil Uji Hausman

hausman fe re

---- Coefficients ----				
	(b) fe	(B) re	(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
GDP_KAP	-.0127149	.005526	-.0182409	.0467532
SPE_EDU	.0034138	.0053124	-.0018986	.0020784
SPE_HLT	-.0051595	.0282936	-.0334531	.0237578
RLS	-.0129669	.0041653	-.0171322	.0150061

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

$$\chi^2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B)$$

= 9.32

Prob>chi2 = 0.0536

Lampiran 2

Hasil Estimasi Persamaan Simultan 3SLS

Three-stage least-squares regression

Equation	Obs	Parms	RMSE	"R-sq"	chi2	P
IG	190	4	.0188092	0.1654	42.36	0.0000
GDP_KAP	190	3	.1879136	0.9166	2096.87	0.0000

	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
IG						
SPE_EDU	.0051226	.0013102	3.91	0.000	.0025547	.0076905
SPE_HLT	.0223207	.0095699	2.33	0.020	.003564	.0410775
RLS	.0050789	.0011649	4.36	0.000	.0027958	.0073621
GDP_KAP	.0082343	.0029707	2.77	0.006	.0024119	.0140568
_cons	.0879199	.027197	3.23	0.001	.0346146	.1412251
GDP_KAP						
LP	.0318054	.0158714	2.00	0.045	.0006981	.0629128
TK	1.103376	.191668	5.76	0.000	.7277142	1.479039
INVEST	.8448269	.0253614	33.31	0.000	.7951195	.8945344
_cons	-7.661342	.1263603	-60.63	0.000	-7.909003	-7.41368
Endogenous variables: IG GDP_KAP						
Exogenous variables: SPE_EDU SPE_HLT RLS LP TK INVEST						

Lampiran 3

Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif Tahun 2011

Kab/Kota	IG	Gg	INKLUSIVITAS
Bangkalan	0.02	0.03	BELUM INKLUSIF
Banyuwangi	0.01	0.07	BELUM INKLUSIF
Blitar	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Bojonegoro	0.04	0.1	BELUM INKLUSIF
Bondowoso	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Gresik	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Jember	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Jombang	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Kediri	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Lamongan	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Lumajang	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Madiun	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Magetan	0.01	0.05	BELUM INKLUSIF
Malang	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Mojokerto	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Nganjuk	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Ngawi	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Pacitan	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Pamekasan	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Pasuruan	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Ponorogo	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Probolinggo	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Sampang	0.03	0.02	INKLUSIF
Sidoarjo	0.04	0.07	BELUM INKLUSIF
Situbondo	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Sumenep	0.06	0.06	INKLUSIF
Trenggalek	0.06	0.06	INKLUSIF
Tuban	0.02	0.07	BELUM INKLUSIF
Tulungagung	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Batu	0.09	0.07	INKLUSIF
Kota Blitar	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Kediri	0.03	0.04	BELUM INKLUSIF
Kota Madiun	0.07	0.07	INKLUSIF
Kota Malang	0.08	0.06	INKLUSIF
Kota Mojokerto	0.07	0.06	INKLUSIF
Kota Pasuruan	0.07	0.06	INKLUSIF
Kota Probolinggo	0.12	0.06	INKLUSIF
Kota Surabaya	0.02	0.07	BELUM INKLUSIF

Lampiran 4

Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif Tahun 2012

Kab/Kota	IG	Gg	INKLUSIVITAS
Bangkalan	0.00	-0.01	INKLUSIF
Banyuwangi	0.07	0.07	INKLUSIF
Blitar	0.05	0.05	INKLUSIF
Bojonegoro	0.04	0.04	INKLUSIF
Bondowoso	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Gresik	0.03	0.07	BELUM INKLUSIF
Jember	0.00	0.06	BELUM INKLUSIF
Jombang	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Kediri	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Lamongan	0.06	0.07	BELUM INKLUSIF
Lumajang	0.06	0.06	INKLUSIF
Madiun	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Magetan	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Malang	0.04	0.07	BELUM INKLUSIF
Mojokerto	0.06	0.07	BELUM INKLUSIF
Nganjuk	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Ngawi	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Pacitan	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Pamekasan	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Pasuruan	0.03	0.07	BELUM INKLUSIF
Ponorogo	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Probolinggo	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Sampang	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Sidoarjo	0.01	0.07	BELUM INKLUSIF
Situbondo	0.05	0.05	INKLUSIF
Sumenep	0.05	0.09	BELUM INKLUSIF
Trenggalek	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Tuban	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Tulungagung	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Batu	0.05	0.07	BELUM INKLUSIF
Kota Blitar	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Kediri	0.04	0.05	BELUM INKLUSIF
Kota Madiun	0.05	0.07	BELUM INKLUSIF
Kota Malang	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Mojokerto	0.07	0.06	INKLUSIF
Kota Pasuruan	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Probolinggo	0.06	0.06	INKLUSIF
Kota Surabaya	0.05	0.07	BELUM INKLUSIF

Lampiran 5

Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif Tahun 2013

Kab/Kota	IG	Gg	INKLUSIVITAS
Bangkalan	0.00	0.00	INKLUSIF
Banyuwangi	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Blitar	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Bojonegoro	0.03	0.02	INKLUSIF
Bondowoso	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Gresik	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Jember	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Jombang	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Kediri	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Lamongan	0.05	0.07	BELUM INKLUSIF
Lumajang	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Madiun	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Magetan	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Malang	0.01	0.05	BELUM INKLUSIF
Mojokerto	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Nganjuk	0.05	0.05	INKLUSIF
Ngawi	0.07	0.05	INKLUSIF
Pacitan	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Pamekasan	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Pasuruan	0.03	0.07	BELUM INKLUSIF
Ponorogo	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Probolinggo	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Sampang	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Sidoarjo	0.03	0.07	BELUM INKLUSIF
Situbondo	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Sumenep	0.08	0.13	BELUM INKLUSIF
Trenggalek	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Tuban	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Tulungagung	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Batu	0.06	0.07	BELUM INKLUSIF
Kota Blitar	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Kediri	0.00	0.03	BELUM INKLUSIF
Kota Madiun	0.09	0.07	INKLUSIF
Kota Malang	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Mojokerto	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Pasuruan	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Probolinggo	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Surabaya	0.04	0.07	BELUM INKLUSIF

Lampiran 6

Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif Tahun 2014

Kab/Kota	IG	Gg	INKLUSIVITAS
Bangkalan	0.04	0.07	BELUM INKLUSIF
Banyuwangi	0.01	0.06	BELUM INKLUSIF
Blitar	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Bojonegoro	-0.03	0.02	BELUM INKLUSIF
Bondowoso	0.05	0.05	INKLUSIF
Gresik	0.02	0.07	BELUM INKLUSIF
Jember	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Jombang	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Kediri	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Lamongan	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Lumajang	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Madiun	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Magetan	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Malang	0.01	0.06	BELUM INKLUSIF
Mojokerto	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Nganjuk	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Ngawi	0.01	0.06	BELUM INKLUSIF
Pacitan	0.05	0.05	INKLUSIF
Pamekasan	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Pasuruan	0.03	0.07	BELUM INKLUSIF
Ponorogo	0.04	0.05	BELUM INKLUSIF
Probolinggo	0.01	0.05	BELUM INKLUSIF
Sampang	0.02	0.00	INKLUSIF
Sidoarjo	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Situbondo	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Sumenep	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Trenggalek	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Tuban	0.00	0.05	BELUM INKLUSIF
Tulungagung	0.04	0.05	BELUM INKLUSIF
Kota Batu	0.05	0.07	BELUM INKLUSIF
Kota Blitar	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Kediri	0.06	0.06	INKLUSIF
Kota Madiun	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Malang	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Mojokerto	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Pasuruan	0.03	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Probolinggo	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Surabaya	0.02	0.07	BELUM INKLUSIF

Lampiran 7

Hasil Indeks Pertumbuhan Inklusif Tahun 2015

Kab/Kota	IG	Gg	INKLUSIVITAS
Bangkalan	-0.02	-0.03	INKLUSIF
Banyuwangi	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Blitar	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Bojonegoro	0.09	0.16	BELUM INKLUSIF
Bondowoso	0.04	0.05	BELUM INKLUSIF
Gresik	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Jember	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Jombang	0.05	0.05	INKLUSIF
Kediri	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Lamongan	0.04	0.06	BELUM INKLUSIF
Lumajang	0.04	0.05	BELUM INKLUSIF
Madiun	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Magetan	0.05	0.05	INKLUSIF
Malang	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Mojokerto	0.04	0.05	BELUM INKLUSIF
Nganjuk	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Ngawi	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Pacitan	0.05	0.05	INKLUSIF
Pamekasan	0.01	0.05	BELUM INKLUSIF
Pasuruan	0.01	0.05	BELUM INKLUSIF
Ponorogo	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Probolinggo	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Sampang	-0.03	0.02	BELUM INKLUSIF
Sidoarjo	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Situbondo	0.05	0.05	INKLUSIF
Sumenep	-0.01	0.01	BELUM INKLUSIF
Trenggalek	0.04	0.05	BELUM INKLUSIF
Tuban	0.04	0.05	BELUM INKLUSIF
Tulungagung	0.02	0.05	BELUM INKLUSIF
Kota Batu	0.05	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Blitar	0.06	0.06	INKLUSIF
Kota Kediri	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Kota Madiun	0.08	0.06	INKLUSIF
Kota Malang	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Kota Mojokerto	0.06	0.06	INKLUSIF
Kota Pasuruan	0.03	0.05	BELUM INKLUSIF
Kota Probolinggo	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF
Kota Surabaya	0.02	0.06	BELUM INKLUSIF